

**IMPLEMENTASI PENGETAHUAN PEKERJAAN SOSIAL DALAM
PRAKTEK PEKERJA SOSIALDI BALAI REHABILITASI TERPADU
PENYANDANG DISABILITAS (BRTPD) YOGYAKARTA**



Oleh:
Furqon
NIM : 1520010073

TESIS

**Di Ajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk
Memenuhi Salah Satu syarat Guna Memperoleh Gelar Master of Science (M. Si)
Program Studi Interdiscilpinary Islamic Studies
Konsentrasi PekerjaanSosial**

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Furqon, S. Sos.I
NIM : 1520010073
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 24 April 2017

Saya yang menyatakan,



Furqon, S. Sos. I

NIM:1520010073

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Furqon, S. Sos.I
NIM : 1520010073
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 April 2017

Saya yang menyatakan,



Furqon, S. Sos. I

NIM:1520010073



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : IMPLEMENTASI PENGETAHUAN PEKERJAAN
SOSIAL DALAM PRAKTEK PEKERJA SOSIAL DI
BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG
DISABILITAS (BRTPD) YOGYAKARTA

Nama : Furqon, S.Sos.I

NIM : 1520010073

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

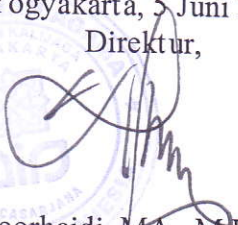
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Tanggal Ujian : 18 Mei 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Master of
Science (M.Si.)

Yogyakarta, 5 Juni 2017

Direktur,



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : IMPLEMENTASI PENGETAHUAN PEKERJAAN
SOSIAL DALAM PRAKTEK PEKERJA SOSIAL DI
: BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG
DISABILITAS (BRTPD) YOGYAKARTA

Nama : Furqon, S.Sos.I

NIM : 1520010073

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Najib Kailani, S.Fil., M.A., Ph.D

Pembimbing/Penguji : Drs. Latiful Khuluq, M.A., Ph.D

Penguji : Ro'fah, BSW., M.A., Ph.D

diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 Mei 2017

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Hasil/Nilai : 95 / A

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

IMPLEMENTASI PENGETAHUAN PEKERJAAN SOSIAL DALAM
PRAKTEK PEKERJA SOSIAL DI BALAI REHABILITASI TERPADU
PENYANDANG DISABILITAS (BRTPD) YOGYAKARTA

Yang ditulis oleh

Nama	: Furqon, S. Sos.I
NIM	: 1520010073
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	: Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Art.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 April 2017

Pembimbing,



Drs. Latiful Khuluq, M.A., Ph.D

MOTTO

**Yang membuatku terus berkembang
adalah tujuan-tujuan hidupku**

-Muhammad Ali-

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada Allah swt. Semoga dengan tulisan kecil ini menjadi pemberat timbangan amal shaleh di akherat kelak. Aamiin.

Untuk ilmu pengetahuan yang senantiasa menjadi lentera kehidupan, aku baru mulai menuju cahayamu dan tuntunlah aku selalu pada cahaya itu.

Dan kepada buyut-buyutku, kakek-nenekku, kedua orang tuaku tercinta Umi dan Abu, yang selalu mendoakanku dan setia menunggu selesainya Strata duaku ini, Bibiku, Umi Tamu dan Haji Neso yang selalu mendukungku dengan nasehat-nasehatnya, saudara perempuanku satu-satunya kak Suhada yang selalu mendukung baik moril dan materil. Tidak lupa saudara-saudarku yang lain yang juga mendukung dan nasehatnya. terimakasih atas motivasi dan doa kalian hingga aku bisa menyelesaikan perjuangan dan penulisan tugas akhir ini, semoga perjuangan ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian. *I am nothing without you all. So, thank you so much. I can never pay you back.*

ABSTRAK

Pengetahuan dalam pekerjaan sosial merupakan hal mendasar dalam suatu profesi pekerjaan sosial, jika pengetahuan tidak dipahami dengan baik maka dalam praktiknya sebagai seorang pekerja sosial tidak akan mampu melaksanakan praktiknya dengan baik. Pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang berlandaskan pengetahuan, Sehingga suatu praktek pertolongan profesional sudah seharusnya berlandaskan pada batang tubuh pengetahuan yang jelas, sehingga pengembalian keberfungsian sosial seseorang dilandasi dengan pahamnya seseorang dalam melaksanakan praktik sebagai pekerja sosial. Dari konteks tersebut penelitian ini ingin nerespon dua pertanyaan penting yaitu: (1) Bagaimanakah implementasi pengetahuan pekerjaan sosial di BRTPD Yogyakarta. (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi pengetahuan pekerjaan sosial dalam praktik pekerja sosial praktik di BRTPD Yogyakarta.

Guna memperoleh gambaran yang mendalam mengenai konsep tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mana peneliti mencoba menggambarkan subyek penelitian. Metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi pengetahuan pekerjaan sosial di BRTPD adalah dengan menerapkan beberapa tahapan-tahapan dalam proses pelayanannya yaitu dengan pendekatan awal, penerimaan, pelayanan dan rehabilitasi, Resosialisasi, pembinaan lanjut dan terminasi. Keseluruhan konsep ini terdapat beberapa hal yang digunakan dalam melakukan praktik pekerja sosial yang ada di BRTPD Yogyakarta. Namun pada aspek tersebut tentu memiliki kendala yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Pengetahuan tersebut yaitu ; para pekerja sosial yang bekerja di BRTPD merupakan pekerja sosial yang bukan berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial hanya satu dari lima pekerja sosial, sehingga dalam prakteknya mereka kurang memahami pengetahuan dasar akan pekerjaan sosial.

Kata Kunci: Implementasi, Pengetahuan Pekerjaan Sosial, Pekerja Sosial

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwū	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متّعدّدة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدّدة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta'* Marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	Ditulis	<i>i</i>
		Ditulis	<i>Ẓukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yāẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>Bainakum</i>
		ditulis	Au
		ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, semoga kita semua mendapatkan syafa'at di akhirat.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran staff di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terutama Dosen-dosen yang telah mengajar penulis hingga hari ini penulis mampu melewati setiap semester, tugas demi tugas yang diberikan sehingga penulis menyadari bahwa setiap langkah yang dilewati akan ada bekas kaki yang tersisa dan langkah itu pasti berhenti di setiap titik pencapaian.

Saya mengucapkan syukur dan terimakasih kepada kedua orang tuaku, keluargaku, sahabat-sahabatku yang telah memberikan cinta, dukungan dan motivasi agar tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Saya mencintai kalian semua.

Saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Lathiful Khuluq, M.A. Ph.D selaku dosen pembimbing tesis yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dengan penuh kesabaran dan ketelitian, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan baik. Teruntuk Bunda Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., Pd.D, selaku ketua Prodi IIS dan Dosen Peksos yang sangat luar biasa mengajar kami dan membimbing kami, sehingga kami tidak optimis akan keberadaan profesi Pekerja Sosial di Indonesia dan kami yakin bahwa kamilah penggerak perubahan sosial itu.

Tidak lupa Seluruh Bapak dan Ibu dosen Prodi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Pekerjaan Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa tentang pekerjaan sosial dan ilmu-ilmu lainnya bagi penulis.

Hanya Allah yang tahu kemana kaki ini akan terus melangkah, Tidak pernah ada yang kebetulan karena seyogyanya itu semua adalah rencana Allah, Sungguh tak pernah terbayangkan bisa menginjakkan kaki di kota pendidikan ini. Saya hanyalah seorang yang selalu bersemangat dalam menulis impian. Tak peduli apakah mimpi itu terlalu tinggi dan hanya khayalan belaka. Qadarallah, Allah lagi dan lagi mengijabah doa itu. Tak ada kata selain rasa syukur atas setiap nikmat yang diberikan. Sekarang kembali kediri ini, apakah jejak ini akan menjadi sebuah amalan ibadah atau justru sebaliknya. Semoga senantiasa istiqomah dalam melewati perjalanan ini, karena setiap langkah ini kelak akan di pertanggung jawabkan. Satu hal yang saya percaya apa yang saya capai saat ini bukan karena ikhtiar saya pribadi, Tapi ada doa ibu dan keluarga dalam setiap perjalanan, Ada perjuangan yang tak terlihat, Ada sahabat dan kerabat yang selalu memberikan dukungan. Terlebih terima kasih UIN Sunan kalijaga karena memberikan kesempatan untuk anak Desa ini meraih setiap mimpi. Alhamdulillah.

maka nikmat Allah yang manakah yang saya harus dustakan

Yogyakarta, 24 April 2017

Furqon, S. Sos. I
NIM: 1520010073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	11
a. Tujuan Penelitian	11
b. Kegunaan Penelitian.....	11
D. KAJIAN PUSTAKA	12
E. METODE PENELITIAN.....	20
a. Jenis Penelitian.....	20
b. Pendekatan Penelitian	21
c. Subjek dan Objek Penelitian	22
d. Sumber Data.....	22
e. Teknik Pengumpulan Data.....	24
f. Teknik Analisis Data.....	29

g. Pengecekan Keabsahan Data.....	32
F. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN	37
BAB II: PENGETAHUAN PEKERJAAN SOSIAL.....	39
A. Pengetahuan Pekerjaan Sosial.....	39
B. Landasan Pengetahuan Pekerjaan Sosial	43
C. Teori-Teori Dalam Pekerjaan Sosial.....	46
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
A. Sejarah Berdirinya Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta	49
B. Letak Geografis Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta	51
C. Visi dan Misi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta (BRTPD).....	53
D. Dasar Hukum Pelaksanaan Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta	54
E. Tujuan, Tugas dan Fungsi Balai rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta.....	55
F. Struktur Organisasi dan Personalia Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta.....	57
G. Personalia Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	60
H. Program Kegiatan Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta.....	61
I. Fasilitas Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta.....	63
J. Jumlah Klien Binaan	65
K. Prosedur Rujukan dan Persyaratan masuk di Balai Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas	66
L. Proses Pelayanan Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta.....	67

M. Tahapan–Tahapan Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi	69
N. Indikator Keberhasilan di Balai Rehabilitasi Terpadu	
Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta.....	72
O. Profil Singkat Pekerja Sosial di Balai Rehabilitasi	
Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta.....	72
P. Peran Pekerja Sosial di Balai Rehabilitasi	
Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta.....	74
BAB IV: IMPLEMENTASI PENGETAHUAN PEKERJAAN SOSIAL	
DALAM PRAKTIK PEKERJA SOSIAL.....	76
A. Pendahuluan	76
B. Teori Versus Pengalaman: Knowledge Base yang di Aplikasikan....	81
1. Pengetahuan Tentang Klien	85
a. Klien individu yang unik.....	85
b. Klien Pribadi yang Dinamis	89
c. Klien Pribadi yang Bertanggung Jawab	91
d. Klien Pribadi yang Memiliki Harkat dan Martabat.....	93
2. Pengetahuan Tentang Lingkungan Sosial (Pengetahuan yang Berkaitan Dengan Masyarakat dan Kebudayaan)	103
3. Isu-isu Penting Tentang Persoalan Lintas Budaya dan Bangsa .	108
4. Pengetahuan Tentang Profesi Pekerjaan Sosial Professional.....	110
a. Pengetahuan diri sebagai seorang pekerja sosial	112
b. Dilemma Nila Profesional dan Pribadi	114
C. Implementasi Pengetahuan Pekerja Sosial BRTPD	
Dalam Prakteknya Di BRTPD	121
D. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi	
Pengetahuan Pekerjaan Sosial Dalam Praktik Pekerja Sosial.....	138
1. Pekerja Sosial Yang Bukan Berlatar	
Belakang Pendidikan Pekerjaan Sosial	139

BAB V: PENUTUP	148
A. KESIMPULAN	148
B. REKOMENNDASI	151
a. Bagi Pekerja Sosial	151
b. Bagi BRTPD	153
DAFTAR PUSTAKA	154

DAFTAR TABEL

Table.1.	Disiplin Ilmu Pengetahuan Pekerjaan Sosial	41
Table.2.	Personalia Balai Rehabilitasi Terpadu PenyandangDisabilitas (BRTPD) Yogyakarta	60
Table.3.	Fasilitas Balai Rehabilitasi Terpadu PenyandangDisabilitas (BRTPD) Yogyakarta	64
Table.4.	Jumlah klien binaan di BRTPD	65
Bagan.1.	Struktur Kepengurusan BRTPD	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya beberapa lembaga sosial baik pemerintah maupun non pemerintah yang menangani permasalahan sosial, seperti penanganan anak jalanan, penanganan pengguna Napza, Lansia dan penanganan-permasalahan permasalahan sosial lainnya. Dalam lembaga-lembaga sosial tersebut tidak terlepas dari pada keberadaan profesi pekerjaan sosial yang menangani permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga permasalahan bisa diselesaikan secara baik dan profesional.

Domain utama para Pekerja Sosial adalah dalam bidang kesejahteraan (*welfare*), seperti halnya dokter dalam bidang kesehatan dan guru dalam bidang pendidikan. Di Indonesia bidang ini sering disebut sebagai pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standard dan kualitas hidup manusia.¹

Dalam meningkatkan keberfungsian sosial, pekerja sosial fokus pada interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya² agar masyarakat dapat berfungsi sosial secara efektif. Sebagai suatu aktivitas professional, pekerjaan sosial di dasari oleh kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka

¹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Mempekuat CST (Corporate Sosial Responsibility)*, (Bandung: Alfa Beta, 2009), hlm, 2.

² Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm, 26.

keahlian (*body of skills*), dan kerangka nilai (*body of values*) yang secara integrative membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial. Ketiga komponen tersebut dibentuk dan dikembangkan secara eklektik dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, politik dan ekonomi.³ Profesi pekerjaan sosial adalah yang pertama dalam pelayanan manusia yang memberikan fokus pada manusia dalam lingkungan sebagai suatu paradigma dalam asesmen dan perubahan.⁴ Sebagai ciri dari pekerjaan sosial ditandai oleh intervensi yang dilakukan oleh tenaga yang terdidik secara profesional, yang menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.⁵

Implementasi pengetahuan dalam penanganan masalah sosial masih terbatas pada wilayah tertentu saja, atau masih dalam komunitasnya, yang didalamnya sebagian besar terdiri dari pendidik pekerjaan sosial, para praktisi pekerjaan sosial, atau lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, termasuk kementerian sosial. Para pekerja sosial seharusnya mampu menunjukkan secara ‘khas’ dengan pembeda pendekatan pekerjaan sosial (*social work approach*: baik pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional) ketika terlibat dalam suatu proses penanganan masalah sosial yang bergerak bersama dengan berbagai disiplin ilmu lainnya.

³ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di duni Industri Mempekuat CST (Corporate Sosial Responsibility)*, hlm, 2.

⁴ Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene, *Buku Pintar Pekerja Sosial Jilid 2*. terj. Juda Damanik dan Cynthia Pattiasina (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), hlm, xiii.

⁵ Adi Fahrudin, *Kesejahteraan Sosial Internasional* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm, 92.

Pengetahuan adalah hasil dari research dan praktek yang sudah teruji kebenarannya. Dalam pemberian pelayanan pekerja sosial menggunakan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah teruji ketepatan dan kevaliditasannya.⁶

Pengetahuan pekerjaan sosial dikelompokkan dalam 3 golongan :

1. Pengetahuan tentang klien (individu, kelompok, masyarakat)
2. Pengetahuan tentang lingkungan sosial (pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat dan kebudayaan)
3. Pengetahuan tentang profesi pekerjaan sosial professional. Meliputi pengetahuan : Diri sebagai seorang pekerja sosial (*self*), dan profesi (*profession*)

NASW (*The National Association of Social Workers*) merumuskan pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki oleh Pekerja Sosial: *Human Development and Behavior* (Tingkah Laku dan Pengembangan Manusia) Psikologi, dimana individu dapat memperoleh pertolongan dari orang lain dan sumber-sumber diluar dirinya.⁷ Cara-cara bagaimana orang berkomunikasi dengan orang lain dan bagaimana cara mengekspresikan semua perasaan, baik melalui perkataan maupun perbuatan proses dan pengaruh kelompok terhadap individu maupun individu lainnya di dalam kelompok Pemahaman dan pengaruh interaksi antara individu, kelompok, dan masyarakat dengan kebudayaan-

⁶ *Ibid.*, hlm, 8.

⁷ Zastrow, Charles. *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People*. (Belmont: Brooks/Cole 2010), hlm, 37.

kebudayaan. Yang meliputi keagamaan, kepercayaan, nilai-nilai spiritual, hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lainnya

Dalam perkembangan praktek pekerjaan sosial, basis pengetahuan pekerjaan sosial cukup banyak dan terus berkembang secara konstan. Khususnya di negara-negara maju dan sebagian belahan bumi lainnya yang mengakui keberadaan kewenangan pekerja sosial dan praktek pekerjaan sosialnya. Seperti negara-negara ‘Barat’ (Amerika, Canada, Eropa, Astralia) dan sebagian negara-negara di Asia (India, bangladesh, Pakistan, Thailand, Filipina, Malaysia, Korea, dan banyak lagi). Lain hal dengan di Indonesia, yang sudah mengakui secara tertulis (yuridis formal) tentang profesi pekerjaan sosial, namun masih ragu atau ‘tanggung’ untuk memberikan kewenangan penuh bagi profesi pekerjaan sosial berpraktek secara profesional, baik yang di organisasi dikelola oleh pemerintah, apalagi yang dikelola oleh masyarakat atau swasta.

Perlu diperhatikan bahwa praktik pekerjaan sosial merupakan fenomena sosial yang bukanlah struktur makna yang abstrak, namun juga peristiwa-peristiwa dan obyek-obyek yang terjadi. Karena itulah, untuk memahami fenomena sosial mengharuskan lebih dari sekedar dari memahami apa yang dimaksud dengan fenomena sosial dalam hal ini pengetahuan dalam pekerjaan sosial, namun kita juga harus mengetahui mengapa fenomena sosial itu terjadi. dalam landasan filososis ilmu sosial diperhatikan bahwa dalam memahami aspek

etis dalam pekerjaan sosial pekerja sosial perlu memahami berbagai penjelasan yang memerlukan proses.⁸

Menurut Zastrow, dalam bekerja dengan individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan komunitas, seorang pekerja sosial diharapkan mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam memenuhi perannya yang bermacam-macam, di mana sekurang-kurangnya ada 13 peran yang dapat dikembangkan oleh pekerja sosial, yaitu *enabler* (pemercepat perubahan), *broker* (perantara), *advocate* (advokat), *empowerer* (pemberdaya), *activist* (aktifis), *mediator* (penengah), *negotiator* (perunding), *educator* (pendidik), *initiator* (pemrakarsa), *coordinator* (koordinator), *researcher* (peneliti), *group fasilitator* (fasilitator kelompok), dan *public speaker* (pembicara).⁹ Fink dalam Adi mengajukan beberapa bidang pekerjaan sosial yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial, di mana salah satunya adalah bidang yang terkait dengan pelayanan di bidang perawatan kesehatan. Pekerja sosial dalam setting ini biasa disebut sebagai Pekerja Sosial Medis (PSM). Meskipun keterlibatan utama PSM adalah dalam pelayanan langsung kepada pasien dan keluarganya, namun ada beberapa kegiatan pelayanan yang tidak langsung dilakukan oleh PSM, antara lain melakukan perencanaan kegiatan, mengatur jalannya program penelitian. Namun PSM bertanggung jawab penuh pada relawan yang akan mengikuti program.

⁸ Brian Fay, *Contemporary Philosophy of Social Science*, terj M. Munith, (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm, 171.

⁹ Zastrow, Charles. *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People*. (Belmont: Brooks/Cole. 2010), hlm, 34.

Pendampingan yang dilakukan baik oleh pekerja sosial maupun relawan hampir sama. Yang menjadi perbedaan adalah peran untuk melakukan konseling dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh korban. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Zastrow di mana diungkapkan bahwa kemampuan untuk melakukan konseling terhadap klien secara efektif mungkin adalah keahlian dasar yang paling dibutuhkan oleh pekerja sosial. Hal penting kedua yang dibutuhkan oleh pekerja sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan kelompok-kelompok dan profesi-profesi lain.¹⁰ Jadi peran pekerja sosial dan relawan dibedakan dari latar belakang pendidikan dan pelatihan mereka dalam mendapatkan bekal ketika mereka akan ataupun sedang menggeluti bidang pekerjaan sosial.

Terkadang dalam prakteknya baik itu penanganan klien secara individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, seorang pekerja sosial seringkali ditemukan masalah-masalah dalam aspek implementasi pengetahuan pekerjaan sosial yang mereka dapat ketika di bangku kuliah. Pekerja sosial menempati posisi yang sangat sentral dan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan lembaga sosial yang memiliki peranan dalam menyelesaikan masalah dengan klien. Sebab itu para pekerja sosial berusaha mengupayakan agar pengetahuan yang mereka dapatkan dapat di implemtasikan dengan baik sesuai dengan apa yang mereka dapatkan ketika mereka berada di bangku kuliah.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

Dalam mengembangkan berbagai layanan sosial (*social services*) pada masyarakat, para sarjana kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial mempunyai nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dalam melakukan praktik perubahan sosial terencana (intervensi sosial).¹¹ Seorang pekerja sosial ketika melakukan proses pemberian pelayanan terhadap klien setidaknya memahami beberapa pengetahuan yang terkait dengan profesinya tersebut. Pengetahuan dalam pekerjaan sosial adalah hasil dari research dan praktek yang sudah teruji ketepatan dan kebenarannya dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial menggunakan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah teruji dan kevaliditasannya.¹²

Pekerjaan sosial telah dipengaruhi oleh bentuk-bentuk peraturan-peraturan yang ada di lembaga sehingga pada prakteknya pekerja sosial melupakan apa yang mereka ketahui tentang pengetahuan pekerjaan sosial. Sejalan dengan hal tersebut pekerja sosial tidak serta merta melupakan segala pengetahuan yang mereka dapatkan ketika berada di bangku kuliah. Pengetahuan menggambarkan luasnya penguasaan materi (misalnya teori-teori tentang pekerjaan sosial).¹³ Pekerja sosial sering kali dilematis ketika menghadapi situasi seperti ini antara harus mengikuti aturan lembaga atau menerapkan pengetahuan

¹¹ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) suatu Pengantar*, (Jakarta, PT RajaGrafindo, 2013), hlm, 77.

¹² Abdul Najib, *Integrasi Pekerjaan Sosial, Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat: Tinjauan Aksi Sosial Menuju Pembangunan dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Semesta Ilmu, 20016), hlm, 88.

¹³ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm, 4.

mereka, sehingga pada akhirnya bertolak belakang dengan apa yang terjadi dalam prakteknya. Lembaga sosial sebagai wadah bagi para pekerja sosial untuk mengimplementasikan segala bentuk pengetahuan yang di dapat ketika di Universitas harusnya memberi kesempatan kepada para pekerja sosial untuk mengimplentasikan pengetahuan yang mereka dapatkan sehingga para pekerja sosial bebas berekspresi sesuai dengan apa yang mereka ketahui.

Lembaga sosial sebagai pelaksana dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat terus berusaha menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tempat penanganan masalah sosial namun dalam lembaga tersebut tidak di barengi dengan di fungsikannya dengan baik keberadaan para pekerja sosial yang merupakan profesi yang bisa menyelesaikan persoalan dengan baik dan profesional.

Penelitian ini menfokuskan pada implementasi pengetahuan pekerja sosial dalam praktek pekerja sosial di lapangan yaitu di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta. Penelitian tentang pekerjaan sosial yang melaksanakan intervensi dan peranan pekerjaan sosial dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial sudah banyak penelitian yang dilakukan, sementara pada aspek implementasi pengetahuan yang di dapat di bangku kuliah oleh para sarjana pekerja sosial tampak belum banyak yang meneliti, oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian terkait dengan implementasi pengetahuan pekerja sosial dalam prakteknya di lembaga sosial.

Hadirnya BRTPD Yogyakarta yang merupakan lembaga pelayanan sosial yang berorientasi pada penyandang disabilitas telah memberikan peluang bagi pekerja sosial dalam berpraktik. Pekerja sosial yang terdapat di BRTPD Yogyakarta datang dari berbagai pendidikan yang berbeda-beda, sehingga pelaksanaan praktiknya terkadang berbeda dengan pengetahuan pekerjaan sosial. Dengan demikian, pekerja sosial di BRTPD dihadapkan pada posisi yang penuh dengan kendala dalam implementasi pelaksanaan pengetahuan pekerjaan sosial.¹⁴

Dengan demikian, pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu pengetahuan berorientasikan pada pengetahuan dasar pekerjaan sosial sehingga dapat dilaksanakan guna mewujudkan tujuan-tujuan yang disebutkan di atas. Pekerjaan sosial berusaha menciptakan “iklim perubahan” pada klien bermasalah sehingga tercapai tujuan akhir berdasarkan pengetahuan dan nilai-nilai dalam pekerjaan sosial.¹⁵ Pengetahuan pekerjaan sosial merupakan suatu yang penting dan menjadi bagian yang sangat pokok dalam praktik pekerja sosial.

Oleh sebab itu, Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta dalam pelaksanaannya melibatkan pekerja sosial dalam menangani kasus yang ada di lembaga. Dalam hal ini pekerja sosial sering dihadapkan dengan berbagai masalah terutama yang berkaitan dengan implementasi pengetahuan pekerjaan sosial.

¹⁴ Hasil Triangulasi Observasi dan Wawancara pada tanggal 23 Januari 2017.

¹⁵ Soetarso, *Praktek Pekerja Sosial Dalam Pembangunan Masyarakat*, (Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS Bandung, 1994), hlm. 62.

Dengan adanya Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta memberikan peluang bagi pekerja sosial melakukan praktek dengan individu yang bermasalah sehingga mampu melaksanakan praktek dengan berbagai keilmuannya yang bersumber dari pengetahuan dan pengalaman-pengalamannya. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta sebagai lembaga yang bergerak pada proses rehabilitasi Terpadu pada penyandang disabilitas memiliki peran sentral dalam mengembangkan dan memajukan potensi sumber daya manusia yang siap bekerja dan siap menghadapi kemajuan zaman. BRTPD Yogyakarta memiliki tujuan dalam mengembangkan sumber daya individu untuk dapat kembali mencapai fungsi sosial para penyandang disabilitas dengan menggunakan pendekatan sosial dan psikoterapi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk implementasi pengetahuan pekerjaan sosial dalam praktek pekerja sosial di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam implementasi pengetahuan pekerjaan sosial dalam praktek pekerja sosial di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan atau tindakan yang sifatnya ilmiah tentu mempunyai tujuan-tujuan agar perbuatan itu tidak sia-sia hasilnya. Demikian pula dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Bentuk-bentuk implementasi pengetahuan pekerjaan sosial dalam praktek pekerja sosial di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta.
- b. apa kendala yang dihadapi dalam implementasi pengetahuan pekerjaan sosial dalam praktek pekerja sosial di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat bermanfaat baik secara teoretis dan praktis. Adapun kegunaan secara teoretis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Manfaat Secara Teoretis, menambah khazanah ilmu pengetahuan kita dalam melakukan proses intervensi dalam penanganan kasus dengan implementasi pengetahuan pekerjaan sosial dalam setiap praktek dalam menangani kasus atau masalah-masalah sosial. Serta memberikan kontribusi pemikiran secara pradigmatis tentang pembangunan kesejahteraan sosial di berbagai lembaga sosial di Indonesia.

Kedua, Manfaat Secara Praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pekerja sosial diberbagai lembaga rehabilitasi sosial supaya lebih implementasikan kemampuan yang ada dalam dirinya. Serta mampu berkereasi dalam menggunakan pengetahuan pekerja sosial secara maksimal yang merupakan asas-asas dalam praktek pekerja sosial professional, agar mampu menerapkan secara maksimal apa yang menjadi tugas, serta prinsip etik dalam ilmu pekerjaan sosial

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelusuran tentang studi terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. dari penelusuran berbagai literature baik itu skripsi maupun tesis yang telah di tulis oleh peneliti terdahulu, dan penulis masih belum menemukan bahasan secara spesifik hal yang berkaitan dengan penerapan pengetahuan dalam praktek pekerjaan sosial, serta banyak ditemukan di dalam jurnal dan artikel berbahasa asing. Sedangkan dalam konteks tulisan dalam bahasa Indonesia penulis masih jarang ditemukan.

Namun untuk mencegah duplikasi, plagiasi, revisi serta menjamin keaslian dan keabsahan data dalam penelitian ini maka penulis akan mencantumkan berbagai referensi yang penulis peroleh dari sumber maupun penulis pakai dalam penelitian ini yaitu berupa *foot note / annotated bibliography* maupun referensi lain yang menyangkut kepentingan dalam penulisan tesis ini yang jelas terlacak dan mengutamakan sumber primer. Maka dari itu, sebagai bahan perbandingan, maka penulis akan mengangkat beberapa karya tulis ilmiah

yang berkaitan dengan implementasi pengetahuan pekerjaan sosial atau praktek pekerja sosial.

Pertama, Marilyn A Biggerstaff and Michael S Kolevzon. Dengan judul artikel “ *Differential use of Social Work Knowledge, Skills, and Techniques by MSW, BSW and BA Level Practitioners*” dalam *Journal of Education for Social Work*, Volume. 16, No. 3 (FALL 1980), dalam artikel ini membahas tentang pentingnya pendidikan pekerjaan sosial bagi seorang pekerja sosial yang bekerja di sebuah instansi atau lembaga. Dalam tulisannya mereka membahas tentang perbedaan Penggunaan Pengetahuan, keterampilan dan teknik pada setiap pekerja sosial yang berbeda pada gelar BA, BSW dan MSW. Setiap pekerja sosial dengan gelar yang berbeda dari pendidikan profesi pekerjaan sosial berbeda cara mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat ketika sudah bekerja di sebuah lembaga penanganan sosial. Perbandingan yang mereka temukan dilapangan bahwa pekerja sosial yang bergelar sarjana dan magister akan memiliki perbedaan yang sangat kuat ketika mengaplikasikan ilmunya. Pengetahuan dan keterampilan menjadi hal dasar yang perlu di ketahui oleh para pekerja sosial, hanya saja perbedaanya bagaimana nanti teknik-teknik penanganan yang dilakukan oleh pekerja sosial yang bergelar sarjana dan magister ini melakukan penanganan pada kliennya. Pada akhirnya para pekerja sosial yang berbeda tingkat pendidikannya harus sama-sama saling mengisi dan

bagaimana menyelesaikan permasalahan klien dengan cara dan tehniknya masing-masing di setiap bidang pekerjaan mereka.¹⁶

Penelitian dalam artikel yang ditulis oleh Marylin ini memiliki relevansi dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sendiri. Relevansinya adalah terletak pada fokus penelitian yang diteliti yaitu tentang pengetahuan pekerja sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial ketika melakukan praktek dilembaga. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada perbedaan penerapan pengetahuan pekerja sosial yang tingkat pendidikannya berbeda disetiap gelarnya.

Kedua, Pamela Trevithick dengan judul artikel “*Revisiting the Knowledge Base of Social Work: A Framework for Practice*” dalam *The British Journal of Social Work*, Volume. 38, No. 6 (September 2008). Dalam tulisannya Pamela mencoba menjelaskan dasar-dasar pengetahuan bagi pekerja sosial. Pada Bagian pertama Pamela mengkategorikan pengetahuan teoritis, atau teori, menjadi tiga bagian yang pertama, teori yang menerangkan pemahaman kita tentang orang, situasi dan peristiwa yang terjadi. Yang kedua, teori-teori yang menganalisis peran, tugas dan tujuan Pekerja Sosial dan ketiga, teori-teori yang berhubungan dengan praktik langsung, seperti pendekatan pada praktek dan perspektif. Selain itu dalam jurnal ini juga memberikan kontribusi untuk mengeksplorasi dan memulai dengan konsep umum tentang bagaimana pengetahuan dan teori yang

¹⁶ Marilyn A Biggerstaff and Michael S Kolvezon, Differential use of Social Work Knowledge, Skills, and Techniques by MSW, BSW and BA Level Practitioners, dalam *Journal of Education for Social Work*, Volume. 16, No. 3 (1980)

telah ditetapkan dan bagaimana gagasan tersebut berhubungan dengan kesulitan yang dihadapi dalam praktek pekerjaan sosial saat ini. Ini kemudian menjelaskan kerangka ilmu yang dikonseptualisasikan dalam tiga jalur dan kerangka yang tumpang tindih: *Pertama*, pengetahuan teoritis. *Kedua*, pengetahuan faktual dalam hal ini termasuk pengetahuan hasil dari penelitian. Dan *Ketiga*, praktek langsung yang di dapat dari pengetahuan pribadi atau pengalaman. Ketiga Kerangka ini harus diakui bahwa semua pengetahuan mengantarkan semua pihak ke dalam satu pertemuan, termasuk praktisi, profesi lain dan individu yang terlibat. Secara khusus, kerangkanya dapat meningkatkan pengetahuan dan penggunaan layanan dan membawa kita masuk dalam pengetahuan mereka dalam kerangka yang sama dengan pengetahuan yang ditunjukkan oleh para profesional, sehingga memastikan bahwa semua bentuk pengetahuan dianggap relevan dan digunakan dalam cara-cara yang bisa membimbing dalam memahami dan tindakan nyata.¹⁷

Penelitian dalam artikel yang ditulis oleh Pamela ini memiliki relevansi dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sendiri. Relevansinya adalah terletak pada bagaimana kerangka dasar pengetahuan pekerja sosial harus di pahami dan di perdalam oleh para pekerja sosial nantinya ketika menerapkan ilmu pengetahuan mereka di lapangan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada terlalu luasnya cakupan yang diambil oleh

¹⁷ Pamela Trevithick, Revisiting the Knowledge Base of Social Work: A Framework for Practice, dalam *The British Journal of Social Work*, Volume. 38, No. 6 (September 2008)

Pamela ketika pengetahuan itu di terapkan dalam setiap pelaksanaan di lembaga atau lapangan tertentu. Sementara peneliti sendiri hanya mengambil sebuah kasus di lembaga yang nantinya akan peneliti kembangkan dalam studi analisisnya dilapangan.

Ketiga, Jennifer Osmond dari Griffith University, Queensland, Australia dengan judul artikel *Knowledge Use in Social Work Practice Examining and Functional Possibilities* dalam *Journal of Social Work*, Volume 6, No. 3 Tahun 2006. Dalam artikelnya, Jennifer menggarisbawahi bahwa penggunaan pengetahuan digunakan untuk tujuan konseptual dan instrumen saja dengan sepuluh fungsi utama yaitu kesadaran, prediksi, peringatan, perbandingan, generalisasi, perilaku praktek, etika, pendidikan dan pengembangan atau pemecahan masalah. Meskipun ukuran sampel dan isu-isu kontekstual membatasi generalisasi penelitian, data kualitatif mengungkapkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk kedua tujuan konseptual dan instrumental. Dengan memeriksa penggunaan fungsional pengetahuan, telah muncul bahwa ujung ke mana pengetahuan diletakkan bisa sangat beragam. Oleh karena itu dalam analisisnya menekankan bahwa pemeriksaan penggunaan pengetahuan praktisi (fungsional) dapat menghasilkan sesuatu yang berharga. Bentuk dan ujung praktek kemudian dapat di lakukan, jika diinginkan. Selanjutnya, peningkatan pemahaman masalah ini bahwa para praktisi dapat lebih proaktif tidak hanya dalam menilai atau

mengenali kebutuhan pengetahuan mereka, tetapi juga kreatif menggunakan pengetahuan mereka dalam prakteknya.¹⁸

Penelitian dalam artikel yang ditulis oleh Jennifer ini memiliki relevansi dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sendiri. Relevansinya adalah terletak pada penerapan pengetahuan pekerja sosial, wawasan tentang pekerja sosial harus di kuasai dengan benar sebelum terjun ke lapangan. Pekerja sosial harus menentukan baik dan buruknya ketika memutuskan suatu perkara dengan kliennya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada konteks fungsi pengetahuan pekerja sosial saja yang di fokuskan dalam artikel ini. sementara penulis akan melihat secara luas bagaimana pengetahuan-pengetahuan pekerja sosial diterapkan ketika di praktekkan di lembaga.

Keempat, Malcolm Payne dari Manchester Metropolitan University, England dengan judul artikel *Knowledge Bases and Knowledge Biases In Social Work* dalam *Journal of Social Work*, Volume 1, No. 2 Tahun 2001. Malcolm menguraikan dalam jurnalnya bahwa dalam gagasan dasar pengetahuan meliputi konsep pengetahuan ilmu sosial yang terus menerus di rekonstruksi sebagai tindakan dasar dalam mendefinisikan praktek pekerjaan sosial. Empat fokus permasalahan dalam pekerjaan sosial di mana konsep ini terutama digunakan dalam mendefinisikan proses profesionalisasi, mendefinisikan pelatihan dan

¹⁸ Jennifer Osmond, Knowledge Use in Social Work Practice Examining and Functional Possibilities, dalam *Journal Of Social Work*, Volume 6, No. 3 Tahun 2006

kurikulum pendidikan, mengidentifikasi apa pengetahuan berguna dalam praktek dan mendefinisikan peran profesional dalam multidisiplin. Lebih lanjut Malcolm memaparkan beberapa masalah dalam menganalisis batas-batas Praktek Profesional dapat diatasi jika kita siap untuk melihat pengetahuan profesional sebagai proses sosial dari pembangunan yang bias dalam pengetahuan dasar yang lebih luas. Tidak perlu juga untuk menetapkan batas-batas dimana dasar pengetahuan, baik dalam profesi antara teori dan praktek karena memang sama. Menganalisis dan memahami penggunaan dan interpretasi pengetahuan sebagai dasar untuk profesionalisasi saat menerima bahwa peran pengetahuan dalam ilmu-ilmu sosial lebih dari proses konstruksi sosial dari pembentukan hukum yang tidak terbantahkan dalam perilaku sosial yang universal. Hal ini karena pengetahuan disajikan dan dikembangkan dalam arena pekerjaan sosial dari sumber dan mempelajari bagaimana mempraktekan dan menafsirkan serta menggunakan pengetahuan memberi kita wawasan penting ke dalam proses-proses sosial yang menentukan bias pengetahuan pekerjaan sosial.¹⁹

Penelitian dalam artikel yang ditulis oleh Malcolm ini memiliki relevansi dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sendiri. Relevansinya adalah terletak pada penerapan pengetahuan pekerja sosial namun Malcolm menemukan perbedaan cara penerapan pengetahuan mereka di setiap negara meskipun pada dasarnya pengetahuan pekerjaan sosial berasal dari

¹⁹ Malcolm Payne, Knowledge Bases and Knowledge Biases In Social Work, dalam *Journal of Social Work*, Volume 1, No. 2 Tahun 2001

pengetahuan dan teori yang sama. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada bagaimana Malcolm melihat pekerja sosial dari berbagai sudut kebudayaan di tiap negara yang kemudian melahirkan cara penerapan dan praktek yang berbeda, sementara peneliti sendiri hanya menfokuskan pekerja sosial yang ada di lembaga Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta.

Kelima, Eillen Munro dari Eel Pie Island, Twickenham TW1 3EA, UK dengan judul artikel *Improving Social Worker's Knowledge Base in Child Protection Work*. Dalam *Bristish Journal of Social Work*, Volume 89-102, No. 28 Tahun 1998. Eillen dalam jurnalnya menyampaikan temuannya yang berkaitan dengan kritik pada pengetahuan dasar pekerja sosial. Kualitas penyelidikan dan penilaian yang berulang kali di salahkan oleh masyarakat dalam menangani kasus anak. Selain itu banyak masalah yang timbul dari kegagalan para pekerja sosial. Mayoritas pekerja sosial terutama mengandalkan pada pemahaman akal sehat mereka dari orang, diperkaya dengan beberapa ide teoritis dari kursus pelatihan dan wawasan yang diperoleh dari pengalaman praktis. Mereka mengalami kesulitan dalam mengartikulasikan alasan mereka atau dalam menetapkan mana teori, jika ada, yang mereka gunakan. Dalam mengevaluasi strategi untuk meningkatkan praktek para pekerja sosial, perlu mempertimbangkan sifat dasar teoritis pekerjaan sosial dan cara teori-teori yang

digunakan oleh praktisi. Upaya untuk meningkatkan praktek kerja sosial telah menekankan perlunya pelatihan lebih.²⁰

Penelitian dalam artikel yang ditulis oleh Munro ini memiliki relevansi dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sendiri. Relevansinya adalah terletak pada penerapan pengetahuan pekerja sosial yang bekerja di lembaga penanganan anak dengan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pekerja sosial yang menjadi kekhawatiran Munro adalah pekerja sosial yang tidak punya basic pendidikan pekerja sosial atau ilmu kesejahteraan sosial, sementara peneliti sendiri akan meneliti pekerja sosial profesional yang berlatar belakang pendidikan pekerja sosial dan ilmu kesejahteraan sosial yang ada di lembaga Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks dan dinamis sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah, karena orientasinya demikian maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau

²⁰ Eillen Munro, Improving Social Worker's Knowledge Base in Child Protection Work dalam *Bristish Journal of Social Work*, Volume 89-102, No. 28 Tahun 1998

kealamiahan serta tidak dapat dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan.

Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.²¹ Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis. yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah yang ada di lembaga, mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada di lembaga dapat dipahami.

Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono²² adalah : “Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.”

²¹Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm, 3.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm, 29

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.²³

c. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang memungkinkan untuk memperoleh keterangan penelitian atau data. Adapun yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah pekerja sosial yang ada di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta. Sedangkan obyek penelitian ini adalah proses pelaksanaan implementasi pengetahuan pekerja sosial dalam praktek pekerja sosial yang telah dipaparkan di bagian teori.

d. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data penelitian dipilih secara *purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut di anggap lebih tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang akan diteliti. Dalam Sugiyono mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa situasi sosial untuk instrumen sangat disarankan suatu situasi sosial yang di

²³ Soetandya Wigonoebroto, *Fenomena Cq Realitas Sosial Sebagai Obyek Kajian Ilmu (Sains) Sosial*, dalam Burhan Bungin (editor), *Metodologi Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm, 17.

dalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa, subyek sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlihat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil "kemasannya" sendiri.
5. Siapa saja yang dijadikan sumber data dan berapa jumlahnya dapat diketahui setelah penelitian selesai. karena pengambilan subyek itu dihentikan manakala datanya sudah jenuh.²⁴

Bilamana pemilihan informan benar-benar jatuh pada subyek benar-benar menguasai situasi sosial yang diteliti (obyek), maka merupakan bagi peneliti karena tidak memerlukan banyak informan lagi, sehingga peneliti cepat selesai. Jadi yang menjadi kepedulian bagi peneliti ini adalah "tuntasnya" perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada bukan banyaknya sampel data.

²⁴ Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfa Beta. CV, 2009), hlm, 221.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis setidaknya menggunakan tiga teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki.²⁵ Notoadmodjo mendefinisikan observasi sebagai perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan.²⁶ Menurut Susan Stainback mengemukakan bahwa observasi adalah peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.²⁷ Adapun tahapan observasi menurut Spradley yaitu: *pertama*, Observasi Deskriptif, dilakukan peneliti pada saat memasuki situasi sosial tertentu sebagai obyek penelitian. Pada tahap ini peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti, maka peneliti melakukan penjelajah umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar dan dirasakan.

Kedua, Observasi Terfokus, pada tahap ini peneliti memfokuskan pada masalah tertentu, memilih data yang menarik

²⁵ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2004), hlm, 70.

²⁶ B. Sandjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian* (Jakarta:Prestasi Pustakaraya, 2011), hlm, 143.

²⁷ Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 227.

penting dan berguna. Data yang dirasa tidak dipakai disingkirkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka data-data tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi beberapa kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian.

Ketiga, Observasi Terseleksi, pada observasi ini peneliti telah menguraikan fokus yang diuraikan sehingga data lebih rinci dan diharapkan peneliti telah dapat menemukan pemahaman yang mendalam. Dalam penelitian ini peneliti akan mengobservasi aktivitas yang dilakukan oleh pekerja sosial atau observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan di mana observer berada bersama objek yang diteliti. Adapun yang menjadi objek dalam observasi ini adalah sebagai berikut: (1) Place, atau tempat di mana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung. (2) Actor, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu. (3) Activity, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. Ketiga elemen utama tersebut, dapat diperluas sehingga apa yang dapat di amati adalah:

- a) Semua orang-orang yang terlibat dalam situasi sosial. Baik subjek maupun objek dalam intervensi pekerja sosial.
- b) Seperangkat kegiatan yang dilakukan orang. Termasuk orang-orang yang memiliki peran dalam kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial.

- c) Perbuatan atau tindakan-tindakan tertentu. Misalnya kegiatan dalam memutuskan tindakan bagi pekerja sosial.
- d) Serangkaian aktivitas yang dikerjakan orang-orang. Dalam hal ini peneliti mengobservasi apa saja yang menjadi keseharian antara klien dan pekerja sosial.
- e) Tujuan yang ingin dicapai orang-orang. Dalam hal ini apa hakikat dari praktek penerapan nilai dan etika yang dilakukan oleh pekerja sosial.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan lisan atau dengan kata lain adalah wawancara atau tanya jawab yang berguna untuk melengkapi keterangan penyelidikan dengan menggunakan metode observasi. Apa yang belum jelas dari pengamatan atau penyelidikan dapat ditanyakan pada metode wawancara sehingga antara metode observasi dan metode wawancara saling melengkapi. Wawancara di sini adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁸ Jadi wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan.²⁹

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), hlm, 145.

²⁹ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian, Sosial Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009), hlm, 179.

Metode wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Dari pendapat tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa metode wawancara merupakan suatu tehnik dalam rangka mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan tanya jawab dengan sumber data (*informan*).

Dalam hal ini peneliti memilih wawancara tak berstruktur yang artinya peneliti bebas menggunakan pertanyaan terhadap informan. Penggunaan wawancara tidak terstruktur oleh peneliti supaya lebih cepat dan mudah mendapatkan informasi data yang dibutuhkan dari informan. Adapun yang akan diwawancara dalam hal ini adalah:

1. Kepala Panti Sosial/yang berwenang Kepala Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta untuk mendapatkan beragam informasi bagaimana bentuk implementasi pengetahuan pekerja sosial dalam praktek pekerja sosial yang dilakukan oleh aktor pekerja sosial yang ada di lembaga.
2. Semua pekerja sosial Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta.
3. Tiga orang dari perwakilan atau lebih dari klien yang telah ditangani atau sedang ditangani.

c. Dokumentasi

Dokumen berasal dari kata *Document*, yang berarti barang-barang tertulis, Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya,³⁰ atau metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan-bahan tertulis.

Dengan demikian yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data atau penelitian yang berbentuk dokumen-dokumen untuk memperoleh berbagai keterangan atau informasi yang di perlukan. Sedangkan bentuk-bentuk dokumentasi bisa berupa catatan, transkrip, majalah, notulasi rapat, laporan, catatan khusus, surat kabar, dan dokumen resmi lainnya.³¹ Metode ini digunakan dalam penelitian sebagai upaya untuk memperoleh data sebagai berikut: (a) Letak Geografis Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta. (b) Data dan struktur organisasi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta (c) Hal-hal yang berkaitan dengan pekerja sosial Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm, 236.

³¹ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm.70.

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan, analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis sebelum di lapangan analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

Analisis selama di lapangan yang digunakan peneliti adalah model Miles *and* Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles *and* Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.³² Aktifitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu. maka perlu dicatat secara teliti dan rinci semakin lama peneliti di lapangan. Maka jumlah data akan semakin banyak kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok

³² Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, hlm, 246.

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Menurut Miles *and* Huberman, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.³³

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah *mendisplay data*. Dalam hal penelitian ini penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles *and* Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya Milles *and* Huberman menyarankan dalam melakukan *display* data selain dengan teks dan naratif juga dapat berupa grafis, matrik, *network* (jaringan kerja) dan *chart*.³⁴ Dengan *mendisplay data* maka akan memudahkan

³³ Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian* (Malang: Intimedia. 2012), hlm, 85.

³⁴ *Ibid.*, hlm, 249.

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

g. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan

antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Adapun yang akan digunakan peneliti dalam menguji keabsahan data yaitu uji kredibilitas, kecakupan referensi, dan keikutsertaan peneliti. Menurut Sugiyono uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan:

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini antara lain yang dilakukan:

1. Perpanjang pengamatan. Dengan perpanjang pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dalam perpanjang pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini. Peneliti menfokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.
2. Meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan.

Dengan cara tersebut maka kepastian data urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Mengadakan *member check*. *Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Agar informasi yang diperoleh akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan.
4. Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-data itu.³⁵ Dalam metode triangulasi yang penulis gunakan yaitu untuk membandingkan hasil wawancara dan hasil observasi. Hal ini untuk membandingkan apa yang dilihat dan apa yang didengar oleh penulis, sehingga hasil penelitian tidak bertolak belakang dengan fakta dan realitas yang ada. Teknik ini juga memadukan pemeriksaan data dengan menggali informasi dari sumber-sumber penelitian.

³⁵ *Ibid.*, hlm, 330.

Keabsahan data atau temuan sangatlah penting dalam suatu penelitian untuk memperoleh hasil data yang ril dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian sebelum proses analisis data, tentunya data-data yang diperoleh harus benar-benar sesuai dengan tema guna sebagai pendukung proses penelitian yang dilaksanakan. Untuk itu, dalam menguji validnya data yang telah diperoleh maka peneliti menentukan teknik triangulasi sebagai cara atau teknik yang peneliti gunakan dalam menguji keabsahan data yang dimaksud sebagaimana yang diutarakan oleh Sugiyono,³⁶ dimana triangulasi data merupakan pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, di mana dalam teknik triangulasi tersebut terdapat 3 (tiga) tahap yang harus di lalui di antaranya sebagai berikut:

- a) Triangulasi sumber. Triangulasi sumber maksudnya adalah mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang dapat dipercaya. Dalam peneltian ini yang menjadi objek adalah pekerja sosial yang profesional yang ada di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta. Maka dalam menguji kebenaran yang berupa pernyataan dari pekerja sosial, kemudian menyambung ikatan emosional dengan orang-orang yang ada disekeliling mereka. Namun apabila data yang diperoleh dari

³⁶ Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung:Alfa Beta. CV, 2009), hlm, 274.

informan primer berbeda dengan apa yang didapatkan dari informan sekunder, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan informan primer.

- b) Triangulasi teknik. Pada tahap ini, keabsahan data diuji dengan cara mengecek data kepada informan primer dengan berbagai teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) teknik yang digunakan dalam memperoleh atau mengumpulkan data yakni teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Misalnya data yang peneliti peroleh melalui observasi belum begitu meyakinkan, maka peneliti menggunakan teknik wawancara guna mengklarifikasi kebenaran data tersebut, dan demikian seterusnya.
- c) Triangulasi waktu. Teknik triangulasi waktu maksudnya adalah memilih waktu yang tepat untuk mewawancarai informan demi memperoleh data yang lebih valid, karena dalam setiap waktu tertentu pendapat yang diutarakan pastinya berbeda-beda. Untuk itu, apabila data yang diperoleh pada saat-saat tertentu masih belum valid, maka peneliti mengklarifikasi kembali apa yang diuraikan oleh informan tersebut.

b. Keikutsertaan Peneliti

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data, keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan yang akan

memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

Perpanjang waktu penelitian ini peneliti lakukan apabila data yang diperoleh kurang valid. Dalam hal ini peneliti lebih banyak mempelajari berbagai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengambilan keputusan yang berasaskan pengetahuan-pengetahuan dalam pekerjaan sosial, di mana penelitian dilaksanakan dan peneliti dapat menguji secara langsung informasi yang didapatkan di lapangan.

c. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi ini digunakan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan keritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Dalam penelitian ini hasil wawancara, observasi dan pengumpulan data melalui dokumentasi ataupun data yang diperoleh dari sumber lainnya akan dibandingkan dengan tingkat kesesuaian referensi yang telah ada.

Referensi atau bahan bacaan yang lengkap dalam suatu penelitian merupakan bahan pembanding terhadap cara dan temuan di lokasi dan lapangan dengan referensi merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keabsahan data. Makin banyak referensi yang dimiliki maka makin cepat memperoleh bahan pembanding dalam mengkonsultasikan data temuan di lapangan.

F. Sistematika Penulisan Laporan

Laporan dalam penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:³⁷

BAB I PENDAHULUAN, Bagian ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan kajian pustaka, dan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI, Bagian ini menguraikan landasan teoritis yang digunakan untuk melihat permasalahan penelitian secara ilmiah. Teori-teori yang relevan dengan topik penelitian diuraikan sesuai dengan fungsinya dengan memberi arah bagi jalannya proses penelitian. Teori pokok yang digunakan dalam kajian ini adalah beberapa nilai dan prinsip etika yang lazim digunakan dalam ilmu pekerjaan sosial. Hal pokok dalam penggunaan teori dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan teori yang baku dan banyak diuraikan oleh beberapa ahli sehingga membuat proses penggunaan teori agak sedikit stagnan.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, Bagian ini merupakan pemaparan dan temuan-temuan yang didapatkan selama melaksanakan proses penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN, Bagian ini memuat uraian mengenai proses penelitian yang telah dilakukan, termasuk proses penerapan metode untuk menginterpretasi data-data hasil penelitian. Pada bagian ini, data-data yang telah

³⁷ Pedoman Penulisan Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, hlm, 7.

didapatkan selama proses penelitian dianalisis sehingga rumusan permasalahan penelitian dapat terjawab.

BAB V PENUTUP, Pada bagian ini, peneliti merangkum hasil penelitian sehingga berbentuk kesimpulan. Selanjutnya, peneliti mengajukan beberapa saran dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang relevan.

BAB II

PENGETAHUAN PEKERJAAN SOSIAL

A. Pengetahuan Pekerjaan Sosial

Perpaduan Pekerjaan sosial merupakan suatu perpaduan ilmu pengetahuan, nilai-nilai dan skill, ketiga hal tersebut merupakan perpektif utama dalam praktek pekerja sosial. Perkembangan teori yang sistematis dari praktik dasar menyatakan bahwa praktek didasari dalam suatu pengetahuan dan praktik-praktik yang menggunakan knowledge base tersebut dalam pengambilan keputusan praktek mereka.

Pengetahuan, nilai dan skill berkaitan dengan perasaan, dan pikiran. Pengetahuan (*knowledge*) merupakan bagian kognitif atau komponen pikiran dalam praktek, nilai-nilai merupakan bagian perasaan atau komponen emosi, namun dalam beberapa cara nilai-nilai merupakan bagian komponen pikiran, *skill* yang merupakan *action* atau tindakan pekerjaan sosial, *skill* merupakan komponen tingkah laku. Namun demikian bahwa skill juga merupakan bagian dari kognitif. Dengan demikian bahwa perkembangan kapasitas berpikir tentang suatu situasi praktek seperti memanfaatkan “*broad knowledge base*” serta memilih aspek-aspek yang sesuai dengan situasi tersebut, menentukan nilai-nilai yang relevan.³⁸

³⁸ Louise C. Johnson, *Praktek Pekerjaan Sosial Suatu Pendekatan Generalist*. terj. Abas Basuni, dkk, (Bandung: STKS Bandung, 2001), hlm, 26.

Max Siporin mendefinisikan pengetahuan adalah *cognitive mental Content* (ide dan keyakinan) berkaitan dengan realita yang kita sukai menjadi benar (merasa dengan kepastian, berdasarkan fakta-fakta yang memadai) atau yang kita tentukan dapat diperkuat dan mempunyai suatu kemungkinan kebenaran yang tinggi.³⁹

Pekerjaan sosial adalah disiplin ilmu yang interdisiplin dan juga transdisiplin, dan mengacu pada teori dan penelitian ilmiah yang luas. “Sains” dipahami pada konteks ini dalam bentuk yang paling dasar sebagai “pengetahuan”. Pekerjaan sosial mengacu pada perkembangan teori dasar dan penelitian yang terus berkembang, seperti juga teori-teori dari sains-sains tentang manusia, termasuk tapi tidak terbatas pada pengembangan masyarakat, pedagogi sosial, administrasi, antropologi, ekologi, ekonomi, pendidikan, management, keperawatan, psikiatri, psikologi, kesehatan masyarakat dan sosiologi.⁴⁰ Keunikan penelitian dan teori pekerjaan sosial adalah bahwa mereka adalah aplikatif dan emansipatoris. Kebanyakan penelitian dan teori pekerjaan sosial di konstruksikan dengan para pengguna layanan secara interaktif melalui proses dialog sehingga selalu dipengaruhi oleh lingkungan praktik tertentu. Hal ini bisa dilihat pada bagan keterkaitan pengetahuan pekerja sosial dengan praktik-praktik ilmu lainnya.

³⁹ *Ibid.*, hlm, 27.

⁴⁰ Karla Krogsrud Miley, Michael O’Melia dan Brenda Dubois, *Generalist Social work practice an empowering approach*, (Pearson Education, Inc. 2004), hlm, 26.

Kontribusi disiplin ilmu Pengetahuan Pekerja Sosial (*Disciplines Contributing to social Work Knowledge*)⁴¹

Tabel.1.
Disiplin Ilmu Pengetahuan Pekerjaan Sosial

Discipline	Research Domains
Antropologi (<i>Anthropology</i>)	Budaya dan Nilai-nilai (<i>Culture and values</i>) persilangan budaya (<i>Cross-Cultural sensitivity</i>) Ilmu Bahasa (<i>Linguistics</i>)
Ilmu Biologi (<i>Biological Science</i>)	Kesehatan dan Kesejahteraan (<i>Health and wellnes</i>) Penyakit (<i>Illness</i>) Ketergantungan Obat (<i>Chemical dependenc</i>) Perkembangan Fisik, Penuaan dan Kematian (<i>Physical development, aging and death</i>) Ekologi (<i>Ecology</i>) Genetika (<i>Genetics</i>) Nutrisi (<i>Nutrition</i>) Lingkungan (<i>Physical environment</i>)
Ekonomi (<i>Economics</i>)	Distribusi Barang dan Jasa (<i>Distribution of goods and services</i>) Kapitalisme (<i>Capitalism</i>) Sosialisme (<i>Socialism</i>) Keuangan Internasional (<i>International finance</i>) Tenaga kerja dan perdagangan (<i>Labor and trade</i>) Konsumerisme (<i>Consumerism</i>) Ekonomi Kesejahteraan (<i>Welfare economics</i>) Teori Kerja (<i>Employment theories</i>) Kebijakan Fisikal Pemerintah (<i>Governmental fiscal policies</i>)
Psikologi (<i>Psychology</i>)	dinamika Kepribadian (<i>Personality dynamics</i>) Peran Gender (<i>Gender roles</i>) Masalah Pembangunan (<i>Development issue</i>)

⁴¹ *Ibid*, hlm, 26

	Pemecahan Masalah (<i>Problem solving</i>) Persepsi (<i>Perception</i>) Pengetahuan (<i>Learning</i>) Ingatan (<i>Memory</i>) Hubungan Interpersonal (<i>Interpersonal relationship</i>)
Sosiologi (<i>Sociology</i>)	Struktur dan fungsi kelompok, organisasi dan masyarakat (<i>Structure and function of groups, organizations and society</i>) Perilaku Kelompok Kecil (<i>Small group behavior</i>) Kepuasan Sosial (<i>Social stratification</i>) Diskriminasi (<i>Discrimination and the "isms"</i>) Defiansi (<i>Deviance</i>) Terori Peran (<i>Role theory</i>) Demografi (<i>Demographics</i>) Teori Perubahan Sosial (<i>Social change theory</i>) Dinamika Keluarga (<i>Family dynamics</i>)

(Sumber: Karla Krogsrud Miley, Michael O'Melia dan Brenda Dubois, Generalist Social work practice an empowering approach)

Menurut pendapat Kahn, pengetahuan adalah pemahaman teoritis ataupun praktis yang terkait dengan cabang ilmu pengetahuan (*science*); belajar dan seni yang melibatkan penelitian maupun praktek serta pengembangan keterampilan. Sedangkan Allen Pincus dan Anne melihat pengetahuan sebagai pemahaman yang dihasilkan dari suatu proses observasi secara ilmiah, sehingga hasilnya telah diverifikasi terlebih dahulu, serta telah diverifikasi oleh mereka yang menguji keabsahan dari hasil observasi tersebut.⁴²

⁴² Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) suatu Pengantar*, (Jakarta, PT RajaGrafindo, 2013), hlm, 77-78.

Definisi yang diajukan ini mengakui bahwa pekerjaan sosial dipengaruhi tidak saja oleh lingkungan praktik tertentu dan teori-teori Barat saja, tapi juga oleh pengetahuan-pengetahuan lokal. Bagian dari warisan kolonialisme ialah bahwa pengetahuan dan teori Barat telah dinilai lebih, dan pengetahuan lokal tidak dianggap penting, dan dihegemoni oleh teori-teori dan pengetahuan-pengetahuan barat. Definisi yang diberikan mencoba untuk menahan dan membalikkan proses tersebut dengan mengakui bahwa orang-orang lokal di setiap wilayah atau Negara memiliki nilai, cara pengetahuan, cara menyebarkan pengetahuan mereka masing-masing, dan telah memberikan kontribusi berharga untuk sains. Pekerjaan sosial mencoba untuk memperbaiki sejarah kolonialisme ilmu pengetahuan Barat dan hegemoninya dengan cara mendengarkan dan belajar dari para penduduk lokal di seluruh dunia. Dengan cara ini, pengetahuan pekerjaan sosial akan dapat diciptakan kembali dan diketahui oleh para penduduk lokal, dan dipraktikkan secara lebih tepat tidak hanya di lingkungan lokal saja, tetapi juga secara internasional.⁴³

B. Landasan Pengetahuan Pekerjaan Sosial

Landasan pengetahuan menjadi sangat penting bagi seorang pekerja sosial ketika melakukan pekerjaan di tengah-tengah masyarakat nantinya. Adapun landasan yang harus diketahui oleh pekerja sosial yaitu sebagai berikut :

⁴³ Abdul Najib, *Integrasi Pekerjaan Sosial, Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat: Tinjauan Aksi Sosial Menuju Pembangunan dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Semesta Ilmu, 20016), hlm, 88.

- a. *Landasan Pengetahuan Budaya*, pendidikan bagi praktek pekerjaan sosial professional adalah berbasis universitas dan meliputi serangkaian pengetahuan budaya yang luas. Suatu latar belakang dari berbagai ilmu-ilmu sains, seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, politik dan sejarah.
- b. *Filsafat dan sejarah pekerjaan sosial*. Landasan filsafat dan sejarah pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial membentuk kekuatan profesi. Para pekerja sosial harus memahami kecenderungan dalam praktek kontemporer di dalam konteks sejarah praktek pekerjaan sosial.
- c. *Bidang-bidang praktek*. Walaupun para pekerja sosial berpraktek di dalam setting-setting tertentu, mereka harus memiliki suatu pemahaman yang komprehensif tentang semua bidang utama praktek pekerjaan sosial-sektor-sektor kesejahteraan sosial publik dan privat seperti pemeliharaan pendapatan, pelayanan keluarga dan anak, dll.
- d. *Konstruk teoritik dan model-model praktek*. Landasan pengetahuan formal pekerjaan sosial meliputi teori-teori tentang perilaku manusia dan lingkungan sosial serta tentang metode-metode dan model-model praktek
- e. *Perundang-undangan dan kebijakan sosial*. Sejumlah besar program pelayanan kesehatan dan kemanusiaan berasal dari mandate undang-undang pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu pekerja sosial harus memahami penyelenggaraan Undang-Undang Jaminan Sosial 1935 dan amandemennya serta perundang-undangan kesejahteraan sosial

tentang perumahan, transportasi, kesehatan jiwa, kecacatan, kesehatan, kesejahteraan anak dan perawatan kesehatan.

- f. *Pengaruh-pengaruh budaya*. Untuk mempersiapkan praktek yang sensitif secara etnis, para pekerja sosial harus memahami dampak budaya terhadap perilaku manusia. Mereka harus menyadari bahwa dinamika keberagaman etnis, sosial, dan budaya harus dipertimbangkan dengan cara-cara yang khas karena manusia menghadapi sedemikian banyak tantangan dalam kehidupan mereka.
- g. *Penelitian*. Hasil-hasil penelitian memberikan pemahaman kepada pekerja sosial tentang kebutuhan-kebutuhan, keberfungsian sosial, dan proses-proses adaptasi manusia. Selain itu pengetahuan tentang metode-metode penelitian adalah suatu prasyarat untuk mengevaluasi efektifitas metode-metode dan program-program praktek.
- h. *Pengetahuan tentang diri*. Untuk berfungsi secara efektif sebagai orang profesional, para pekerja sosial harus mengenal diri mereka sendiri. Dengan demikian para pekerja sosial menjajaki gaya hidup mereka sendiri, perspektif etis, kode moral, nilai-nilai, dan latar belakang budaya.⁴⁴

⁴⁴ Juda Damanik, *Pekerjaan Sosial Untuk SMK*, (Jakarta : Direktorat Pembina SMK, 2008), hlm, 52-54.

C. Teori-Teori dalam Pekerjaan Sosial

a. Teori Sistem

Sistem merupakan suatu kerangka yang terdiri dari beberapa elemen/sub sistem yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Teori sistem adalah suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-sub sistem dengan sistem sebagai suatu unit yang bisa saja berupa suatu masyarakat, serikat buruh, dan organisasi pemerintah.⁴⁵ Apabila suatu sub sistem tidak berfungsi, maka sistem tidak akan berjalan maksimal atau bahkan tidak berjalan.⁴⁶ Intinya, setiap bagian berpengaruh terhadap keseluruhan atau sesuatu tidak dapat ada tanpa keberadaan yang lain. Contoh dari sistem sosial adalah keluarga, di mana anggota-anggota di dalam keluarga disebut sebagai sub sistem atau bagian dari sistem. Dalam pekerjaan sosial makro, kita mengenal masyarakat sebagai suatu sistem.

b. Teori Ekologi

Teori ini menekankan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan. Ada lima sistem dalam teori ini, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Mikrosistem merupakan tempat di mana seseorang hidup, misalnya mikrosistem seorang anak meliputi keluarga, guru, teman sebaya, dan lain-lainnya yang sering ditemui anak. Dalam mikrosistem, terjadinya interaksi, misalnya anak

⁴⁵ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm, 34.

⁴⁶ Tatang Amiri, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm, 2-5.

dengan orang tua, anak dengan guru, dan sebagainya. Dalam sistem ini, seseorang dipandang membantu membangun setting. Sistem berikutnya adalah mesosistem, yang merupakan hubungan antara beberapa mikrosistem, misalnya hubungan antara orang tua dengan guru, teman dengan guru, dan sebagainya. Dalam ekosistem, seseorang tidak memiliki peran aktif, melainkan terpengaruh oleh berbagai sistem, misalnya pekerjaan orang tua mempengaruhi hubungan antara suami istri dan anaknya. Kemudian makrosistem membicarakan tentang budaya, gaya hidup, dan masyarakat di mana seseorang berada, dan mempengaruhi seseorang. Dan yang terakhir, kronosistem meliputi pemolaan peristiwa-peristiwa sepanjang kehidupan, misalnya mempelajari dampak negatif terhadap perceraian terhadap anak-anak, dan lain sebagainya. Teori ini pada intinya menjelaskan mengenai perilaku manusia sesuai dengan lingkungan dan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terjadi dalam berbagai level dan fungsinya.⁴⁷

c. Teori Kritis

Teori ini membahas tentang emansipasi dan penindasan. Tujuan daripada teori ini adalah untuk menghilangkan segala bentuk dominasi dan penindasan, serta mendorong adanya kebebasan dan keadilan. Teori ini mempertanyakan sebab-sebab yang mengakibatkan penyelewengan-penyelewengan dalam masyarakat. Struktur masyarakat yang rapuh harus

⁴⁷ Soedjiran Resosoedarmo, dkk. *Pengantar Ekologi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm, 1-7.

diubah. Intinya, teori kritis ini memberikan kesadaran untuk membebaskan manusia dari irasionalisme atau ketidakmasukakalan. Teori kritis berupaya untuk mengidentifikasi kemungkinan perubahan sosial, sekaligus mempromosikan bentuk refleksi diri dan masyarakat yang bebas dari dominasi. Teori ini erat kaitannya dengan teori konflik, di mana adanya pihak yang mendominasi dan yang didominasi. Teori ini juga berkaitan dengan teori feminis, di mana adanya pihak tertindas, seperti penindasan kaum wanita oleh kaum pria dalam kedudukan sosial ekonomi.⁴⁸

⁴⁸ Thomas McChathy, *Etika Sosial Teori*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006) terj. hlm, 26.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta

Pergeseran paradigma pelayanan dan rehabilitasi sosial dari bentuk belas kasihan (*charity*) kepada upaya pemenuhan hak-hak dasar, mengandung pengertian bahwa pelayanan dan rehabilitasi sosial diselenggarakan dalam rangka pemenuhan Hak Azasi Manusia (HAM) bagi setiap warga Negara, termasuk penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah (Perda) DIY nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengamanatkan untuk memperhatikan aspek pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal dan aksesibilitas, dengan demikian menjadi kewajiban setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan kebutuhan penyandang disabilitas.⁴⁸

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta selaku instansi di bidang sosial memiliki tugas dan kewajiban dalam pemenuhan hak dari aspek sosial. Pemenuhan tersebut dijabarkan dalam pemberian kesempatan penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan

⁴⁸ Perda DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam www.bphn.go.id/data/documents/perda4-2012.pdf

sosial dan perlindungan sosial melalui Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta dengan memberikan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial, rehabilitasi medic, bimbingan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif.

Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas dibangun diatas lahan seluas 1.8 ha yang merupakan milik Sri Sultan Hamengkubuwono Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Lahan ini merupakan bekas persawahan, lapangan, dan pabrik gula, setelah pabrik tersebut tidak beroperasi dibangunlah tempat rehabilitasi untuk kaum disabilitas.⁴⁹

Pada awal mulanya Balai Rehabilitasi terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta berdiri dengan nama Pusat Rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat (PRTPC) yang di resmikan pada tanggal 27 Mei 2009. Pertama berdirinya sebagai bentuk penanganan korban gempa yang terjadi di Yogyakarta 27 Mei 2006. Gempa tersebut menyebabkan banyak korban mengalami sakit dan cacat permanen dari yang ringan sampai cacat berat. Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang mengalami kerusakan paling parah sehingga tidak heran kalau banyak kkorban di wilayah tersebut, oleh sebab itu, dibangun Pusat Rehabilitasi Terepadu Penyandang Cacat (PRTPC) yang di tempatkan di Bantul, tepatnya di Pundong termasuk dalam lingkaran pusat gempa. Seiring dengan berjalannya waktu kini warga binaan korban gempa

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Pak Dicky, Pekerja Sosial PNS BRTPD Pada Tanggal 17 Januari 2017

sudah banyak yang lulus menjalani rehabilitasi sehingga kini tinggal beberapa orang saja yang masih di bina dalam panti.⁵⁰

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) dahulunya terbagi menjadi dua unit, yaitu di Pundong itu sendiri dan di Sewon yang bernama Panti Sosial Bina Netra (PSBN). Panti Sosial Bina Netra merupakan panti yang khusus menangani tunanetra, akan tetapi pada tahun 2011 panti Sosial Bina Netra (PSBN) digabung ke Pundong sehingga sekarang menjadi satu unit dengan nama Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD). Alasan penggabungan ini dikarenakan oleh Dinas Sosial Yogyakarta tidak boleh ada lebih dari 7 panti di Yogyakarta. Saat ini 7 panti tersebut adalah Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta, Panti Sosial Tresna Werda, Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, Panti Sosial Karya Wanita, Panti Sosial Bina Karya, Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta, dan Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.⁵¹

B. Letak Geografis Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta terletak di wilayah pedesaan yaitu Dusun Piring, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul Propinsi D.I Yogyakarta. BRTPD ini menempati area seluas 3,8 hektar dengan luas bangunan 15.000 m² dilengkapi

⁵⁰ *Ibid.*, Wawancara 17 January 2017

⁵¹ Dokumentasi Sejarah Berdiri BRTPD Yogyakarta

dengan asrama, taman, ruang terapi, ruang keterampilan, ruang teori, peralatan kesehatan, olahraga dan lain-lainnya.

Suasana di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) sejuk, tenang, dan nyaman dikarenakan letaknya yang berada di tengah pedesaan. Proses pendidikan dan pembinaan pun menjadi lebih kondusif, disamping itu lokasinya juga mudah dijangkau dan strategis.

Adapun lokasi BRTPD adalah Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Bodowalur, Sebelah selatan berbatasan dengan sawah dan dusun Piring, Sebelah barat berbatasan dengan dusun piring, Sebelah timur bebrbatasan dengan SMA N 1 pundong.

Memasuki kantor Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, sekilas seperti masuk di rumah sakit, lorong-lorong untuk jalan yang luas karena memang didisain dan bangunan diperuntukkan khusus kaum difabel. Taman yang di tanami pohon dan bunga menambah kesejukan di siang hari sehingga udara begitu segar seperti di pegunungan, terasa damai jauh dari hiruk pikuk kesibukkan kota.⁵²

⁵² Hasil Observasi di BRTPD Pada Tanggal 12 Januari 2017

C. Visi dan Misi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta (BRTPD)

Balai rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta memiliki visi dan misi sesuai dengan dasar dan tujuan lembaga itu didirikan.

Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut

a. Visi ⁵³

Pusat perlindungan, pelayanan, rehabilitasi sosial dan medis bagi penyandang disabilitas yang kreatif, inovatif dan professional.

b. Misi ⁵⁴

- 1) Penyelenggaraan perlindungan, pelayanan, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, keterampilan bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa, rungu, wicara, dan wedha disabilitas.
- 2) Peningkatan professional SDM penyelenggara pelayanan.
- 3) Pengembangan mutu, metode, model dan standar layanan rehabilitasi.
- 4) Memperluas rujukan baik pada tahap sebelum rehabilitasi, selama proses rehabilitasi maupun setelah rehabilitasi.
- 5) Menjadi pusat penelitian dan pengembangan bagi tenaga Kesejahteraan Sosial Pegawai (TKSP) maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM). ⁵⁵

⁵³ Spanduk yang dipajang di kantor Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta 2017

⁵⁴ *Ibid.*, Spanduk BRTPD 2017

⁵⁵ Brosur Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta 2017

D. Dasar Hukum Pelaksanaan Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta

Dasar hukum pendirian dan pelaksanaan Balai rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta adalah sebagai berikut :⁵⁶

1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
6. Perda D.I. Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Perda DIY Hak-hak Penyandang Disabilitas.
8. Pergub D.I. Yogyakarta Nomor 40 tahun 2010 tentang perubahan Atas Pergub D.I. Yogyakarta No. 36 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit pelaksanaan teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm, 2.

9. Pergub D.I. Yogyakarta nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Pergub D.I. Yogyakarta No. 46 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan UPT pada Dinas Sosial.

E. Tujuan, Tugas dan Fungsi Balai rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta ⁵⁷

1. Tujuan

Menumbuhkan rasa percaya diri, harga diri dan pengembangan potensi penyandang disabilitas sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dan mandiri dalam tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat.

2. Tugas

Melaksanakan perlindungan, pelayanan, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medic bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa, rungu wicara dan wredha dengan kecacatan.

3. Fungsi

- a. Penyusunan program balai
- b. Penyusunan pedoman operasional
- c. Pengembangan mutu layanan rehabilitasi sosial dan medis
- d. Identifikasi, seleksi dan penilaian (assessment)
- e. Penyelenggaraan perlindungan, pelayanan, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

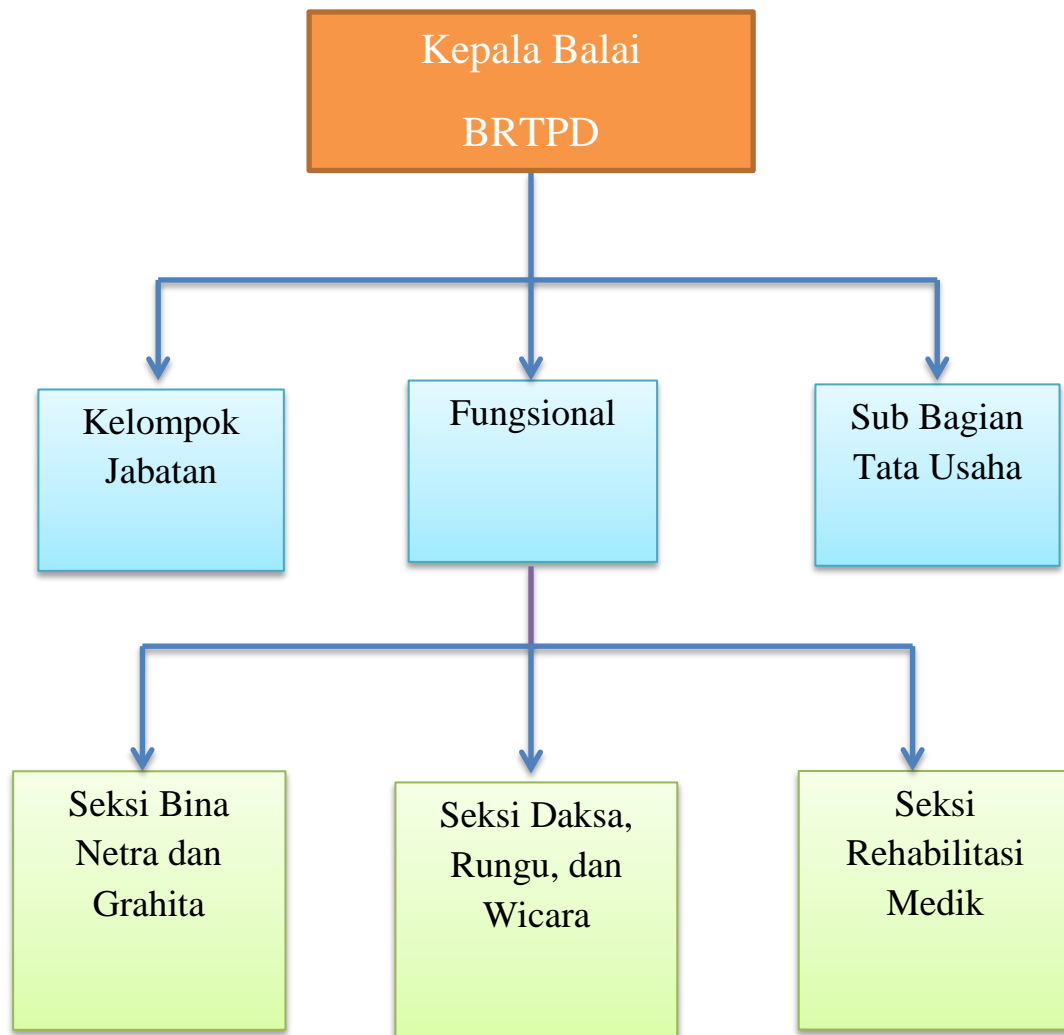
⁵⁷ *Ibid.*, hlm, 3.

- f. Penyelenggaraan rujukan bagi penyandang disabilitas sebelum, selama dan sesudah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
- g. Pelaksanaan kemitraan dengan instansi / lembaga lainnya
- h. Fasilitasi pemberdayaan penyandang disabilitas netra, grahita, daksa, rungu dan wicara dalam kehidupan bermasyarakat.
- i. Pelayanan konsultasi, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program balai
- k. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

F. Struktur Organisasi dan Personalia Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta

1. Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta.

Bagan.1.
Struktur Kepengurusan BRTPD



(Sumber: Pergub DIY No. 40 Tahun 2010)

Berikut penjelasan mengenai struktur organisasi di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta.

2. Sub Bagian Tata Usaha. Sub bagian tata usaha ini mempunyai tugas dan fungsi tersendiri, diantaranya: ⁵⁸
 - a. Melaksanakan pengelolaan keuangan.
 - b. Menangani dan penyelenggara kepegawaian, kehumasan, barang kearsipan dan lain-lain.
 - c. Penyusunan program balai dan laporan kinerja balai.
 - d. Pengelolaan kepustakaan.
 - e. Pelayanan informasi.
3. Seksi Bina Netra dan Grahita. Seksi bina netra dan grahita mempunyai tugas yang berhubungan dengan netra dan grahita, diantaranya.
 - a. Penyusunan program.
 - b. Memberikan pelayanan dan perlindungan mengenai disabilitas netra dan grahita.
 - c. Assessment disabilitas netra dan grahita.
 - d. Penyelenggara perlindungan rehabilitasi netra dan grahita.
 - e. Penyelenggaraan rujukan, sebelum, selama dan sesudah rehabilitasi.
 - f. Memberikan dukungan pemberdayaan terhadap disabilitas netra dan grahita.
 - g. Tempat untuk berkonsultasi.
 - h. Pengelolaan data rehabilitasi netra dan grahita.
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan rehabilitasi netra dan grahita.

⁵⁸ Dokumentasi job description staff Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) 2017

4. Seksi Bina Daksa, Rungu, dan Wicara. Seksi bina daksa, rungu, dan wicara mempunyai tugas yang berhubungan dengan daksa, rungu dan wicara, diantaranya.
 - a. Penyusunan program kegiatan disabilitas daksa, rungu, dan wicara
 - b. Memberikan pelayanan dan perlindungan mengenai disabilitas daksa, rungu dan wicara
 - c. Assessment disabilitas daksa, rungu, dan wicara
 - d. Penyelenggara perlindungan rehabilitasi daksa, rungu dan wicara
 - e. Penyelenggaraan rujukan, sebelum, selama dan sesudah rehabilitasi
 - f. Memberikan dukungan pemberdayaan terhadap disabilitas daksa, rungu, dan wicara
 - g. Tempat untuk bekonsultasi
 - h. Pengelolaan data rehabilitasi daksa, rungu, dan wicara
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan rehabilitasi daksa, rungu dan wicara.
5. Seksi Rehabilitasi Medik
 - a. Penyusunan program rehabilitasi medik
 - b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman operasional
 - c. Penyiapan bahan pengembangan mutu pelayanan
 - d. Penyelenggara pelayanan rehabilitasi medis
 - e. Penyelenggara rujukan rehabilitasi medis
 - f. Pengelolaan obat, perlengkapan, dan peralatan medis
 - g. Pengelolaan data rehabilitasi medis
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan rehabilitasi medis.

G. Personalia Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

Sumber daya manusia yang mendukung terselenggaranya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta meliputi pegawai negeri sipil yang bekerja sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Adapun sumber daya manusia di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) sebagai berikut.⁵⁹

Tabel.2.
Personalia Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)
Yogyakarta

No	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	PNS	26 Orang
	Eselon III	1 Orang
	Eselon IV	4 Orang
	Fungsional : Pekerja Sosial	4 Orang
	Perawat/Paramedis	8 Orang
	Fungsional umum	9 Orang
2	NON PNS	69 Orang
	Pendamping	15 Orang
	Fisioterapi	1 Orang
	Psikolog	1 Orang
	Paramedic / Perawat	4 Orang
	Pramurukti	6 Orang
	Security	18 Orang
	Teknisi	8 Orang
	Customer Service	3 Orang
	Juru Kebun	7 Orang
	Juru masak	6 Orang

(Sumber: Dokumentasi BRTPD 2017)

⁵⁹ Dinas Sosial Propinsi D.I Yogyakarta, *Pedoman Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Korban Penyalahgunaan Napza* (Yogyakarta: Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra “Sehat Mandiri”), hlm. 16.

H. Program Kegiatan Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta.⁶⁰

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta dalam memberdayakan para penyandang disabilitas mempunyai beberapa program kegiatan yaitu dengan melalui bimbingan rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut diantaranya sebagai berikut.⁶¹

1. Rehabilitasi Sosial

Dalam rehhabilitasi sosial terdapat beberapa kegiatan, yaitu pembinaan, fisik, bimbingan mental sosial, spiritual, dan psikologis, serta *Active Day Living* (ADL).

a. Pembinaan fisik

Pembinaan fisik yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) berupa kegiatan olahraga yang diikuti oleh semua warga binaan di Balai Rehabilitasi. Warga binaan meliputi difabel daksa, rungu wicara, netra dan werda dengan kecacatan. Semua warga binaan mengikuti olahraga pada waktu yang sama yaitu seminggu dua kali.

⁶⁰ Dinas Sosial Propinsi D.I Yogyakarta, *Pedoman Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas* (Yogyakarta: Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas), hlm. 18.

Tujuan dari kegiatan olahraga ini adalah untuk menjaga kesehatan warga binaan di Balai Rehabilitasi Terpadu penyandang Disabilitas (BRTPD).

b. Bimbingan mental sosial

Bimbingan mental sosial, spiritual, bagi para Difabel di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas harus sesuai dengan kemampuan para difabel dalam menuangkan kemampuan mereka seperti bimbingan agama, bimbingan kesenian, bimbingan sosial masyarakat, bimbingan kesehatan, bimbingan kerawitan, bimbingan bahasa isyarat, biimbingan bahasa inggris, bimbingan baca huruf latin, bimbingan home industry dan bimbingan kerajinan tangan. Bimbingan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan seperti bimbingan bahasa isyarat, bahasa inggris dan bimbingan baca tulis. Dari semua bimbingan diatas diiharapkan warga binaan mampu bersaing dengan masyarakat luar ketika mereka kembali ke masyarakat.

c. Activity day living (ADL)

Activity day Living (ADL) merupakan kegiatan bimbingan aktivitas kehidupan sehari hari yang dilakukan oleh orang normal pada umumnya. Tujuannya adalah agar warga binaan bisa mandiri dalam melakukan segala aktivitasnya sehari-hari. Biasanya dalam bimbingan ini warga binaan dilatih untuk memasak, menyalakan kompor, mencuci dan lain sebagainya.

2. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis yang dilakukan di Balai Rehabiliatsi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) mempunyai tujuan untuk mengurus kesehatan warga binaan. Perlakuan khusus dan penanganannya tergantung kondisi fisik warga binaan yang sakit. Upaya yang dilakukan untuk melatih gerak anggota tubuh agar dimaksimalkan sehingga klien yang mempunyai kecacatan mampu menggerakkan tubuhnya selain itu mereka dibantu dengan memberikan alat bantu untuk bergerak.

3. Bimbingan keterampilan

Bagi difabel daksa dan rungu wicara terdapat enam macam pelatihan keterampilan yaitu design grafis, computer, elektronika, kerajinan perak, kerajinan kulit, dan menjahit. Bagi difabel netra adalah keterampilan massage (sport, sixte, shiatsu). Sedangkan bagi difabel grahita diberikan keterampilan membordir.

Dalam kegiatan bimbingan keterampilan, difabel daksa digabung dengan difabel rungu wicara, pembagian kelas berdasarkan keterampilan yang diikutinya.

I. Fasilitas Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta

Fasilitas merupakan persyaratan penting yang diperlukan bagi suatu instansi di dalam menjalankan proses pelayanan prima bagi klien. Sebagai pelaksana fungsi pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, maka Balai

Rehabilitasi terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana. Untuk mendukung kegiatan pelayanan terapi dan rehabilitasi sosial terpadu, DRTPD dilengkapi fasilitas berupa :⁶²

Tabel.3.
Fasilitas Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)
Yogyakarta

No	Fasilitas	Jumlah
1	Kantor	
	Ruang Kepala	1 unit
	Ruang Sub Bagian TU	1 unit
	Ruang Seksi Rehab Medik	1 unit
	Ruang Seksi Bina Netra dan Grahita	1 unit
	Ruang Seksi Bina Daksa, Rungu dan Wicara	1 unit
	Ruang Pekerja Sosial	1 unit
2	Asrama (<i>Residental</i>)	
	Daksa, rungu dan Wicara	36 kamar/120 orang
	Grahita dan Netra	12 kamar/50 orang
	Wredha Disabilitas	5 cottage/15 orang
3	Ruang Rapat	1 unit
4	Ruang Keterampilan	8 Lokal
5	Ruang Teori	8 lokal
6	Ruang Makan	1 unit
7	Poliklinik	1 unit
8	Ruang Fisioterapi	2 lokal
9	Ruang fitness (gym))	1 unit
10	Ruang Genzet	1 unit
11	Musholla	1 unit
12	Ambulance	2 buah
13	Ruang musik beserta peralatnnya (modern dan tradisional)	1 lokal
14	Ruang olahraga in door (peralatan fitness standar)	1 lokal
15	Areal perkebunan	1 unit
16	Lapangan	1
17	Kendaraan roda 2	4 unit
18	Kendaraan roda 4	2 unit

⁶² *Ibid.*, 15.

19	Rumah petugas	3 unit
20	Sumber air bersih	Sumur & PDAM

(Sumber: Dokumentasi BRTPD 2017)

J. Jumlah Klien Binaan

Jumlah klien binaan Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) ada 111 klien binaan yang berasal dari daerah yang berbeda-beda di Provinsi DIY seperti Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Kulonprogo. Berikut dijabarkan dalam tabel.

Tabel.4.
Jumlah klien binaan di BRTPD

No	Daerah Asal	Laki-laki	Pr	Jenis Cacat				Jumlah
				Daksa	Ruwi	Netra	Grahita	
1	Gunung Kidul	13	9	8	7	8	-	22
2	Kulonprogo	5	8	5	2	5	1	13
3	Bantul	16	26	14	9	8	12	45
4	Sleman	11	7	6	3	5	3	16
Jumlah		45	50	33	21	26	16	96

(Sumber: Dokumentasi BRTPD 2017)

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) juga menerima dan membina lansia disabilitas yang tidak terurus oleh keluarganya dan mereka juga tidak terlepas dari bimbingan dan pembinaan keterampilan yang diterapkan di BRTPD sehingga para disabilitas memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan disabilitas lainnya. Selain itu disabilitas lansia di BRTPD diberikan hak penuh untuk tinggal lama di BRTPD hingga mereka

meninggal. Keputusan itu diambil karena mereka sudah tidak ada lagi keluarga yang mengurus dan dibiarkan terlantar sehingga BRTPD tidak membiarkan klien binaan lansia disabilitasnya untuk kembali dengan keluarganya atau kembali di tengah-tengah masyarakat.

K. Prosedur Rujukan dan Persyaratan masuk di Balai Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas.⁶³

Balai Rehabilitasi terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta di dalam penerimaan klien menerapkan prosedur dan persyaratan sebagai berikut:

1. Prosedur Penerimaan
 - a. Langsung ke BRTPD
 - b. Rujukan dari Dinas Sosial Kab/Kota, Lembaga/Organisasi Sosial
2. Persyaratan
 - a. Penyandang disabilitas (netra, grahita, daksa, rungu wicara dan werdha dengan kecacatan)
 - b. Mampu di didik dan mampu di latih
 - c. Di utamakan belum menikah
 - d. Usia 18 s/d 45 tahun dan 60 tahun untuk werdha dengan kecacatan
 - e. Tidak cacat ganda
 - f. Sanggup diasramakan
 - g. Sanggup mematuhi pertauran yang ada di BRTPD

⁶³ Brosure Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta, hlm, 3.

- h. Adanya surat pengantar bagi calon wali bersangkutan yang dirujuk disertai catatan hasil pembahasan kasus
- i. Ada penanggung jawab/wali

L. Proses Pelayanan Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta ⁶⁴

1. Pendekatan Awal
 - a. Identifikasi
 - b. Motivasi dan seleksi
2. Penerimaan
 - a. Registrasi
 - b. Pengasramaan
 - c. Assessment
 - d. Penempatan dalam program
3. Pelayanan dan Rehabilitasi
 - a. Rehabilitasi Medik
 - 1) Layanan Kesehatan Dasar
 - 2) Fisioterapi
 - 3) Speechtherapi dan Hidrotherapi
 - b. Rehabilitasi Sosial
 - 1) Bimbingan Fisik
 - Pemenuhan kebutuhan dasar (sandang dan pangan)

⁶⁴ *Ibid.*, hlm, 3.

- Bimbingan Olahraga

2) Bimbingan Sosial

- Bimbingan kemasyarakatan
- Bimbingan keagamaan
- Bimbingan orientasi dan mobilitas
- Bimbingan tentang aktifitas keseharian / ADL
- Bimbingan kedisiplinan

c. Bimbingan Keterampilan

- 1) Massage (sport, sixte, shiatsu)
- 2) Design Grafis
- 3) Komputer
- 4) Elektronika
- 5) Kerajinan Kulit
- 6) Kerajinan Perak
- 7) Menjahit
- 8) Payet dan Bordir

4. Resosialisasi

- a. Praktek Belajar Keja

5. Pembinaan lanjut

- a. Peningkatan kehidupan bermasyarakat
- b. Bimbingan pemantapan dan pengembangan usaha
- c. Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP)

6. Terminasi

M. Tahapan–Tahapan Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi

Klien yang berada di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta harus melalui beberapa tahapan pelayanan rehabilitasi sosial. Tahapan tersebut mulai dari pendekatan kepada klien sampai pada mengembalikan residen kepada keluarganya. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Tahapan Pendekatan

Dalam tahapan pertama BRTPD sebagai penghubung yaitu menghubungkan pekerja sosial dengan difabel untuk memberikan motivasi agar difabel tersebut bersedia mengikuti proses rehabilitasi sehingga difabel tersebut mendapatkan keterampilan dan bimbingan sosial.

2. Tahapan Penerimaan

Pada tahap ini yaitu proses penerimaan di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas ada dua tahapan yaitu dari pendamping dan pekerja sosial. Penerimaan ini melalui registrasi, asesmen dan penempatan dalam program kegiatan yang akan dilakukan oleh difabel.

3. Tahapan Rehabilitasi

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Dicki Pekerja Sosial, di BRTPD Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2017.

Bimbingan rehabilitasi adalah bimbingan inti dari proses pelayanan rehabilitasi. Melalui bimbingan ini, pembentukan perilaku sosial difabel dapat dilakukan.

a. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial merupakan proses rehabilitasi yang utama. Pada tahap ini difabel dilatih untuk percaya diri dengan kegiatan morning meeting yang dilakukan rutin setiap paginya. Kegiatan ini untuk melatih mental difabel agar lebih percaya diri dan pemberani untuk tampil di depan orang banyak.

b. Rehabilitasi medik

Dalam rehabilitasi medik meliputi pelayanan klinik dan fisioterapi. Layanan ini diberikan untuk difabel grahita. Difabel grahita lebih sering melakukan pengobatan ketika sakit atau pun terapi di ruang fisioterapi bila mengalami keluhan pada tubuhnya.

c. Bimbingan keterampilan.

Dalam bimbingan keterampilan BRTPD berperan sebagai pendidik dan perantara yaitu dengan memberikan pendidikan keterampilan dan bimbingan. Setiap difabel memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga pembinaan pun disesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki.

4. Resoliasi

Dalam tahapan resoliasi difabel melakukan praktek kerja lapangan seperti magang atau Praktek Belajar Kerja (PBK). Magang bertujuan untuk melatih kemandirian dan mengembangkan ilmu yang telah didapat selama di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

5. Pembinaan Lanjut

Pembinaan ini diberikan untuk difabel grahita yang sudah lulus dari Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas dengan memberikan beibimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat yang dimana difabel grahita dapat bersosialisasi di masyarakat dengan baik. Bimbingan pengembangan usaha atau peningkatan keterampilan yaitu dengan memberikan pengarahan mengenai kerja yang sesuai dengan kondisi dan keterampilan yang dimiliki selama mengikuti proses rehabilitasi di BRTPD. Selain bimbingan pematangan oleh BRTPD difabel grahita mendapat mesin jahit, computer, dan alat-alat lainnya sesuai keahliannya guna mengembangkan keterampilan yang dimilikinya.

6. Terminasi

Terminasi merupakan tahapan terakhir dalam tahap rehabilitasi. Dalam terminasi ini pekerja sosial melakukan evaluasi dengan melihat perubahan yang terjadi dalam difabel grahita.

N. Indikator Keberhasilan di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta

Indikator keberhasilan di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta, adalah melalui pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai warga binaan, di harapkan ;

1. Memiliki kepercayaan diri.
2. Mampu beradaptasi dengan lingkungan.
3. Mampu melakukan orientasi mobilitas.
4. Mampu melakukan aktivitas/ kegiatan sehari-hari.
5. Memiliki keterampilan sehari-hari.

O. Profil Singkat Pekerja Sosial di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta mempunyai tenaga pekerja sosial sebanyak enam orang yang melaksanakan tugas untuk membantu proses pelayanan kepada klien difabel seperti, rungu, wicara, grahita dan werda. Kelima pekerja sosial tersebut mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda-beda. Namun, semuanya mempunyai semangat dan tujuan yang sama dalam memberikan pelayanan pertolongan kepada klien-klien mereka Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta. Pekerja sosial yang terdapat di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta adalah kiriman dari Dinas Sosial Propinsi DIY.

Profil pekerja sosial yang peneliti maksud di sini adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial (*social work*). Asumsi pekerja sosial professional adalah pada bekal dan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan pekerjaan sosial. Di sinilah peran strategis pendidikan pekerjaan sosial dalam menciptakan pekerjaan sosial profesional.⁶⁶ Secara yuridis, siapa sesungguhnya pekerja sosial professional pada dasarnya telah dituangkan dalam UU no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pekerja sosial professional adalah “seseorang yang bekerja baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.”⁶⁷

Pekerja sosial yang terdapat di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta bukanlah pekerja sosial yang berlatar belakang dari pendidikan ilmu kesejahteraan sosial (IKS) dan (PEKSOS) pekerjaan sosial. Peran pekerja sosial di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta yaitu memediasi segala kebutuhan klien dengan menggunakan beberapa standar yang telah ditetapkan oleh lembaga.

⁶⁶ Edi Suharto dkk, *Pendidikan dan Praktek Pekerjaan Sosial di Indonesia dan Malaysia* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), hlm. 7.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 9

P. Peran Pekerja Sosial di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta ⁶⁸

1. Pekerja Sosial Sebagai Motivator

Pekerja sosial yang ada di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta, perannya adalah memberikan motivasi kepada para difabel yang dari awal masuk ke BRTPD terutama terhadap difabel grahita karena difabel grahita ketika masuk rehabilitasi mereka merasa tidak nyaman, ingin pulang dan *homesick*. Dari sinilah peran pekerja sosial di BRTPD memberikan motivasi kepada para difabel terutama difabel grahita. memotivasi adalah penting terhadap para difabel karena dengan memotivasi difabel merasa percaya diri, kognitif yang lemah dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kehidupan mereka di BRTPD.

2. Pekerja sosial sebagai fasilitator

Pekerja sosial sebagai fasilitator yaitu pekerja sosial yang memfasilitasi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien baik sarana maupun bimbingan yang tepat buat mereka selama mereka di BRTPD. Dengan begitu klien merasa bersemangat mengikuti semua proses kegiatan yang dilakukan di BRTPD karena kebutuhan mereka di penuhi dengan baik.

⁶⁸ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm, 36-44.

3. Pekerja sosial sebagai pendidik (educator)

Pekerja sosial berperan langsung untuk mendidik perilaku klien terutama difabel grahita melalui keterampilan ADL (*Activity of Day Living*) serta mereka dibimbing bagaimana hidup kemasyarakatan, sehingga dari itulah mereka memahami bagaimana kehidupan bermasyarakat.

4. Pekerja sosial sebagai konselor

Pekerja sosial memberikan bimbingan langsung baik secara individu, kelompok maupun keluarga. Difabel grahita biasanya mendatangi pekerja sosial jika mereka menemukan suatu masalah.

5. Pekerja sosial sebagai perantara

Peran pekerja sosial disini adalah bagaimana pekerja sosial melakukan perantaraan antara perusahaan atau lembaga yang bersedia menerima para difabel bekerja atau magang kerja setelah mereka selesai menempuh rehabilitasi dan memiliki bekal ilmu yang mereka dapatkan di BRTPD.

BAB IV

IMPLEMENTASI PENGETAHUAN PEKERJAAN SOSIAL DALAM PRAKTIK PEKERJA SOSIAL

A. Pendahuluan

Pekerja sosial merupakan bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui interaksi agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan. Kekhasan pekerja sosial adalah pemahaman dan keterampilan dalam memanipulasi perilaku manusia sebagai makhluk sosial.

Dalam melaksanakan proses pertolongan kepada klien atau penerima pelayanan, banyak peran pekerja sosial profesional yang harus dilakukan. Beberapa peran tersebut tidak dapat berdiri sendiri, terkadang untuk satu kasus pertolongan seorang pekerja sosial profesional harus menggabungkan beberapa peranan. Fokus utamanya adalah meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) melalui intervensi yang berkesinambungan. Keberfungsian sosial merupakan *resultan* dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat, seperti sistem pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial dan seterusnya.⁶⁹

Wajar bila orang memiliki masalah, mereka mencari bantuan. Biasanya, mereka berpikir mereka tidak memiliki kapasitas untuk memecahkan masalah

⁶⁹ Santoso Tri Harjo, *Dasar Pengetahuan pekerjaan sosial*, (Bandung, Unpad Press, 2015) hlm, 4.

mereka kecuali seseorang membantu mereka untuk melakukannya. Dan bahkan ketika bantuan datang, mereka mengharapkan pembantu untuk menghasilkan keajaiban yang akan memecahkan masalah mereka. Para pekerja sosial harus membuat peran pekerjaan mereka jelas ketika mereka didekati oleh klien. Peran mereka adalah untuk membantu klien untuk mengetahui mengapa mereka membutuhkan bantuan dan di mana mereka bisa mendapatkannya. Profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan, dan pembebasan manusia , serta perbaikan masyarakat.

Untuk menjadi seorang pekerja sosial profesional haruslah memiliki kemampuan keahlian dasar yang terdiri atas: pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Dengan kemampuan tersebut baik yang didapat dari pendidikan formal maupun dari pengalaman-pengalaman praktiknya maka perkerjaan sosial profesional diharapkan dan dituntut untuk mampu memecahkan masalah-masalah sosial.⁷⁰

Sebuah filosofi humanistik memerintahkan bahwa kita harus menghormati setiap manusia karena keunikannya. Keyakinan bahwa martabat atau nilai bawaan manusia sebagai individu tidak akan hilang apabila ditinjau dari segi kekurangannya, atau kegagalan di dalam dirinya. Keyakinan kita tentang nilai intrinsik dari setiap manusia secara bertahap akan memungkinkan kita untuk membuat sebuah prinsip yang menghormati nilai bawaan mereka, dan

⁷⁰ *Ibid.*, hlm, 6.

menjadikan martabat tersebut bagian dari diri kita sendiri, dan juga akan memungkinkan kita untuk mengungkapkannya dalam praktik.⁷¹

Pekerjaan sosial tidak terlepas dari filsafat Moral dan sosial. Ini berkaitan erat dengan keyakinan bahwa pekerja sosial harus memiliki seperangkat nilai-nilai yang mengandung kebenaran sehingga mereka dapat secara moral netral dan dapat lebih mudah bagi orang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.⁷²

Dengan berbekal pengetahuan-pengetahuan pekerja sosial dapat juga memberikan petunjuk pada aksi pekerja sosial dengan klien. Tetapi dalam praktiknya pekerja sosial harus memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pengetahuan yang ada, menggunakan taksiran dalam pemilihan pengetahuan yang akan diterapkan pada situasi tertentu dan membuka pikiran terhadap pengetahuan yang bersifat sementara dan pengetahuan tentang situasi klien.

Selain pengetahuan, nilai juga harus digunakan dalam praktik pekerjaan sosial seperti melalui penghargaan, martabat, hak untuk menentukan diri sendiri, hak terhadap penghargaan, dan pekerja sosial harus konsen dengan nilai masyarakat dan nilai pribadi, nilai klien dan nilai diri sendiri. Hal tersebut dilakukan dengan berbekal kode etik dan teori. Suatu profesi mempunyai kode

⁷¹ Molly R. Hancock, *Principles of Social Work Practice: A Generic Practice Approach*, (Binghamton: The Haworth Press, Inc, 1994), hlm, 27.

⁷² Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm, 36.

etik pengaturan yang mengikat, yang dapat ditegakkan, eksplisit, dan sistematis yang memaksa perilaku etik oleh anggota-anggotanya.⁷³

Dalam artikel *Social Work* yang ditulis oleh Werner W Boehm menjelaskan bahwa Salah satu hal dalam pemahaman pengetahuan pekerjaan sosial didapat dari pengalaman dan praktik langsung dilapangan. Selain itu dia mengindikasikan bahwa praktek bukan merupakan satu-satunya sumber pengetahuan pekerjaan sosial, tetapi analisis fenomena praktek harus didasarkan dari pengembangan pengetahuan tersebut.⁷⁴ Hal ini mendorong bahwa pekerja sosial harus berkomitmen untuk menyatukan satu pendekatan untuk pembangunan pengetahuan, dengan beberapa strategi yang dianjurkan untuk memilih ilmu dari ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan fenomena pekerjaan sosial.

Salah satu karakteristik pekerjaan sosial adalah penekanan pada metode dan konsep spesifik metode seperti yang telah berkembang dalam pekerjaan sosial. Para pekerja sosial tidak mendefinisikan metode dalam arti kamus sebagai bentuk setting prosedur. Dalam pekerjaan sosial gagasan metode jauh lebih luas dan menggabungkan nilai dan pengetahuan yang relevan bersama dengan tekniknya. Dengan demikian pekerjaan yang menangani langsung kasus sosial, kerja kelompok, dan organisasi masyarakat hampir semuanya menggunakan konsep inti seperti penerimaan klien, hubungan pekerja sosial dengan klien, dan

⁷³ *Ibid.*, hlm, 64.

⁷⁴ Werner W Boehm, "Body Of Knowledge," *Jurnal Of Social work*, Oxford University Press, No 03, thn (Juli 1995), hlm, 4.

pemberian dukungan secara profesional, nilai-nilai profesional dan pengetahuan yang diikat dengan teknik, proses, dan keterampilan. Pekerjaan sosial juga mengembangkan pengetahuan melalui pengalaman sendiri; misalnya, pengetahuan umum tentang kesejahteraan sosial dan pengalaman-pengalaman manusia, karena pekerja sosial bekerja secara langsung dengan orang-orang yang tertekan karena dampak dari stres, perilaku individu mencari bantuan dari orang lain, berbagai macam bantuan, dalam berbagai cara, dan sebagainya.⁷⁵

Ada dua hal yang menjadi penemuan penting penulis ketika melakukan penelitian pada pekerja sosial di BRTPD Yogyakarta yaitu yang pertama bahwa implementatif yang di praktekkan oleh pekerja sosial adalah antara teori *knowledge base* dan pengalaman, berjalan dengan bagus artinya bahwa teori dan pengalaman sejalan dalam prakteknya, kemudian di beberapa sisi bahwa dalam intervensinya, pekerja sosial lebih banyak menggunakan pengalaman dibandingkan dengan teori, dari sisi penerapan pada pengalaman akan berimplikasi terhadap beberapa hal, seperti tidak terpenuhinya nilai dan etika dalam pekerjaan sosial.

Pekerja sosial dalam prakteknya mengabaikan teori atau pengetahuan pekerjaan sosial, ada beberapa pekerja sosial yang sudah bekerja di lembaga sosial atau telah menangani kasus-kasus sosial mengatakan bahwa teori itu tidak implementatif maka dari itu penulis penasaran untuk menelisik lebih jauh. Dalam

⁷⁵ Harriett M. Bartlett, "The Place And Use Of Knowledge In Social Work Practice," Dalam: *jurnal social work*, oxford university press, No. 3, Vol, 9 (July 1964), hlm, 5.

faktanya pekerja sosial lebih banyak menggunakan *knowledge base* yang mana? Berangkat dari pertanyaan itu bahwa pekerja sosial yang bekerja di BRTPD Pundong Yogyakarta sebenarnya yang terjadi pada praktek dilapangan itu adalah pengalaman para pekerja sosial itu sendiri. Dalam beberapa aspek teori dan pengalaman itu berimbang tapi ketika berbicara intervensi peksos teori tidak terlalu menentukan karena pengalaman yang lebih menentukan.

Berangkat dari hal itu, penulis akan memaparkan hasil penemuan penulis yang diperoleh melalui observasi, interview dan data lainnya di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta.

B. Teori Versus Pengalaman: Knowledge Base Yang di Aplikasikan

Pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang berlandaskan pengetahuan, sebagai salah satu syarat keprofesian. Sehingga suatu praktek pertolongan profesional sudah seharusnya berlandaskan pada batang tubuh pengetahuan yang jelas.⁷⁶ Inilah yang membedakan secara jernih dan jelas dengan relawan dan dermawan, yang membantu orang lain dengan berlandaskan pada panggilan karitas, sikap saling tolong, dan pilantropis semata. Namun di sisi lain, lemahnya pemahaman dan penguasaan berbagai perspektif teori-model praktek pertolongan pekerjaan sosial diantara para pekerja sosial itu sendiri membuat profesi ini belum mampu berdiri dengan ‘tegak’ untuk mengatasi permasalahan sosial di tengah profesi-profesi lainnya yang telah lama berkembang.

⁷⁶ Santoso Tri Harjo, *Dasar Pengetahuan pekerjaan sosial*, (Bandung, Unpad Press, 2015) hlm, 7.

Dasar dari pekerjaan sosial merupakan kerangka disiplin yang berbeda dari aspek material dengan ilmu sosial lainnya. Misalnya, pekerja sosial dengan konselor, pendamping dan psikiater tentu memiliki aspek yang berbeda dalam penggunaan pola intervensinya, namun di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta sering menyamaratakan antara fungsi pekerja sosial dengan konselor, pendamping dan psikiater dan bahkan antara ketiganya tidak ada pembatasan secara signifikan yang tertulis. Pekerja sosial bisa berperan sebagai konselor, psikiater dan pendamping sedangkan konselor, pendamping dan psikiater bisa berperan sebagai pekerja sosial. Memang ada beberapa aspek kesamaan antara peran dan tugas ketiganya. Salah satu dari peran pekerja sosial adalah mampu menjadi seorang konselor.⁷⁷ Namun seorang konselor maupun pendamping masih membutuhkan proses pembelajaran dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang pekerja sosial karena dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti pendidikan dan lain sebagainya.

Dalam pengetahuan pekerjaan sosial umumnya ada tiga pokok dalam memahami profesi pekerja sosial salah satunya adalah praktik profesi itu hanya dapat dilakukan berdasarkan kompetensi.⁷⁸ Jika demikian pekerjaan yang dilakukan pekerja sosial akan berdampak pada pelayanan terhadap klien.

Kesimpangsiuran pola interaksi yang dilakukan demikian, akan menunjukkan ketidakberdayaan pada tataran penggunaan disiplin keilmuan yang

⁷⁷ Carles H. Zastrow, *The Practice Of Social Work*, (Chicago: Dorsey Press, Illinois, 1999), hlm, 37.

⁷⁸ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2015 edisi revisi) , hlm, 181.

akan berimplikasi terhadap penerapan kerangka pengetahuan dalam pekerjaan sosial. Contoh implikasi tersebut, seorang pendamping yang tidak memahami pengetahuan pekerjaan sosial dan kode etiknya yang berbasis pekerjaan sosial dan prinsip dasar dalam pekerjaan sosial ada kemungkinan akan melakukan pembiasan. Balai Rehabilitasi Terpadu penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta masih belum membedakan secara tegas antara peran pekerja sosial dengan konselor, pendamping dan psikiater. Walaupun didasari oleh beberapa pertimbangan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja sosial di BRTPD, Bu Nur bukan nama sebenarnya.

“semua pekerja sosial disini melakukan apa yang mereka ketahui (paham keilmuan) kepada semua klien namun kami juga memberikan kesempatan kepada staf yang lain (pendamping, dan konselor) untuk melakukan hal yang sama terhadap klien”.⁷⁹

Dari kutipan wawancara di atas secara jelas telah dinyatakan bahwa memberikan kebebasan terhadap pendamping dan konselor dalam menangani klien bukanlah cara yang bijak. Namun, hal yang menjadi pertanyaan dalam proses ini adalah mengenai pemahaman mereka tentang standar pengetahuan keilmuan pekerjaan sosial yang dimiliki oleh pekerja sosial, pendamping maupun konselor. Dalam praktik pekerja sosial keterampilan yang harus dimiliki adalah keterampilan dan pengetahuan dalam melakukan tugas konselor, hal ini jelas terlihat dalam beberapa pengetahuan dalam pekerja sosial. Namun dalam praktik

⁷⁹ Hasil Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Februari 2017

yang dilakukan oleh konselor belum tentu ada tuntutan untuk menjadi pekerja sosial.

Beberapa pengetahuan pekerjaan sosial akan bertentangan dengan prakteknya dilapangan, seperti pemahaman akan lingkungan sosial, budaya masyarakat dan nilai profesionalisme seorang pekerja sosial. ketiga konsep ini bertentangan karena proses pemberian pilihan kepada tugas pekerja sosial/atau konselor masih abu-abu.⁸⁰ Contoh, masih belum tegasnya antara tugas yang diampu oleh pekerja sosial dengan konselor, hal ini akan melatarbelakangi lahirnya ketidak jelasan *Job Description* antara dua profesi tersebut.

Tentu perbedaan tersebut akan berdampak sebagaimana telah diuraikan di atas. Dampak yang terjadi adalah pertentangan dengan prinsip pekerjaan sosial dari aspek obyektivitas, sikap tidak menghakimi, dan kerahasiaan. Hal-hal ini akan dilanggar bila kajian praktik pekerjaan sosial tidak mampu digenelisir di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta.

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta masih belum secara komprehensif menerapkan pengetahuan-pengetahuan dasar dalam standar praktiknya yang telah ditetapkan lainnya selain konsep yang telah diaparkan sebelumnya. Hal yang masih belum terungkap dalam proses pemberian pelayanan terhadap residen adalah masih belum adanya buku panduan/pedoman yang dapat dijadikan standar dalam praktik pekerja sosial.

⁸⁰ Louise G. Johnson, *Praktek Pekerjaan Sosial Suatu Pendekatan Generalist*. terj. Abas Basuni, dkk, (Bandung: STKS Bandung, 2001), hlm, 125.

Sehingga proses yang dilakukan hanya mengikuti jadual mingguan secara berulang-ulang sehingga proses pembaharuan terhambat.

Seperti telah diuraikan pada kerangka teori terkait beberapa pengetahuan-pengetahuan dasar dalam pekerjaan sosial profesional meliputi pengetahuan akan klien (individu, keluarga, masyarakat), pengetahuan akan lingkungan dan budaya, pengetahuan akan diri (profesionalisme).

Proses implementasi pengetahuan pekerjaan sosial, telah melahirkan berbagai model praktik, dan pendekatan masalah pada aspek kehidupan sosial masyarakat. Jika ditinjau secara mendalam mengenai proses implementasi pengetahuan pekerjaan sosial tersebut ada beberapa hal yang dapat diuraikan terkait pengaplikasian pengetahuan pekerjaan sosial dalam praktek pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Tentang Klien (individu, kelompok, masyarakat)

Bagi pekerja sosial pengetahuan klien menjadi syarat mutlak dalam melakukan intervensi di lapangan, jika pekerja sosial mampu memahami kliennya baik itu individu, kelompok atau masyarakat maka pencapaian yang diharapkan akan mampu menciptakan keberfungsian sosial kembali normal. Untuk memahami itu ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh pekerja sosial dalam menghadapi kliennya.

a. Klien individu yang unik.

Memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas tentang keunikan klien dapat menempatkan pekerja sosial berperanan besar dalam

pengembangan diri klien. Wawasan yang dimiliki pekerja sosial tentang klien hendaklah *multi* atau majemuk karena klien adalah individu yang memiliki berbagai keunikan dan keistimewaan. Unik (*uniques*) merupakan sebuah kekuatan pada diri individu yang harus diberdayakan.⁸¹

Keunikan klien dapat terlihat pada fisiologis dan psikologis mereka. Secara fisiologis sudah jelas masing-masing klien memiliki ketidaksamaan. Bahkan pada individu yang kembar identikpun dapat ditemukan ketidaksamaan tersebut. Sehingga dengan mudah orang terdekat dengan anak kembar itu bisa membedakan antara keduanya. Demikian pula secara psikologis banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu yang membedakannya satu sama lain. Sebagai pekerja sosial, pengetahuan tentang keunikan klien secara fisiologis dan psikologis akan mewarnai layanan yang mereka lakukan. Sebagaimana dikemukakan Anthony Yeo, memandang seseorang sebagai pribadi yang unik berarti sungguh-sungguh menyatakan padanya “saya melihat anda sebagai pribadi berbeda dan saya akan berusaha menolong anda dengan satu cara yang istimewa untuk anda”.⁸² Konseling bukanlah industri yang menghasilkan produk massal. Untuk alasan inilah Milton

⁸¹ Reza.M.Syarif. *Menuju Hidup Lebih Baik; Life Excellent.*(Jakarta: Prestasi, 2005), hlm, 23.

⁸² Yeo, Anthony, *Counselling; a Problem Solving Approach* Terj. (Konseling; Suatu Pendekatan Pemecahan Masalah; (Published; Armour Publishing Ptc.Ltd 1994), hlm, 30.

Erickson yang dikutip Anthony Yeo, seringkali menyatakan bahwa setiap orang yang berbeda harus ditangani dengan pendekatan yang berbeda pula.

Dalam kutipan wawancara bersama “Budi bukan nama sebenarnya”

“staff di BRTPD terutama pekerja sosial, mereka terkadang memahami apa yang harus mereka lakukan ketika menghadapi kliennya. Memahami klien adalah kewajiban bagi pekerja sosial agar mengetahui seluk beluk kliennya. Bagaimana menjadi seorang pekerja sosial jika pekerja sosial itu tidak memahami kliennya.”⁸³

Hal yang senada juga dituturkan oleh “Teguh” bukan nama sebenarnya.

“Sebelum dibawa ke sini (BRTPD) kami harus paham betul tentang kondisi klien agar kami mampu memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka.”⁸⁴

Dalam kutipan wawancara di atas, memahami kondisi klien dengan cara menerima, mendengarkan, menghimpun, menyelaraskan segala akan kebutuhan klien merupakan tanggung jawab bagi pekerja sosial dalam menerapkan pengetahuan dalam pekerjaan sosial. Alasan demikian merupakan bagian dari tanggung jawab pekerja sosial untuk mengumpulkan berbagai masalah yang dihadapi oleh klien.

Secara mendasar pengetahuan pekerjaan sosial melihat pekerja sosial harus memiliki kemampuan untuk dapat memahami klien dengan cara menerima klien apa adanya, tanpa membedakan. Hal ini diperlukan untuk mengembangkan relasi yang harus dibangun antara

⁸³ Hasil Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Februari 2017

⁸⁴ *Ibid.*, Wawancara 20 Februari 2017

pekerja sosial dengan klien dalam proses pertolongan. Pemahaman akan kondisi klien merupakan aplikasi dari prinsip penerimaan pekerjaan sosial terhadap klien tanpa melihat dari fisik klien, lingkungan sosialnya, keluarganya, keturunannya karena seorang pekerja sosial harus mampu meredam perasaan suka atau tidak suka apa saja yang terlihat dari penampilan fisik kliennya. Hal ini akan membangun hubungan yang baik kedepannya antara pekerja sosial dengan klien sehingga mencapai hasil yang diinginkan bersama.

Dalam prakteknya pekerja sosial di BRTPD tidak melihat bahwa klien disabilitas itu adalah orang-orang yang aneh, pekerja sosial menganggap bahwa mereka (difabel) adalah klien yang unik. Setiap pekerja sosial di BRTPD memegang beberapa klien untuk di lihat perkembangan tiap minggunya dalam artian pekerja sosial sebagai mentor harus mampu mengembangkan keahlian pada kliennya tersebut. Biasanya untuk satu pekerja sosial harus memegang 10-15 klien sehingga terkadang pekerja sosial kewalahan dalam menangani mereka apalagi diakhir bulan pekerja sosial harus memberikan laporan perkembangan ke 15 kliennya tersebut kepada lembaga atau wali klien. Dari beberapa hal disebutkan diatas terlihat bahwa pekerja sosial tidak memperlakukan “bentuk” klien itu seperti apa namun harus diterima sebagai individu yang unik.

b. Klien Pribadi yang Dinamis

Klien sebagai pribadi yang dinamis dapat diketahui melalui perubahan-perubahan yang mereka tunjukkan dari hari ke hari. Bisa saja hari ini klien terkesan manis, tidak menimbulkan gejala tingkah laku yang meresahkan orang lain, seperti aktivitas biasa di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) melakukan aktivitas belajar, sosialisasi dengan teman-temannya yang lain, rajin mengikuti kegiatan yang ada, penurut, patuh, membuat pekerjaan rumah dan sejumlah tingkah laku lainnya yang dipujikan. Tanpa diketahui sebabnya, telah ada saja informasi yang menyebutkan kalau klien yang nota bene baik tadi menimbulkan masalah di lembaga yaitu mulai membangkang pada staff dengan alasan tidak jelas.

Sebaliknya, dari kondisi klien yang kurang baik justru menjadi baik tanpa disadari siapa yang telah memperbaikinya. Kondisi seperti itu tentu sangat mengejutkan bagi yang tidak menyadari bahwa klien pribadi yang dinamis. Sebagai pekerja sosial, memperlakukan seseorang sebagai pribadi yang dinamis berarti berkata padanya bahwa ia tidak ditentukan secara mutlak oleh masa lampaunya, pengalaman-pengalaman masa kecil, lingkungan sekitar atau faktor-faktor bawaan (Anthony Yeo (1993). Hal senada menjadi prinsip bimbingan dan konseling yang harus menjadi

pengetahuan dan pemahaman yang mendalam oleh setiap penyelenggara layanan konseling.⁸⁵

Dalam kutipan wawancara dengan Budi, bukan nama sebenarnya.

“sebagai pekerja sosial, kami paham betul bagaimana seorang klien tiba-tiba moodnya baik dan tiba-tiba ada klien yang moodnya buruk, sehingga hal ini harus diantisipasi oleh pekerja sosial bagaimana menangani mereka dengan baik”⁸⁶

Dalam kutipan wawancara di atas, memahami pribadi klien yang dinamis atau berubah ubah tanpa sebab merupakan tanggung jawab bagi pekerja sosial dalam menerapkan pengetahuan dalam pekerjaan sosial. Alasan demikian merupakan bagian dari tanggung jawab pekerja sosial untuk mengantisipasi berbagai masalah yang terjadi pada klien.

Pekerja sosial di BRTPD terkadang harus ekstra sabar dalam menghadapi klien disabilitas, karena klien difabel adalah mereka yang cepat moody dalam segala hal, salah satu contohnya ketika diajak mengikuti kegiatan dilembaga seperti kegiatan yang telah diprogramkan menjahit untuk yang perempuan atau tukang untuk yang laki. Jika mereka lagi tidak mood mengikuti kegiatan tersebut, pekerja sosial harus mengalah untuk ditiadakan sementara kelas menjahit atau pertukangan tersebut hingga mereka mau mengikuti kembali pada jam atau hari berikutnya. Dan atau pekerja sosial harus memutar otak nya mencari

⁸⁵ Prayitno & Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Depdikbud. 1994), hlm, 7.

⁸⁶ Hasil Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Februari 2017

alternative kegiatan yang lain untuk mengalihkan kegiatan yang tidak diinginkan tadi seperti bermusik dan bernyanyi sehingga mereka bersemangat kembali mengikuti kegiatan. Improvisasi dalam menghadapi klien adalah keterampilan lain yang harus dimiliki oleh pekerja sosial di BRTPD Yogyakarta.

c. Klien Pribadi yang Bertanggung Jawab

Klien yang datang atas kemauan sendiri ke pekerja sosial atau konselor dan mengemukakan masalah yang dialami secara terbuka termasuk klien yang memiliki pribadi bertanggung jawab. Klien seperti ini lebih mudah diajak bekerja sama untuk membahas masalahnya dibandingkan klien yang sulit diajak berbicara dan menutup diri. Dalam hal ini adalah kewajiban seorang pekerja sosial untuk menumbuhkan pribadi yang bertanggung jawab pada diri masing-masing klien. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah sosialisasi bimbingan dan konseling dengan sepuluh layanannya melalui klasikal atau perorangan. Konselor bisa pula menggunakan berbagai media (elektronik atau cetak) dengan sentuhan teknologi (*high tech*). Menurut Anthony Yeo, melihat seseorang sebagai pribadi yang bertanggung jawab mempunyai tiga implikasi, yaitu; (1) kita memperlakukan mereka sebagai pribadi yang mempunyai pengendalian atas hidup mereka, situasi dan lingkungan sekitar mereka, (2) kita berkeyakinan bahwa orang memiliki kemampuan

untuk memilih, (3) memandang seseorang sebagai pribadi yang mempunyai banyak sumber daya.

Dalam kutipan wawancara dengan pekerja sosial, Haris bukan nama sebenarnya

“ada beberapa klien yang datang langsung ke kami tanpa dipanggil, klien seperti ini yang biasanya rasa ingin berubahnya lumayan tinggi, sehingga kami mensupportnya dengan baik”.⁸⁷

Dari kutipan wawancara tersebut bahwa pekerja sosial memahami bagaimana bagaimana menghadapi kliennya dengan cepat dan tepat sehingga klien merasa diutamakan dan tidak dikecewakan oleh pekerja sosial sehingga kedepannya perubahan-perubahan yang diinginkan dapat tercapai dengan sendirinya.

Masalah besar berkenaan dengan apa yang terjadi dalam konseling pekerjaan sosial adalah tentang pemahaman. klien mendatangi pekerja sosial untuk melakukan konseling karena mereka putus asa dengan kemampuan mereka untuk memahami apa yang terjadi atau untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Mereka akan kecewa ketika pekerja sosial menyatakan bahwa akan lebih baik bagi klien untuk mendapatkan pemahaman dan keputusan tersebut seorang diri. Namun demikian, pekerja sosial harus mampu menghadapi klien dalam daerah yang sulit ini, dan karena itu harus kompeten dalam memikirkan apa yang terjadi.

⁸⁷ Hasil Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2017

Klien-klien yang ada di BRTPD Yogyakarta adalah mereka yang ingin perubahan dalam hidupnya. Kegiatan yang di adakan oleh BRTPD mereka mengikuti dengan baik. Terkadang klien, ketika pekerja sosial tidak ada di ruangan atau pekerja sosialnya sedang rapat. Mereka terkadang menjalani kegiatan tanpa di damping oleh pekerja sosialnya. Selain karena sudah memahami cara kerjanya, para klien mengulang materi atau praktek yang telah dilakukan atau diajari sebelumnya.

d. Klien Pribadi yang Memiliki Harkat dan Martabat

Memahami klien sebagai pribadi yang memiliki harkat dan martabat berarti memahami klien sebagai individu yang memiliki keistimewaan dan derajat. Firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat At Tiin ayat 4 menyebutkan manusia sebagai makhluk yang sebaik-baiknya,⁸⁸ yaitu:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

artinya: Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Kemudian Prayitno mengemukakan bahwa manusia adalah “makhluk yang paling indah dan sempurna dalam penciptaanNya, makhluk yang paling tinggi derajatnya, khalifah di muka bumi, makhluk

⁸⁸ Q.s At-Tin ayat 4

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pemilik hak-hak azasi manusia”.⁸⁹

Memahami pendapat tentang manusia seperti dikemukakan di atas dapat meningkatkan pandangan positif bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah, yang memiliki berbagai keistimewaan. Di dalam dirinya ada dorongan untuk berkembang ke arah yang lebih baik dan ada pula peluang untuk terjerembab ke arah yang tidak baik. Oleh karena itu sebagai pribadi yang memiliki kehormatan, klien harus diperlakukan penuh hormat dan layak sesuai dengan martabatnya.⁹⁰

Dalam kutipan wawancara dengan salah satu pekerja sosial, Anto bukan nama sebenarnya.

“orang-orang yang masuk disini (klien) adalah orang-orang pilihan yang tidak bisa kita biarkan begitu saja. Mereka punya hak untuk mendapatkan kesamaan dalam hal sosial, pendidikan dan pekerjaan”.⁹¹

Dari kutipan wawancara tersebut pekerja sosial harus benar-benar memahammi bahwa setiap individu merupakan anugerah dari sang maha kuasa. Maka dari itu setiap pekerja sosial harus memperlakukan manusia lainnya seperti manusia pada umumnya yang memiliki harkat martabat tanpa membedakan satu dengan yang lain, tanpa melihat status, ras,

⁸⁹ Prayitno, *Wawasan Profesional Konseling*. (Padang: Universitas Negeri Padang 2009), hlm, 19

⁹⁰ Yeo, Anthony, *Counselling; a Problem Solving Approach* Terj. (Konseling; Suatu Pendekatan Pemecahan Masalah; (Published; Armour Publishing Ptc.Ltd 1994), hlm, 30.

⁹¹ Hasil Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2017

warna kulit dan agama sehingga semua makhluk sosial yang bernama manusia mampu melakukan keseimbangan kehidupan sosialnya dengan baik.

Dalam memahami kondisi klien dengan cara menerima, mendengarkan, menghimpun, menyelaraskan segala akan kebutuhan klien merupakan tanggung jawab bagi pekerja sosial dalam menerapkan pengetahuan dalam pekerjaan sosial. Alasan demikian merupakan bagian dari tanggung jawab pekerja sosial untuk mengumpulkan berbagai masalah yang dihadapi oleh klien.

Ikatan antara pekerja sosial yang melakukan konseling dan klien tumbuh dari penciptaan “bahasa perasaan” bersama, yaitu cara berbicara bersama yang mengizinkan ekspresi perasaan klien.⁹² Hubungan antar manusia sangat dipengaruhi oleh faktor umum, seperti kelas sosial, usia, etnisitas, dan gender. Salah satu hubungan kompetensi penting bagi pekerja sosial adalah keharusannya untuk sadar akan nilai karakteristik demografis ini, dan mampu meningkatkan gaya atau pendekatannya secara tepat.

Dari perspektif analisis kompetensi yang lebih luas, model “aliansi terapeutik” menekankan tiga elemen inti pembentukan hubungan kerja yang baik dengan klien: penciptaan ikatan emosional antara klien dan

⁹² Richard Nelson Jones, *Teori dan Praktik Konseling dan terapi*, terj. Helly P Soeptjito dan Sri Mulyanti Soeptjinto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm, 15.

pekerja sosial, pencapaian kesepakatan berkenaan dengan tujuan konseling dan pemahaman bersama terhadap tugas untuk mencapai tujuan ini.⁹³ Model aliansi terapeutik menyajikan kerangka umum untuk memahami kompetensi interpersonal yang dituntut dalam konseling yang efektif.

Selain memahami pengetahuan akan klien diatas pekerja sosial yang bekerja di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta juga perlu mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam dalam pelayanan kesejahteraan sosial tersebut.

Pada umumnya dalam relasi antara pekerja sosial dengan klien ada prinsip-prinsip yang telah di implementasikan oleh pekerja sosial di BRTPD Yogyakarta, ketika bekerja, yaitu:⁹⁴

Pertama, penerimaan. Prinsip ini mengemukakan bahwa seorang pekerja sosial menerima klien tanpa menghakimi klien tersebut terlebih dahulu. Kemampuan pekerja sosial untuk menerima klien dengan sewajarnya akan banyak membantu perkembangan relasi antara pekerja sosial dengan kliennya. Pekerja sosial yang bekerja di BRTPD Yogyakarta telah melaksanakan prinsip penerimaan terhadap klien hal ini terlihat dari obeservasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa mereka sudah menerima klien dan memperlakukan mereka secara baik serta

⁹³ *Ibid.*, hlm, 17.

⁹⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm, 16-19.

memberikan mereka martabat dan harga diri sehingga klien merasa dihargai dan junjung tinggi dalam segala kegiatan dan aktivitasnya.⁹⁵

Klien yang datang dari berbagai latar belakang sosial, pendidikan dan keluarga yang miskin, pekerja sosial dengan ramah dan sabar merima dan memperlakukan klien tanpa melihat status sosialnya. Hal ini juga disampaikan oleh pekerja sosial dalam wawancara.⁹⁶

“semua klien yang masuk di BRTPD Yogyakarta kami perlakukan sama, kami tidak memperlakukan klien yang berasal dari keluarga mampu atau tidak mampu diperlakukan beda karena setiap klien yang masuk di BRTPD akan mendapatkan hak dan persamaan dengan teman-teman yang lainnya.”

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi prinsip penerimaan yang dilakukan pekerja sosial dan staff lainnya di BRTPD Yogyakarta telah dilakukan dengan baik. Secara mendasar prinsip penerimaan melihat pekerja sosial harus memiliki kemampuan untuk dapat menerima residen apa adanya, tanpa membedakan. Hal ini diperlukan untuk mengembangkan relasi yang harus dibangun antara pekerja sosial dengan kliennya dalam proses pertolongan. Kesadaran dari prinsip penerimaan, seorang pekerja sosial harus mampu meredam perasaan suka atau tidak suka yang terlihat dari penampilan fisik para klien. Implementasi prinsip penerimaan dalam proses pertolongan diharapkan dapat memberikan efek percaya diri pada

⁹⁵ Obeservasi, pada tanggal 21 Februari 2017

⁹⁶ Wawancara dengan peksos Pak Dicky pada tanggal 21 Februari 2017

klien serta menghilangkan kekakuan dalam berkomunikasi dengan pekerja sosialnya, sehingga relasi yang terbangun dapat dikembangkan lebih baik.

Kedua, Komunikasi. Prinsip komunikasi ini erat kaitannya dengan kemampuan pekerja sosial untuk menangkap informasi ataupun pesan yang dikemukakan oleh klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal yang diungkapkan klien ataupun sistem klien, maupun bentuk komunikasi non verbal. Dalam praktiknya pekerja sosial yang bekerja di BRTPD Yogyakarta mengimplementasikan prinsip ini dalam setiap praktiknya. Dalam pengamatan penulis melihat segala aktivitas yang mereka lakukan di BRTPD tidak luput dari komunikasi dalam setiap interaksinya. Komunikasi verbal dan non verbal diterapkan karena di BRTPD juga mempunyai klien disabilitas rungu, sehingga komunikasi non verbal juga dominan digunakan.

Dalam wawancara dengan pekerja sosial, budi bukan nama sebenarnya, mengatakan.⁹⁷

“interaksi kami disini menggunakan dua bahasa yaitu lisan (verbal) dan non verbal (bahasa tubuh) karena klien kami terkadang tidak paham ketika kami memberikan intruksi kepada mereka sehingga alternatifnya adalah kedua bahasa tersebut harus digunakan. Selain itu klien kami disini ada yang disabilitas rungu sehingga kami pun harus paham akan bahasa tubuh dan isyarat”

⁹⁷ Wawancara, pada tanggal 20 Februari 2017

Melalui wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial yang bekerja di BRTPD sudah menerapkan dengan baik prinsip komunikasi. Kesadaran akan interaksi antara satu dengan yang lain karena timbulnya keinginan kuat antara pekerja sosial dengan klien untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan mengungkapkan melalui komunikasi baik verbal maupun non verbal.

Ketiga, Individualisasi. Pekerja sosial di BRTPD paham betul bagaimana mengimplementasikan prinsip individualisasi ini mengingat begitu kompleksitas permasalahan dan berbagai macam latar belakang klien, sehingga pekerja sosial di BRTPD tidak akan mengeneralisasi permasalahan klien yang satu dengan permasalahan klien yang lain. Prinsip individualisasi pada intinya menganggap setiap individu berbeda dengan yang lainnya, sehingga seorang pekerja sosial haruslah menyesuaikan cara memberi bantuan dengan setiap kliennya, guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan adanya prinsip individualisasi ini maka seorang pekerja sosial dibekali dengan pengetahuan bahwa setiap individu adalah unik, sehingga pendekatan yang diutamakan adalah kasus per kasus dan bukannya penggeneralisasian. Hal ini juga dapat di amati oleh penulis bahwa setiap ada permasalahan kliennya, pekerja sosial di BRTPD Yogyakarta turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan klien tersebut dengan memanggil klien ke ruangan khusus guna diberikan pengarahan dan

pembinaan lebih lanjut kepada kliennya. Selain itu pekerja sosial memiliki catatan tentang apa keluhan atau permasalahan klien sehingga didapatkan pemecahan masalahnya dengan rekan pekerja sosial lainnya.

Keempat, Partisipasi, guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam profesi pekerjaan sosial, pekerja sosial tidak dikatakan pekerja sosial jika tidak membantu individu, kelompok dalam hal ini adalah klien yang harus di berdayakan menjadi orang yang berdaya, pekerja sosial di BRTPD Yogyakarta tentu harus melibatkan kliennya dalam segala aktivitas. Segala aktivitas atau kegiatan yang ada di BRTPD harus di ikuti semua residen. Mulai dari kegiatan keterampilan menjahit, pertukangan dan lain sebagainya merupakan prinsip partisipasi yang dilakukan oleh klien guna mencapai tujuan yang direncanakan. Berdasarkan prinsip ini, seorang pekerja sosial harus mengajak kliennya untuk berperan aktif dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapinya, sehingga klien ataupun sistem klien juga mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan proses pemberian bantuan tersebut. Karena tanpa ada kerja sama dan peran serta dari klien maka upaya pemberian bantuan sulit untuk mendapat hasil optimal. Hal ini juga disampaikan oleh pak Budi bukan nama sebenarnya dalam wawancara.⁹⁸

“semua kegiatan yang dilakukan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh BRTPD Yogyakarta semua residen atau klien harus ikut berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan tersebut, apa

⁹⁸ Wawancara, 21 Februari 2017

guna mereka dimasukan ke BRTPD Yogyakarta jika mereka tidak mengikuti kegiatannya, kegiatan tersebut kan untuk bekal mereka sendiri”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pekerja sosial di BRTPD Yogyakarta telah melaksanakan implementasi prinsip partisipasi sehingga klien dan residen yang lain mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta dengan baik. Implementasi dalam partisipasi kegiatan ini menjadi penting karena partisipasi dari klien dan residen adalah puncaknya kegiatan yang menjadi tolak ukur keberhasilan pekerja sosial sebagai fasilitator, pelaksana, pendidik dan sebagainya itu untuk mencapai tujuan yang sama agar residen mampu mengembangkan ilmunya di masyarakat nanti.

Kelima, Kerahasiaan, pekerja sosial di BRTPD Yogyakarta paham betul bagaimana mengimplementasikan prinsip kerahasiaan Kerahasiaan atau hak atas privasi residen harus di junjung tinggi dalam hal ini izin untuk membuka informasi seperti identitasnya, percakapannya dengan pekerja sosial, pendapat pekerja sosial tentang dia, atau catatan-catatan kasusnya. Karena klien seringkali membicarakan bahan-bahan yang sensitif dan pribadi dengan pekerja sosial, menjaga kerahasiaan atau privasi adalah sangat penting untuk mengembangkan kepercayaan, suatu unsur kunci dalam relasi kerja yang efektif.

Standar kerahasiaan yang dimaksud di BRTPD Yogyakarta ada beberapa hal yang dibuka, dan hal tersebut khusus terbuka sesama rekan kerja agar permasalahan klien dapat diselesaikan bersama-sama oleh pekerja sosial di BRTPD, akan tetapi dengan klien atau residen ada beberapa hal yang dikontekskan sesuai dengan tujuan mereka untuk mendapatkan informasi.

Berikut kutipan wawancara dengan pak Budi.

“pekerja sosial maupun staff yang ada di BRTPD Yogyakarta tidak membeberkan keluhan atau informasi kepada orang diluar daripada ranah tugas kami, karena hal itu merupakan rahasia klien dan residen yang lain untuk dijaga dengan baik”

Konteks kerahasiaan terkait dengan ini bila ditinjau dari konteks Barat masih sulit ditemukan, namun hal ini akan lebih mudah ditemukan di masyarakat Timur termasuk Indonesia. Prinsip kerahasiaan ini akan memungkinkan klien ataupun sistem klien mengungkapkan permasalahan yang ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin bahwa apa yang ia utarakan dalam hubungan kerja sama dengan pekerja soaial akan tetap dijaga oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain.

Dari beberapa uraian diatas dapat kita tahu bahwa ketika melakukan pelayanan sosial dilembaga dalam hal ini pelayanan langsung pada klien. Pekerja sosial harus mengimplementasikan prinsip-prinsip pekerjaan sosial yang merupakan basis pengetahuan

pekerjaan sosial. Dalam wawancara dengan pekerja sosial, Budi bukan nama sebenarnya.

“dalam hal prinsip ini kami tahu betul bagaimana melakukan klien, apalagi kami bekerja dengan klien yang disabilitas. Prinsip penerimaan, komunikasi, individualisasi, partisipasi dan kerahasiaan sudah kami terapkan semua. Sebagai pekerja sosial yang bekerja disini kami tidak mungkin membiarkan tanpa menerima mereka, karena mereka juga manusia yang harus diberdayakan, selain itu kerahasiaan klien kami jamin aman”⁹⁹

Dari kutipan wawancara diatas dapat kita tahu bahwa pekerja sosial yang bekerja di BRTPD sudah mampu mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan mereka dalam bekerja, sehingga pelayanan-pelayan mereka terhadap klien tidak ada diskriminasi yang dilakukan. Selain itu rahasia klien dirahasiakan tanpa orang lain mengetahuinya.

2. Pengetahuan Tentang Lingkungan Sosial (Pengetahuan yang Berkaitan Dengan Masyarakat dan Kebudayaan)

Dalam prakteknya pekerja sosial di BRTPD terkadang di pengaruhi oleh pola lingkungan sosial masyarakat. Pengaruh masyarakat terhadap pekerja sosial di BRTPD, baik pada tataran interaksi, pergaulan, pandangan hidup, pola hidup, nilai pribadi, dan lain sebagainya sangat menentukan bagaimana pekerja sosial mengambil sikap dan memberikn kebijakan terhadap klien apa lagi dengan klien disabilitas mereka menganggap bahwa klien disabilitas adalah orang-orang yang lemah yang membutuhkan orang

⁹⁹ Hasil Wawancara, pada 23 Februari 2017

lain. Inilah yang menjadi pemahaman yang fatal akan klien disabilitas bahwa mereka adalah sepenuhnya harus ditentukan mulai dari pekerjaan, tempat tinggal bahkan jodoh sekalipun. Midgley juga menjelaskan secara tegas bahwa faktor sosial dan pandangan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan praktik pekerjaan sosial.¹⁰⁰ Hal inilah yang menjadi bagian dari proses terkendala yang mengakibatkan landasan profesional dan prinsip nilai dasar dari pekerjaan sosial tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Sebagai contoh, pola masyarakat Barat yang cenderung individualistik akan terlihat berbeda dengan masyarakat Indonesia yang cenderung kolektif dan kooperatif. Hal ini menjadi cerminan bahwa prinsip individualisasi, kerahasiaan, *self-determination*, obyektivikasi, *non judgment*, privasi, obyektifikasi menjadi sangat terkendala ketika dipraktikkan oleh pekerja sosial yang ada di BRTPD Yogyakarta.

Karakteristik unik dari pekerjaan sosial adalah fokus pada pemberdayaan orang-orang yang rentan, tertindas, dan hidup dalam kemiskinan. Fokus ini pada individu kesejahteraan dalam konteks sosial, dan pengaruh lingkungan yang menciptakan dan atau berkontribusi terhadap masalah dalam hidup yang juga membedakan pekerjaan sosial dari profesi lain. Nilai-nilai inti profesional layanan, keadilan sosial, martabat dan nilai seseorang, pentingnya hubungan manusia, integritas, dan kompetensi.

¹⁰⁰ James Midgley, *Imprealisme Profesional Pekerjaan Sosial Di Dunia Ketiga...*, hlm. 125-127.

Konstelasi nilai-nilai pekerjaan sosial terkait keprihatinan tentang keseimbangan antara konteks dan kompleksitas dan atau perjuangan hidup sehari-hari atau pengalaman manusia.

Teori ekologi menekankan saling ketergantungan antara organisme dengan lingkungan untuk membantu profesi menetapkan tujuan sosial membantu orang untuk mempromosikan lingkungan responsive yang mendukung pertumbuhan manusia. Kesehatan, kepuasan dalam fungsi sosial.¹⁰¹

Klien adalah individu, keluarga, masyarakat, kelompok, dan organisasi, yang ada dalam konteks budaya yang beragam. Para pekerja sosial yang sensitif terhadap keragaman budaya dan etnis dan berusaha untuk mengakhiri diskriminasi, penindasan, kemiskinan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial.

Dalam kutipan wawancara dengan pekerja sosial Budi, bukan nama sebenarnya.

“klien disini merupakan orang-orang jawa, sehingga dalam penanganan dengan klien agak mudah, karena budaya dan bahasa kita sama. Mungkin jika ada klien dari orang luar jawa sepertinya sulit juga sih kita memahaminya dan kita juga perlu belajar banyak tentang budaya sosial si klien”¹⁰²

Dari kutipan wawancara diatas mengindikasikan bahwa pemahaman akan budaya dan lingkungan sosial adalah penting bagi pekerja sosial karena

¹⁰¹ Germain gitterman, *person environment practice: the social ecology of interpersonal helping*, (Colombia university press, 1998), hlm, 73.

¹⁰² Hasil Wawancara pada tanggal 23 Februari 2017

akan mempermudah dalam melakukan intervensi terhadap kliennya, sehingga antara klien dan pekerja sosial saling berkesinambungan dalam menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama.

Lingkungan sangatlah penting didalam menganalisa dan memahami perilaku manusia, sehingga kita perlu mulai mendefinisikan konsep-konsep tentang perilaku. Pekerjaan sosial memfokuskan pada interaksi diantara individu dan beragam sistem dalam lingkungan. Secara perspektif konseptual pekerjaan sosial memberikan perwujudan simbol-simbol atau gambar-gambar dari bagaimana memandang dunia. Teori-teori sistem menyediakan pendekatan yang luas untuk memahami dunia dan bisa diterapkan pada berbagai latar belakang masyarakat. Penggabungan teori-teori sistem dengan perspektif ekologi kadang kala mengacu pada teori ekosistem.¹⁰³ Di dalam perspektif ini orang dipandang sebagai sesuatu yang terlibat secara tetap dalam melakukan interaksi dengan berbagai sistem dalam lingkungannya. Ini meliputi keluarga, teman, pekerjaan, pelayanan sosial, pemerintah agama, barang dan jasa, dan sistem pendidikan. Teori sistem memandang orang secara dinamis terlibat dengan sistem lainnya. Praktek pekerjaan sosial diarahkan pada perbaikan interaksi antara klien dan sistem.

Pekerja sosial di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) berfungsi untuk menghubungkan klien dengan lingkungan, agar

¹⁰³ <http://mahaneni.blogspot.co.id/2015/03/human-behavior-social-environmenthbse.html>
(diakses tanggal 21 April 2017)

tercapai kesesuaian antara kebutuhan klien dengan sumber daya yang tersedia di lingkungan (ditunjukkan dengan perilaku coping). Orang dengan lingkungan yang cocok sebenarnya sesuai antara kebutuhan individu atau kelompok bersama, hak, tujuan, kapasitas dan kualitas serta operasi dari lingkungan fisik dan sosial mereka dalam konteks budaya dan sejarah tertentu.

Pekerja sosial dapat mencapai kesesuaian hanya jika mereka telah sepenuhnya menilai setiap sisi penghubung. Analisis komponen setiap sisi penghubung dimulai dengan analisis perilaku coping individu. Perilaku Coping didefinisikan sebagai perilaku yang diarahkan terhadap lingkungan, termasuk upaya individu untuk menggunakan sebagian kendali atas perilakunya sendiri.¹⁰⁴

Untuk menggunakan pendekatan preventif, praktisi harus menyadari dan memahami peran lingkungan ekologi yang signifikan (klien, komunitas, sumber daya yang relevan, dan kebutuhan unik dari kelompok klien yang berbeda). Kemudian, mereka bisa memiliki pandangan jauh ke depan dan wawasan untuk mencegah masalah melalui upaya kolaboratif dan advokasi. Kolaborasi dan konsultasi dengan orang lain yang signifikan lembaga adalah tugas fundamental pekerja sosial.

¹⁰⁴ Dadang Hawari, *Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa Schizofrenia*, (Jakarta: FKUI, 2001). hlm, 20.

Faktor lingkungan (tanah, iklim, topografi, sumber daya alam) dapat menjadi prakondisi bagi sifat dan perilaku manusia. Lingkungan menjadi salah satu variabel yang memengaruhi kehidupan manusia. Manusia pun dapat memengaruhi lingkungan demi kemajuan dan kesejahteraan hidupnya.

Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan riil.¹⁰⁵

3. Isu-isu Penting Tentang Persoalan Lintas Budaya dan Bangsa

Seorang pekerja sosial juga harus peka terhadap isu-isu kontemporer yang berpolemik ditengah-tengah masyarakat. Pekerja sosial yang bekerja di BRTPD harus peka terhadap isu-isu yang terjadi dalam lintas budaya. Isu-isu penting yang menjadi persoalan lintas budaya dan bangsa pada umumnya merupakan isu global yang menjadi keprihatinan umat manusia sedunia. Merupakan isu global karena persoalan ini tidak hanya dihadapi umat manusia dalam suatu Negara atau wilayah tertentu, tetapi melanda ke berbagai belahan dunia.¹⁰⁶

Kepekaan terhadap isu-isu dalam hal kemanusiaan mendorong pekerja sosial untuk memahami kondisi lapangan dan pekerja sosial harus siap siaga

¹⁰⁵ Elly M. Setiady, M.Si. *dkk. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm, 8.

¹⁰⁶ Soerjani, M, A. Yuwono dan Dedi Fardiaz. *Lingkungan Hidup, Pendidikan, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*. (Jakarta: Yayasan Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan, 2006), hlm, 16.

jika diperlukan. Kekhasan dalam kepekaan inilah yang menjadi nilai lebihnya pekerja sosial, lalu bagaimana dengan pekerja sosial di BRTPD, apakah mereka peka terhadap isu-isu kemanusiaan. Dalam diskusi dengan pekerja sosial, mereka masih jauh untuk memikirkan isu-isu seperti itu karena mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan sekarang sudah menjadi sebuah pekerjaan yang mulia dan mereka beranggapan bahwa isu seperti yang disebutkan diatas sudah bukan lagi hal yang penting dan hal yang tidak terjadi di sini, seperti dikutip dalam wawancara dengan Heru, dan Nur bukan nama sebenarnya.

“Isu-isu yang mas sebutkan itu adalah isu-isu kemanusiaan yang mungkin tidak terjadi di sini, namun lebih kepada Negara-negara yang berkonflik dan kekurangan pangan. Sekarang kita perlu melihat apa yang sudah kita lakukan sekarang disini di BRTPD bahwa kita sedang membantu teman-teman disabilitas”¹⁰⁷

Dari kutipan wawancara tersebut bisa kita tahu bahwa bagaimana pekerja sosial yang bekerja di BRTPD Yogyakarta adalah pekerja sosial yang benar-benar tidak paham bagaimana menjadi pekerja sosial sebenarnya. Kepekaan terhadap lingkungan sekitar adalah hal yang penting bagi seorang pekerja sosial. Melalui lingkungan itulah pekerja sosial mampu mengatasi problem-problem sosial yang ada dengan menimbang problem yang terjadi antara lingkungan dan manusianya.

Itulah mengapa pemahaman akan pengetahuan pekerja sosial itu penting karena memahami problem-problem sosial dan pemecahannya. Bukan

¹⁰⁷ Wawancara, 24 Februari 2017

hanya sebagai pelaku pemecah masalah namun mengerti akan lingkungan sosial kenapa dan bagaimana menghadapinya.

Dari sekian banyak uraian diatas, maka penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang berkualitas pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi manusia, yaitu meningkatkan kesejahteraan.

4. Pengetahuan Tentang Profesi Pekerjaan Sosial Professional. Meliputi Pengetahuan: Diri Sebagai Seorang Pekerja Sosial (*self*), dan Profesi (*profession*)

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi dapat dikatakan sebagai profesi yang baru muncul di abad kedua puluh. Berbeda dengan profesi lain yang mengembangkan spesialisasi untuk mencapai kematangannya, maka pekerjaan sosial lebih berusaha untuk menyatukan berbagai bidang ilmu ataupun spesialisasi dari berbagai praktik.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Isbandi Rukminto Adi, *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm, 10.

Pekerjaan sosial bukan tentang memberikan solusi untuk masalah saja, tetapi memberikan sebuah ruangan dimana klien dapat meninjau keprihatinan mereka dan melihat bagaimana mereka dapat mengelola apa yang terbaik dan menjalani kehidupan yang efektif. Pekerjaan sosial menghubungkan klien dengan layanan, sumber daya dan peluang yang mungkin memberi mereka bantuan yang mereka butuhkan. Ini memberikan kontribusi untuk klien dalam pemecahan masalah.¹⁰⁹

Untuk menjadi seorang pekerja sosial profesional haruslah memiliki komponen-komponen keahlian dasar yang terdiri atas: pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Dengan bekal komponen-komponen dasar tersebut baik yang didapat dari pendidikan formal maupun dari pengalaman-pengalaman praktiknya maka pekerjaan sosial profesional diharapkan dan dituntut untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang timbul sebagai akibat dari adanya pembangunan.

Praktik pekerjaan sosial dapat membantu terwujudnya suatu usaha kesejahteraan sosial. Praktek pekerjaan sosial tersebut dilandasi oleh tiga komponen penting yang menjadi bagian dari landasan praktik pekerjaan sosial. Komponen pengetahuan dan keterampilan adalah bagaimana penerapan ilmu-ilmu sosial dalam praktek pekerjaan sosial sedangkan komponen sikap merupakan landasan sikap profesional dalam pekerjaan sosial.

¹⁰⁹ UNESCO, *Modul 3 Pekerjaan Sosial*, (Perancis: Ag2i Communication), hlm, 11.

Di dalam prakteknya pekerjaan sosial didasarkan atas pengetahuan dan keterampilan yang diorientasikan melalui tindakan. Pengetahuan ini meliputi *Human Behavior and social environment, social welfare system, methods of social work, and research*. Dengan demikian maka tanggung jawab utama seorang pekerja sosial adalah menerapkan pengetahuan dalam pemecahan masalah.

Oleh sebab itu praktek pekerjaan sosial sebagai pelayanan profesional dapat dipertanggungjawabkan, karena pada dasarnya praktek ini menerapkan atau mewujudkan pengetahuan (*knowledge*) dan nilai (*value*). Untuk dapat mempraktekkan secara bertanggungjawab maka diperlukan keterampilan-keterampilan (*skills*).

Berikut adalah pengetahuan yang harus pekerja sosial ketahui sebagai

a. Pengetahuan diri sebagai seorang pekerja sosial

Pengetahuan akan diri berkaitan dengan nilai pribadi, Setiap orang pasti memiliki nilai yang diyakini secara individu dan terus-menerus melekat dalam dirinya hingga akhir hayat. Nilai tersebut dapat berasal dari budaya maupun keyakinan agama yang dianut oleh seseorang. Setiap keputusan etik pada dasarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai profesional tersebut. Namun demikian, pekerja sosial harus mampu mengkomunikasikan nilai personalnya dengan nilai yang ada pada masyarakat maupun nilai profesionalitas. Pekerja sosial harus dengan tepat dapat menentukan kapan secara egois menerapkan nilai pribadinya

atau kapan secara bijak mengharmoniskan dengan nilai lain ketika terjadi pertentangan nilai. Detail kendala ini telah didiskusikan di bagian muka.

Pekerja sosial yang ada di BRTPD harus memiliki prinsip diri sebagai seorang pekerja sosial. Prinsip ini menuntut pekerja sosial untuk bersikap professional dalam menjalin relasi dengan kliennya, dalam arti bahwa pekerja sosial harus mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak terhanyut oleh permasalahan yang dihadapi oleh kliennya. Pekerja sosial di sini haruslah tetap rasional, tetapi mampu menyelami perasaan kliennya secara obyektif. Dengan kata lain, pekerja sosial haruslah menerapkan sikap empati dalam menjalin relasi dengan kliennya.¹¹⁰

Seperti yang diungkapkan Budi dalam wawancara, bukan nama sebenarnya.

Pekerja sosial disini terkadang masih bingung dengan sikap professional ketika menangani klien. Terkadang kami tidak tega membiarkan klien ketika klien menghadap dan melepas mereka.¹¹¹

Dari sini kita tahu bahwa kegalauan dan kegelisahan pekerja sosial ketika menghadapi klien antara membiarkan klien tidak terurus atau sikap sadar diri sebagai pekerja sosial harus kita sikapi dengan tegas bahwa setiap permasalahan yang telah final dan itu harus di lepas tanpa ada beban yang dirasakan dalam artian bahwa pekerja sosial masih

¹¹⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm, 16-19.

¹¹¹ Hasil Wawancara, 23 Februari 2017

menyimpan rasa belas kasih meskipun si klien sudah mampu dan kembali keberfungsian sosialnya di masyarakat.

Pemahaman seperti ini adalah penting mengingat pekerja sosial adalah sebagai agen perubahan dalam penanganannya terhadap klien, sehingga rasa belas kasihan harus disingkirkan setelah final permasalahannya.

b. Dilema Nilai Profesional dan Pribadi

Pengetahuan akan Profesi berkaitan dengan nilai profesional, Nilai profesional dalam hal ini kode etik lebih banyak berperan sebagai panduan ketika terjadi konflik nilai dan etik. Dalam praktiknya pekerja sosial tidak dapat melepaskan nilai profesional. Oleh sebab itu, nilai-nilai profesional sangat membantu pekerja sosial dalam membuat suatu keputusan-keputusan etik, terutama ketika terjadi kebingungan dalam dilema etik. Namun pada tataran aplikasinya pekerja sosial sering dibuat dilema dengan situasi yang terjadi di BRTPD baik yang disebabkan oleh perilaku klien maupun dengan teman sejawat.

Hal ini di ungkapkan oleh Heru bukan nama sebenarnya

“rasa ego di dalam diri pekerja sosial selalu ada sehingga dalam tataran praktiknya pekerja sosial pasti melanggar ketentuan itu, meskipun pekerja sosial itu tahu bahwa yang dilakukan itu adalah salah”¹¹²

¹¹² Wawancara, 23 Februari 2017

Nilai-nilai profesional dan pribadi Pekerja sosial kadang-kadang menemukan bahwa nilai-nilai pribadinya bertentangan dengan nilai-nilai pekerjaan sosial atau kedudukan resmi pimpinan lembaganya atau organisasi lain yang terkait. Hal ini bisa terjadi misalnya apabila pekerja sosial tidak sepakat dengan afiliasi atau kedudukan politik pimpinan lembaganya tentang isu-isu kebijakan. Pekerja sosial juga bisa menghadapi situasi di mana nilai-nilai pribadinya bertentangan dengan nilai yang dianut klien dan residen yang lain.

Sebagaimana dijelaskan di atas, nilai adalah suatu keyakinan yang bersifat abstrak. Oleh sebab itu, peranan nilai dalam hal ini bersifat sangat fundamental dalam perilaku seorang maupun perilaku profesi seperti halnya profesi pekerjaan sosial. Karena nilailah yang menuntun, menggerakkan dan sebagai petunjuk dalam profesi pekerjaan sosial. Tanpa, nilai perilaku dan profesi tidak memiliki pedoman tentang baik buruk dan tentu saja benar atau salah. Di sinilah peran penting nilai dan etika dalam pekerjaan sosial. Nilai yang menjadi pedoman baik buruk dalam perilaku etik sehingga suatu perilaku dalam profesi dianggap benar atau salah.

Pentingnya peranan nilai dan etika dalam pekerjaan sosial menjadikan keduanya sebagai salah satu fondasi pengetahuan mendasar yang harus dimiliki oleh pekerja sosial. Tidak mungkin aktivitas pertolongan dapat menjadi suatu profesi spesialis tanpa adanya

pengetahuan bahwa menolong orang adalah nilai yang baik. Ketika menolong orang dianggap sebagai suatu nilai yang baik, maka secara etis perilaku digerakkan untuk menolong seseorang yang membutuhkan karena itu adalah kebenaran. Keyakinan-keyakinan tentang sesuatu yang baik menuntun pekerja sosial untuk melakukannya karena perbuatan tersebut adalah benar. Keyakinan tentang nilai yang benar juga berperan sebagai petunjuk bagi pekerja sosial untuk memutuskan suatu perkara ketika terjadi dilema etis dalam melakukan intervensi sosial. Pekerja sosial sering kali dihadapkan kepada suatu dilema etis, maka ketika terjadi dilema etis nilai memiliki peran yang penting selama proses pengambilan keputusan.

Dari uraian tentang dilema yang dihadapi oleh pekerja sosial diatas, penulis melihat bahwa dari dilema tersebut berimplikasi pada etika praktek pekerjaan sosial di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta. Jika kita merujuk bahwa etika merupakan pedoman yang mengarahkan secara konkrit tindakan yang dilakukan manusia. Tindakan atau lebih tepatnya tingkah laku manusia, selalu mempunyai dasar normatifnya. Etika pekerjaan sosial membimbing, mengatur dan mengendalikan perilaku dalam kapasitas peranan-peranan dan status pekerja sosial.¹¹³ Etika pekerjaan sosial

¹¹³ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan kajian Pembangunan)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 77.

menggambarkan apa yang diharapkan dari pekerja sosial di dalam penampilan fungsi-fungsi profesional mereka dan didalam tingkah laku mereka sebagai anggota profesi pekerjaan sosial. Harapan tersebut berlaku di dalam berbagai relasi baik dari relasi dengan klien, teman sejawat, badan atau lembaga maupun profesi pekerjaan sosial itu sendiri.

Salah satu yang menjadi persoalan dalam penemuan ini terkait implikasi penerapan pengetahuan yang hanya berdasarkan pengalaman saja oleh pekerja sosial di BRTPD Yogyakarta. Pengabaian etika pekerja sosial yang bekerja di BRTPD Yogyakarta memberi dampak terhadap prakteknya berdasar pengamatan penulis adalah *self-determination*.

Self-determination / Penentuan nasib sendiri, pada prinsip etika ini pekerja sosial yang bekerja di BRTPD Yogyakarta mengabaikan tentang bagaimana klien itu harus menentukan nasib mereka sendiri, seharusnya dengan prinsip ini klien atau residen berhak menentukan nasibnya sendiri, pekerja sosial di BRTPD harusnya mengakui hak dan kebutuhan klien untuk bebas dalam menentukan pilihannya dan keputusannya sendiri. Di satu sisi bahwa penentuan nasib sendiri berarti tidak dipaksa atau dimanipulasi. Pada sisi lain dikatakan, penentuan nasib sendiri berarti memiliki hak dalam kebebasan dalam menentukan pilihan-pilihannya. Kebebasan yang dipilih bergantung pada alternatif-alternatif yang diberikan. Namun ada batasanya dalam menentukan nasib sendiri.

Dalam hal penentuan diri sendiri (*self-determination*) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta seperti tidak terlalu melaksanakan prinsip ini. Hal ini terlihat dari banyaknya klien atau residen yang ketika mereka di pulangkan atau di rumahkan, pekerja sosial atau lembaga yang menaungi klien difabel harus ditentukan nasibnya ditangan pekerja sosial atau lembaga BRTPD itu sendiri. Artinya bahwa sebelum klien di pulangkan, pekerja sosial harus menentukan pekerjaan apa yang pas buat mereka kerjakan sehingga baik buat masa depannya. Sehingga hal ini sudah melanggar prinsip etik pekerjaan sosial bahwa seharusnya klien sendiri yang menentukan kemana mereka akan bekerja dan menentukan nasib sendiri. Pada aspek lain di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta mengenai konsep *self-determination* bila dikaitkan dengan proses penerapannya sering juga tidak jelas mengenai kapan seorang klien memiliki hak kebebasan pribadi dalam situasi-situasi tertentu. Artinya residen juga dibatasi oleh beberapa hal terkait dengan pemutusan akan rencana residen. Fokus utama pekerja sosial adalah mengenai perilaku pekerja sosial dalam kaitannya dengan kapasitas dan status profesi mereka yang ditandai dengan penampilan diri mereka. Prinsip-prinsip etik pekerjaan sosial dalam kategori ini dikaitkan dengan begitu banyak pola perilaku pekerja sosial seperti penampilan dalam berbagai peranan profesional harus menyesuaikan dengan tindakan dan sudut

pandang mereka sebagaimana layaknya sebagai seorang pekerja sosial tanpa memandang relasi-relasi profesional yang ada dan yang aktual.

Pada pemaparan sebelumnya, telah dipaparkan bahwa pekerja sosial harus mendengarkan, memahami, merasakan, serta menyerahkan segala sesuatu yang menjadi keinginan klien. Namun kembali kepada beberapa dilema yang dirasakan oleh pekerja sosial di BRTPD mengenai kapan klien mampu menentukan keinginan sendiri padahal dalam lembaga tersebut terdapat aturan-aturan yang membatasi residen. Dilema seperti ini kerap menjadi dilema dan sumber kendala bagi peran pekerja sosial. Bahkan dalam konsep ini memerlukan untuk menjadikan pekerja sosial berfikir lebih mendalam mengenai standar profesionalis mereka dengan nilai-nilai dan hak dasar klien.

Melihat ada sedikit perlakuan “diskriminatif” terhadap klien disabilitas artinya disini bahwa pekerja sosial sudah sedikit melanggar nilai dan etika pekerjaan sosial sehingga ada beberapa yang sedikit diabaikan seperti *self-determination*. Dari hal tersebut mengindikasikan bahwa ada kendala yang mereka miliki salah satunya pengaruh budaya dan pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah. Selain itu mereka memiliki pengetahuan yang rendah dan kemudian profesi pekerja sosial juga yang masih belum dipahami oleh masyarakat itu berimbas pada *self-determination* pada klien.

ketika berbicara dilema antara nilai pribadi dan nilai profesi yang muncul itu adalah pengabaian akan keputusan sendiri oleh klien disabilitas, bagaimana kemudian nilai profesi peksos dalam self determination di konteks disabilitas menjadi persoalan yang sangat penting dan juga tidak bisa pekerja sosial mengatakan bahwa karena mereka disabilitas mereka tidak berhak menentukan self determination, itu adalah keliru yang besar, siapa pun kliennya baik klien disabilitas, klien korban NAPZA dan lain-lain berhak menentukan nasib sendiri.

Pekerja sosial di BRTPD harusnya memberikan ruang kepada seorang klien untuk mengambil keputusan sendiri dan tentu saja tugas dari peksos adalah membantu dia untuk memilih opsi-opsi tapi di akhir mereka (klien) berhak menentukan sendiri mana opsi-opsi tersebut yang baik buat mereka, jadi self determination bukan artinya pekerja sosial menentukan nasib klien itu sendiri. Seorang pekerja sosial tidak berfungsi untuk memberikan solusi kepada klien, tugasnya pekerja sosial adalah mendampingi klien dan memberikan solusi mana yang akan diambil oleh klien, ini adalah hal yang fundamental dalam *self-determination* jadi berbicara *self-determination* bukan berarti segala hal itu diserahkan kepada klien atau pekerja sosial itu yang menentukan,

Jika kita berbicara ini menunjukkan jelas bahwa persepsi masyarakat tentang disabilitas bahwa disabilitas itu tidak mampu sangat mempengaruhi bagaimana pekerja sosial di BRTPD memperlakukan

klien, bahwa para klien disabilitas ketika mencari pekerjaan itu bergantung pada pekerja sosialnya, artinya bahwa pekerja sosial *lah* yang harus menentukan nasib dimana mereka harus bekerja dan dengan siapa klien tersebut tinggal, hal-hal seperti itulah yang menjadi salah kaprah dalam persepsi terhadap disabilitas. Hal tersebut menjadi persepsi masyarakat terhadap disabilitas bahwa disabilitas adalah orang-orang yang lemah yang selalu nasibnya ditentukan oleh orang lain. Persepsi seperti itulah yang muncul dalam pemikiran pekerja sosial di BRTPD sehingga dalam implementatifnya nilai-nilai pekerja sosial tidak sejalan dengan mereka. Para pekerja sosial di BRTPD tidak memberi ruang kepada penyandang disabilitas untuk menentukan nasib mereka sendiri dengan memberikan opsi-opsi yang telah disiapkan buat mereka.

C. Implementasi Pengetahuan Pekerja Sosial BRTPD Dalam Prakteknya Di BRTPD

Pengetahuan merupakan hal yang mendasar dalam praktik pekerjaan sosial, bagaimana seseorang mampu melakukan praktek tanpa pengetahuan, dari pengetahuan yang didapat itulah praktik pekerja sosial mampu mengimplementasikan pengetahuann-pengetahuan yang didapat melalui pendidikan perguruan tinggi dan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan pemahaman dalam praktik.

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan beberapa hal mengenai implementasi pengetahuan pekerjaan sosial di BRTPD berdasarkan pengalaman

pekerja sosial. Pekerja sosial di BRTPD yang mengimplementasikan pengetahuan akan teori-teori pekerjaan sosial tidak terlalu di terapkan karena yang pertama, mereka bukanlah pekerja sosial yang berasal dari latar belakang pendidikan pekerjaan sosial dan yang kedua pekerja sosial di BRTPD adalah mereka yang sudah lama berkecimpung bekerja dengan lembaga-lembaga layanan sosial. Meskipun demikian, pekerja sosial yang ada di BRTPD dalam implementasi pengetahuan akan pekerjaan sosialnya mereka cenderung lebih kepada implementatif pada pengalaman dibandingkan dengan teori-teori. Sebagai bukti bahwa dalam implementasinya, pekerja sosial hanya mampu mengimplementasikan pemahaman mereka yang telah di konsepskan oleh lembaga, sehingga pelaksanaannya kaku dan monoton. Konsep-konsep yang telah di berikan oleh lembaga tersebut menjadi “mendarah daging” dalam diri pekerja sosial untuk mengimplementasikan pengetahuan pekerjaan sosial di BRTPD, Seperti penerimaan, pelaksanaan program, sampai dengan terminasi merupakan pelaksanaan yang implementatif secara pengalaman yang dilakukan oleh pekerja sosial.

Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai pengetahuan dalam implementasi, baiknya saya akan menunjukkan table riwayat pekerja sosial yang bekerja di BRTPD.

Tabel: VI
Daftar Pekerja Sosial BRTPD

No	Pekerja Sosial	Pendidikan Terakhir	Pelatihan/workshop
1	Dicky M. Sholeh	Pendidikan Kesejahteraan Sosial (STKS Bandung)	1. Workshop Pekerja Sosial dengan tema “Pengembangan Kualitas Pelayanan Di Panti Sosial” Aula Barat Dinas Sosial Provinsi DIY 2. Membangun Sinergitas antara Pekerja Sosial di DIY dan Jawa Tengah. bertempat di kampus UIN Sunan Kalijga Yogyakarta. 3. Bimbingan Teknis Dasar Pekerja Sosial bagi para calon Pekerja Sosial. Kegiatan tersebut berlangsung di tempat Hotel Satya Nugraha Jl. Sorowajan baru 16 Banguntapan, Yogyakarta 4. Diklat ini pesertanya khusus bagi para pejabat fungsional pekerja sosial maupun bagi calon pejabat fungsional pekerja sosial pada UPT Depsos/instansi sosial di lingkungan pemda kabupaten/kotapropinsi wilayah kerja BBPPKS Yogyakarta.
2	Titin	Pertanian (STTPMD) Yogyakarta	
3	Nur	PGSLB Yogyakarta	
4	Ari	SMA Yogyakarta	
5	Tanjung	Hukum Keluarga Fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	

Dari table diatas dapat kita ketahui bahwa pekerja sosial yang bekerja di Balai rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) adalah pekerja sosial yang benar-benar tidak memiliki latar pendidikan kesejahteraan sosial sehingga dalam pelaksanaan implemntasi pengetahuan pekerjaan sosial sangat terbatas. Mereka hanya menjalankan tugasnya sebagai pekerja sosial yang

“dipaksa” dalam artian bahwa mereka menjadi pekerja sosial karena mengisi slot posisi di dalam Departemen Sosial yang diangkey menjadi PNS. Jika kita melihat dan menelisik bagaimana profesi pekerja sosial ini sangat di hargai kedepannya mengingat profesi ini sudah masuk dalam amandemen pemerintah. Namun yang terjadi adalah seperti “penghianatan” dan “pemanis” kata bagi penguasa dan pemangku kebijakan. Seharusnya yang diharapkan adalah yang mengambil bagian dan pengendali profesi ini adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial. Faktanya di lapangan bahwa profesi ini tidak di isi oleh mereka yang ahli dalam bidangnya.

Dalam artikel Social Work yang ditulis oleh Ram A. Cnaan dan Melissa E. Dichter University of Pennsylvania, Philadelphia bahwa dulu sebelum lahirnya profesi pekerjaan sosial di Barat, pekerjaan sosial tidak memiliki dasar pengetahuan teoritis dan ilmiah tersendiri, lain halnya ketika mereka menggambarkan pada pengetahuan profesi lain dalam melaksanakan prakteknya yang terlibat dalam pekerjaan seperti profesi di bidang engineering, kedokteran, hukum, dan berkhotbah.¹¹⁴

Oleh karena itu para pekerja sosial masyarakat bersemangat untuk meningkatkan status profesi mereka menjadi suatu profesi yang diakui dengan upaya meningkatkan status pekerjaan sosial dalam masyarakat mencantumkan penerimaan ke perguruan tinggi, pembentukan banyak jurnal akademik,

¹¹⁴ Ram A. Cnaan dan Melissa E. Dichter, “Thoughts On The Use Of Knowledge In Social Work Practice,” dalam: *Jurnal Research On Social work Practice*, No. 4 Vol. 18 , (July 2008), hlm, 3.

pengembangan pengetahuan melalui penelitian, kontrol atas beberapa domain seperti kesejahteraan anak, lisensi bagi para praktisi di kebanyakan negara, formasi dari Asosiasi Nasional untuk Pekerja Sosial, dan pembentukan Dewan Pendidikan Pekerjaan Sosial (CSWE). CSWE adalah organisasi sekolah dan departemen pekerjaan sosial dan fakultas yang mengajar di institusi akademik. Berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kepatuhan dari semua sekolah dan departemen untuk pedoman pendidikan.

lebih lanjut Ram dan Cnaan mengatakan bahwa Beberapa peran dari pekerjaan sosial di masyarakat kebanyakan orang yang bukan dari latar pendidikan pekerjaan sosial pada mereka tidak memiliki label kesejahteraan sosial, dalam beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan kemanusiaan mereka harus diberi pelatihan tentang pekerjaan sosial dan pendidikan sederajat dan lisensi pekerjaan sosial. Misalnya, banyak sekolah yang mempekerjakan pekerja sosial dengan MSW dan tidak akan mempekerjakan orang tanpa gelar tersebut. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat mengharuskan pekerja sosial berlatih di daerah tertentu (misalnya, psychotherapy) menggelar negara lisensi pekerjaan sosial.

Hal ini yang harus di lihat oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial peka terhadap profesi yang berhubungan dengan kemanusiaan. Profesi pekerjaan sosial bukan hanya sebatas memiliki jiwa sosial pada diri seseorang namun juga harus memiliki pengetahuan dan latar belakang pendidikan pekerjaan

sosial sehingga penanganan-penanganan yang dilakukan sesuai dengan standar kode etik yang berlaku.

Fenomena yang terjadi dilingkungan pemerintahan sendiri seperti lembaga sosial misalnya, masih ada beberapa Pegawai yang belum mengetahui apa itu jurusan Kesejahteraan Sosial atau pekerjaan sosial, bagaimana prospek kerjanya dan beberapa pertanyaan lainnya. Hal ini menyebabkan persepsi yang ada dimasyarakat mengenai kesejahteraan sosial, pelayanan sosial, atau pun hal-hal yang bersangkutan dengan sosial-sosial lainnya adalah sesuatu yang tidak populer dan tidak menjanjikan kehidupan yang makmur yang menjadi suatu tolak ukur di jaman globalisasi ini.

Pada kenyataanya jurusan Kesejahteraan Sosial adalah jurusan yang akan menghasilkan para Pekerja Sosial Profesional yang berkompeten, berpengalaman, serta memiliki keahlian dalam bidang pelayanan sosial. Dengan semakin banyaknya masalah-masalah sosial yang terjadi saat ini profesi sebagai Pekerja Sosial sangat prospektif baik dari sisi kontribusi kepada masyarakat maupun dari sisi karier pelakunya. Fakta di lapangan lulusan pekerja sosial tidak mengendalikan profesi ini melainkan orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial.

Berikut akan penulis paparkan beberapa implementasi pekerjaan sosial berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam praktiknya sebagai pekerjaan sosial di BRTPD, dapat dilihat pada pemaparan berikut.

1. Pendekatan awal

Sebagai seorang pekerja sosial sebelum melakukan eksekusi pada klien, pekerja sosial harus melalui tahap awal yaitu pendekatan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui data diri klien, keluarga klien dan melihat lingkungan tempat tinggal klien sehingga nantinya pekerja sosial tidak kesulitan untuk mengassessment kliennya tersebut. Selain mengidentifikasi, pekerja sosial juga mampu memotivasi klien agar klien mau mengikuti kegiatan rehabilitasi yang diadakan di BRTPD. Motivasi ini mengubah cara pandang klien yang tadinya pesimis menjadi optimis, mendukung mereka agar mampu seperti orang normal bahwa mereka juga bisa melakukan apa yang orang normal lakukan.

Dalam kutipan wawancara dengan pekerja sosial.

“Sebelum klien masuk lembaga, pekerja sosial melakukan kunjungan ke rumah klien untuk memastikan klien tersebut dan pekerja sosial harus sudah menyiapkan segala sesuatu untuk memastikan klien tersebut mau di rehabilitasi seperti memotivasi dan mendukung kebutuhan klien tersebut”¹¹⁵

Dari wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa implementasi pada pengetahuan akan pendekatan pada klien ini adalah hal yang harus dipahami oleh pekerja sosial karena tanpa memahami dalam pendekatan ini, pekerja sosial tidak akan mampu memahami bagaimana kondisi klien. Dari sini kita bisa lihat bahwa keberhasilan dalam implementasi akan pendekatan ini adalah tidaknya adanya miss komunikasi antara klien dengan pekerja sosial baik itu

¹¹⁵ Hasil Wawancara 24 Maret 2017

mengenai hal identitas klien, dan lingkungan tempat tinggal klien sehingga perencanaan dan assessment pada klien mudah diidentifikasi.

2. Penerimaan

Pada proses implematasi penerimaan ini pekerja sosial menyampaikan penerimaan dengan mengungkapkan kepedulian terhadap klien dengan mendengarkan secara baik keinginan klien, menghormati sudut pandang klien, dan menciptakan iklim yang saling menghormati tanpa ada sekat diantara klien dengan pekerja sosial. Penerimaan berarti bahwa pekerja sosial memahami perspektif klien dan menyambut baik pandangan-pandangannya. Penerimaan juga menganjurkan pembangunan berdasarkan kekuatan-kekuatan klien dan mengakui potensi yang mereka miliki masing-masing bagi pertumbuhan dan perubahan. pekerja sosial yang menerima klien memperlakukan mereka secara manusiawi dan secara baik serta memberikan mereka martabat dan harga diri.

Dalam kutipan wawancara bersama “Heru bukan nama sebenarnya”

“Di BRTPD semua klien kami perlakukan sama, kami menerima mereka dengan baik tanpa ada masalah. Mas bisa lihat sendiri bahwa semua klien disini adalah disabilitas sehingga kami memperlakukan mereka sama, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari kami berikan sesuai dengan kebutuhan klien masing-masing”¹¹⁶

Dalam kutipan wawancara di atas, menerima, mendengarkan, menghimpun, menyelaraskan segala akan kebutuhan klien merupakan tanggung jawab bagi pekerja sosial dalam mengimplementasikan konsep nilai

¹¹⁶ Wawancara 24 Maret 2017

dasar dalam pekerjaan sosial. Alasan demikian merupakan bagian dari tanggung jawab pekerja sosial untuk mengumpulkan berbagai masalah yang dihadapi klien.

Secara mendasar implementasi penerimaan ini melihat pekerja sosial harus memiliki kemampuan untuk dapat menerima klien apa adanya, tanpa membedakan. Hal ini diperlukan untuk mengembangkan relasi yang harus dibangun antara pekerja sosial dengan kelayannya dalam proses pertolongan. implementasi penerimaan, seorang pekerja sosial harus mampu meredam perasaan suka atau tidak suka yang terlihat dari penampilan fisik kliennya. penerimaan dalam proses pertolongan diharapkan dapat memberikan efek percaya diri pada klien serta menghilangkan kekakuan dalam berkomunikasi dengan pekerja sosialnya, sehingga relasi yang terbangun dapat dikembangkan lebih baik.

3. Pelayanan dan Rehabilitasi

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban narkoba. Rehabilitasi sosial bisa diartikan sebagai pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula.

Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Seseorang dapat berintegrasi dengan masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial serta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Semisal terdapat seseorang yang mengalami permasalahan sosial seperti gelandangan atau pengemis, maka mereka akan dicoba untuk dikembalikan ke dalam keadaan sosial yang normal seperti orang pada umumnya. Mereka diberi pelatihan atau keterampilan sehingga mereka tidak kembali lagi menjadi gelandangan atau pengemis dan bisa mencari nafkah dari keterampilan yang ia miliki tadi.

4. Resosialisasi

Pekerja sosial di BRTPD mengimplementasikan pengetahuannya tentang resosialisasi. Kegiatan ini merupakan komponen pelayanan dan rehabilitasi yang diarahkan untuk menyiapkan kondisi klien yang akan kembali pada keluarga atau masyarakat, kegiatan ini meliputi: 1) pendekatan kepada klien untuk kesiapan kembali kepada keluarga dan masyarakat tempat tinggalnya. 2) menghubungi dan memotivasi keluarga klien serta lingkungan masyarakat agar menerima kembali klien tersebut. 3) menghubungi lembaga pendidikan bagi klien yang kembali sekolah.

Dalam wawancara dengan pekerja sosial bu Nur.

“klien yang sudah mampu kami kembalikan kepada keluarga dan masyarakat, tapi tidak semua klien disini kami kembalikan hanya klien yang disabilitas grahita saja. Karena mereka cepat beradaptasi dengan lingkungan pendidikan di BRTPPD selain itu mereka sakit tidak terlalu parah”¹¹⁷

Sebagai pekerja sosial yang bekerja di BRTPD implementasi akan resosialisasi terhadap klien adalah hal yang harus dilaksanakan oleh pekerja sosial, mengingat bahwa resosialisasi merupakan bagian penting dalam penanganan terhadap klien. Pekerja sosial menjadi penghubung antara klien dengan dunia usaha atau keluarga jika mereka dikembalikan ke keluarganya.

5. Pembinaan lanjut

Pekerja sosial di BRTPD melakukan pembinaan lanjutan pasca pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan di BRTPD, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana klien mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pekerja sosial melakukan pembinaan atau bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat yang dimana klien diharapkan dapat bersosialisasi di masyarakat dengan baik. Pembinaan lanjutan dapat dilakukan setelah evaluasi terhadap klien, sehingga pekerja sosial melakukan bimbingan pengembangan usaha atau peningkatan keterampilan yaitu dengan memberikan pengarahan mengenai pekerjaan yang sesuai dengan kondisi dan keterampilan yang dimiliki selama mengikuti proses kegiatan rehabilitasi di BRTPD.

Dalam wawancara dengan Heru pekerja sosial, bukan nama sebenarnya

¹¹⁷ Hasil Wawancara 24 Maret 2017

“sebelum klien di lepas ke masyarakat atau tempat kerjanya, kami melakukan pembinaan lanjut, melihat kemampuan dan kondisi klien apakah mampu atau tidak, sesuai atau tidak dengan keterampilan yang dimiliki, sehingga kami harus melakukan pembinaan lagi agar kebutuhan yang diminta masyarakat dalam pekerjaan terpenuhi”¹¹⁸

Pembinaan lanjut pasca pelayanan dan rehabilitasi sosial supaya berhasil dengan baik diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk sikap positif masyarakat termasuk para anggota keluarga terhadap mantan tuna susila. Disamping itu juga diperlukan untuk menerima dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial dan kegiatan kemasyarakatan pada umumnya yang ada dimasyarakat.

6. Terminasi

Pekerja sosial di BRTPD melakukan terminasi pada klien jika segala sesuatu sudah dianggap final atau berhasil sehingga si klien harus kembali pada keluarganya atau masyarakat. Terminasi dalam pekerjaan sosial merupakan tahap pengakhiran dari proses pertolongan pekerjaan sosial dimana terjadi pemutusan hubungan kerja antara pekerja sosial atau lembaga usaha kesejahteraan sosial dengan klien. Terminasi dalam proses pertolongan pekerjaan sosial ini dapat dilakukan kapan saja jika situasi menghendaki. Selain itu, terminasi ini juga harus berdasarkan kemauan klien. terminasi ini juga dapat dikatakan sebagai pintu masuk bagi pihak selanjutnya

¹¹⁸ Hasil Wawancara 24 Maret 2017

jika memang diperlukan rujukan kaitannya dengan masalah yang sedang dihadapi klien.

Dalam wawancara dengan pekerja sosial, Heru bukan nama sebenarnya.

“klien yang telah kembali ke keluarga dan masyarakat harus kami lakukan pengakhiran,, dengan membicarakan kepada klien,, keluarga dan masyarakat bahwa hubungan antara BRTPD dan klien sudah tidak ada lagi”¹¹⁹

Implementasi akan terminasi ini merupakan pemahaman yang telah lama pekerja sosial lakukan disetiap mengakhiri masa kerja sama antara klien dengan pekerja sosial. Hal ini bisa dikatakan bahwa pekerja sosial mengimplementasikan dengan baik pengetahuan yang mereka dapat.

Permasalahan manusia sangat beraneka ragam dan beraneka macam jenis, corak dan intensitas, sehingga batas waktu penyelesaian atau pemecahan masalah untuk setiap klien sangat bervariasi. Pekerjaan sosial di dalam memberi pertolongan kepada kliennya selalu dibatasi oleh waktu, artinya tidak ada pertolongan pekerjaan sosial yang seumur hidup. Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, maka pekerja sosial perlu mengidentifikasi masalah se jelas mungkin. Salah satu tahapan proses pertolongan yaitu terminasi dan evaluasi. Pekerja sosial hendaknya mengembangkan berbagai strategi agar klien mampu memelihara perubahan-perubahan yang telah dicapai, walaupun pertolongan akan diberhentikan dan

¹¹⁹ *Ibid.*, Wawancara

pekerja sosial tidak berada disampingnya. Hal ini perlu diperhatikan, walaupun sering ditemukan klien yang mengalami kemunduran menampilkan kembali perilaku yang disfungsional setelah pertolongan dihentikan.

Dengan keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki, pekerja sosial yang bekerja di Balai rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta, hanya mengimplementasikan enam pengetahuan yang mereka miliki dalam menangani klien berdasarkan pengalaman. Pengetahuan yang mereka implementasikan itu merupakan tahapan dalam menangani klien di BRTPD yang notabenenya merupakan tahapan yang sudah di konsepkan oleh lembaga tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa tahapan-tahapan kegiatan implementasinya tersebut diterapkan juga di lembaga-lembaga sosial lainnya di bawah naungan Departemen Sosial di Yogyakarta. Hal ini bisa dikatakan bahwa sebenarnya pekerja sosial yang bekerja di lembaga sosial adalah pekerja sosial yang benar-benar tidak memiliki basis pemahaman dasar dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Di lain sisi pekerja sosial yang bekerja tersebut merupakan pekerja sosial yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dalam kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial, sehingga proses pertolongan dalam pelayanan kesejahteraan sosial tersebut kurang maksimal. Pekerja sosial yang bekerja di BRTPD hanya mampu menjalankan tahapan implementasi yang sudah di konsepkan oleh lembaga sehingga mereka hanya bekerja sesuai apa yang sudah di konsepkan. Selain itu pekerja sosial yang bekerja di BRTPD adalah pekerja sosial yang di

rekrut oleh pemerintah tanpa melihat latar belakang pendidikan yang di tempuh oleh si pekerja sosial yang kemudian di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sesungguhnya untuk dapat diakui sebagai pekerja sosial profesional, seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial dan memperoleh sertifikat dari badan penguji kompetensi keahlian pekerjaan sosial. Kompetensi ini akan membedakan pekerja sosial profesional dengan tenaga sosial atau pekerja sosial lain yang tidak memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Salah satu pencapaian yang diharapkan tentunya untuk mendorong pekerja sosial profesional agar memiliki standar praktik dalam keahliannya di lapangan.

Selain itu orientasi pendidikan di Indonesia juga lebih banyak diarahkan pada pemberian pengetahuan untuk mengejar kualifikasi dan ijazah, bukan untuk meningkatkan penguasaan keahlian mengerjakan tugas dan fungsi profesinya. Ini pun menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mengenal dan mengetahui perkembangan pekerja sosial di Indonesia. Selain itu Indonesia juga belum memiliki undang-undang yang mengatur praktik pekerja sosial professional dalam masyarakat.

Namun demikian, ternyata sampai saat ini mengapa dilembaga-lembaga sosial pemerintah mengangkat para pekerja sosial yang bukan berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial karena kalau dilihat bahwa di Indonesia sendiri memang belum mempunyai undang-undang yang menjadi

payung hukum bagi praktik pekerja sosial profesional tersebut. Undang-undang ini sangat dibutuhkan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi pekerja sosial profesional. Termasuk di dalamnya mengatur kewajiban lembaga-lembaga pelayanan sosial, baik milik pemerintah maupun swasta untuk mempekerjakan pekerja sosial profesional sesuai dengan besarnya beban kasus yang dihadapi. Pekerja sosial profesional membutuhkan undang-undang untuk melindunginya dalam berpraktik melaksanakan peranan-peranan pada *setting* pekerjaan sosial yang berbeda-beda.

Secara yuridis, sosok pekerja sosial profesional telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Disebutkan pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) bahwa: Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.¹²⁰

Namun demikian, kriteria pekerja sosial profesional yang disebutkan dalam UU tersebut masih menimbulkan banyak kontroversi tersendiri. Di satu sisi tersirat bahwa semua orang yang memiliki perhatian dan memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah sosial dapat diakui

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam, <https://www.kemsos.go.id/unduh/UU-Kesos-No11-2009.pdf>

sebagai pekerja sosial profesional, meskipun tidak berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Sedangkan di sisi lainnya, harus diakui bahwa negara mulai memberikan perhatian dan mengakui eksistensi pekerja sosial profesional.

Pekerja sosial profesional dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pekerjaan sosial, lulus sertifikasi pekerja sosial sosial yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial (LSPS), dan memiliki surat izin untuk melakukan praktik dan menjalankan tugasnya. pekerja sosial profesional harus memiliki fokus kerja terhadap interaksi manusia dan memiliki etos kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada semua pihak. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar menguatkan dan meningkatkan peran pentingnya dalam mewujudkan komitmen kesejahteraan sosial.

Selama ini, pekerja sosial di Indonesia belum mendapatkan jaminan untuk keamanan dan kesejahteraannya. Bahkan keberadaan dan peran pekerja sosial sering dianggap rendah akibat tidak adanya landasan hukum yang memayungi kegiatan mereka di masyarakat.

Untuk mengatur para pekerja sosial dalam berpraktik baik di dalam ruangan maupun di lapangan, diperlukan adanya payung hukum yang dapat mengatur kewajiban dan hak seorang pekerja sosial dalam bersikap dan bertindak. Termasuk di dalamnya terdapat kejelasan perlindungan yang diberikan dan sanksi yang diperolehnya, saat melakukan praktik pertolongan

dalam masyarakat. Para pekerja sosial di Indonesia sangat membutuhkan legalitas dan pengakuan dari pemerintah akan keberadaannya. Hal ini sangat penting untuk menjamin profesionalisme, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan sosial yang diberikan. Berdasarkan uraian tersebut, muncul sebuah pertanyaan “Bagaimana mengembangkan dan menguatkan profesi pekerja sosial Profesional di Indonesia?”. Sebab dengan mengembangkan dan menguatkan profesi ini, diharapkan praktik pekerja sosial Profesional di Indonesia akan memiliki aturan dan payung hukum yang jelas dalam implementasinya.

Dari uraian di atas akan berimplikasi kepada penerapan kerangka pengetahuan yang dipraktikkan oleh pekerja sosial di BRTPD Yogyakarta. Aspek ini telah melahirkan beberapa paradigma yang masih perlu ditinjau kembali bagaimana pekerja sosial harus benar-benar paham tentang keilmuannya akan pekerjaan sosial sehingga dalam tindakan dilapangan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi orang lain yang ditangani serta terciptanya keberfungsiaan sosial kembali ditengah-tengah masyarakat.

D. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pengetahuan Pekerjaan Sosial Dalam Praktik Pekerja Sosial

Dalam aktivitas sosial yang berhubungan dengan pelayanan sosial tentu tidak bisa terlepas dari permasalahan yang ada. Pada proses implementasi pengetahuan pekerjaan sosial sering menjadikan pelaku pekerja sosial mengalami berbagai kendala dan situasi-situasi tertentu. Kondisi-kondisi tersebut dapat

mempengaruhi berbagai latar yang dapat menjadikan pekerja sosial profesional dalam proses pengambilan keputusan.

Secara umum melihat konteks pekerjaan sosial yang masih dalam proses pendewasaan untuk menjadi professional pekerjaan sosial, maka ada satu hal yang perlu diperhatikan dan menjadi kendala dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam pekerjaan sosial, hal tersebut adalah;

1. Pekerja Sosial Yang Bukan Berlatar Belakang Pendidikan Pekerjaan Sosial

Salah satu syarat profesi sebagaimana digambarkan diatas, yakni memiliki seperangkat teori umum yang sistematis, bahwa seperangkat teori tersebut harus diperoleh melalui pendidikan formal. Seperangkat pengetahuan di dalamnya meliputi teori-teori yang menjadi dasar kemampuan praktek profesional, dimana teori-teori dasar ini dipelajari secara resmi dalam proses pendidikan formal. Dalam ketentuan yang digunakan oleh organisasi profesi Pekerjaan Sosial, yakni Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), disyaratkan bahwa untuk memperoleh sertifikat sebagai seorang Pekerja Sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan praktek profesional harus berlatar belakang pendidikan minimal D-4 atau S-1 disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial.

Zastrow menjelaskan bahwa praktek pekerjaan sosial mensyaratkan pengetahuan tentang perilaku dan perkembangan manusia, institusi budaya,

sosial, dan ekonomi, dan interaksi antara semua faktor-faktor ini.¹²¹ Menurut the National Association of Social Workers (NASW) yang dimaksud dengan Pekerja Sosial (social worker) adalah lulusan sekolah tinggi pekerjaan sosial (baik sarjana maupun master) yang menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menyediakan pelayanan sosial bagi klien, baik bersifat individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, maupun masyarakat.

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu atau disiplin akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, dan program-program pelayanan sosial. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya. Pada masa awal perkembangannya, kesejahteraan sosial memiliki basis ilmu yang dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu sosial lain, terutama filsafat, sosiologi, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Belakangan ini, bidang studi kesejahteraan sosial telah sangat aktif menyelenggarakan berbagai proyek penelitian dan pengembangan keilmuannya yang semakin spesifik.¹²²

¹²¹ Zastrow, Charles. *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People*. (Belmont: Brooks/Cole 2010). hlm, 5.

¹²² Edi Suharto, paradigma Ilmu Kesejahteraan Sosial, Makalah: disampaikan pada seminar paradigma kesejahteraan sosial, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 5-6 September 2007.

Pekerja sosial di BRTPD masih memandang bahwa pekerja sosial adalah pekerja yang memiliki hati nurani membantu orang lain agar kembali keberfungsian sosialnya dimasyarakat. Mereka menafikkan bahwa keberadaan pekerja sosial adalah profesi yang harus memiliki pemahaman akan profesinya sebagai pekerjaan yang professional. Hal ini bukanlah menjadi sebuah rahasia public bahwa pekerjaan sosial adalah profesi yang professional. Dalam Realitasnya di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta, masih banyak kalangan yang mengatakan bahwa pekerjaan sosial dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa ilmu dan pendidikan. Kegamangan profesi pekerjaan sosial di tengah masyarakat tampak jelas ketika lulusan pendidikan pekerjaan sosial tidak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan ilmunya. Masalah ini disebabkan dari masih kurangnya pemahaman mengenai profesi pekerjaan sosial oleh masyarakat sehingga keberadaan pendidikan pekerjaan sosial menjadi kurang jelas arahnya.

Seperti halnya dokter, ketika tindakan medis dilakukan oleh seseorang yang bukan berlatar belakang pendidikan kedokteran maka kemungkinan terjadinya malpraktik sangat besar. Pekerja sosial pun demikian, orang yang berlatar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial secara konsep pasti lebih matang dibandingkan dengan mereka yang tidak berlatar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial, ketika suatu intervensi dilakukan oleh orang yang tidak ahli dalam bidangnya maka akan

menimbulkan konsep yang salah dan berujung pada praktik yang tidak benar. Untuk itu penting diperhatikannya latar belakang ilmu yang membidangi suatu profesi.

Lalu bagaimana dengan pekerja sosial yang ada di BRTPD, apakah mereka memiliki latar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial? Jawab jelas ada, tapi tidak semua memiliki latar belakang ilmu kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial. Hanya satu pekerja sosial yang memiliki latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial.

Mengutip pernyataan dari pak Budi, Pekerja sosial di BRTPD saat wawancara.

“pekerja sosial di BRTPD tidak semua mempunyai latar belakang pendidikan pekerjaan sosial, hanya satu yang benar-benar berlatang belakang pendidikan pekerja sosial”.¹²³

Senada dengan pak Budi, Heru bukan nama sebenarnya mengatakan bahwa

“dalam hal ilmu kesejahteraan sosial kami bukanlah memiliki latar belakang dari pendidikan ilmu kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial, kami berasal dari berbagi jurusan (lintas ilmu), sehingga dalam hal keilmuan tentang pekerjaan sosial kami masih sangat minim”.¹²⁴

Dalam kutipan wawancara di atas, mengindikasikan bahwa para pekerja sosial yang bekerja di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta adalah pekerja sosial yang hanya bekerja atas dasar tugas saja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka bekerja

¹²³ Hasil Wawancara 24 Februari 2017

¹²⁴ Hasil Wawancara 24 februari 2017

bukan berdasar atas pemahaman akan keilmuan dan kesadaran akan nilai dan prinsip pekerjaan sosial. Hal ini bisa saja menimbulkan akan malpraktek terhadap kliennya. Lalu untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan keilmuan dan praktek terhadap klien, pekerja sosial yang ada di BRTPD di berikan pemahaman dasar akan ilmu kesejahteraan sosial melalui pelatihan-pelatihan dan workshop. Seperti yang dikatakan pak Budi ketika diwawancara

“meskipun pekerja sosial disini tidak memiliki latar belakang keilmuan pekerjaan sosial, namun kami diberikan pelatihan-pelatihan dan workshop, sehingga kami bisa mempraktikkan langsung dilapangan tentang teori apa yang kami dapatkan pada saat pelatihan”.¹²⁵

Dalam kutipan wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pekerja sosial yang bekerja di BRTPD adalah mereka yang tidak berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial namun mereka bisa mendapatkan keilmuan dengan mengikuti pelatihan dan workshop sehingga mereka dapat mengimplementasikan pengetahuan pekerjaan sosial ketika praktik. Harus digaris bawahi adalah pekerja sosial di BRTPD tidak semua pengetahuan yang mereka dapatkan ketika pelatihan mereka terapkan karena mereka paham bahwa kesulitan menerapkan dalam praktik adalah hal yang sulit menyatukan antara teori dan praktik. Hal ini di ungkapkan oleh Heri dalam wawancara

¹²⁵ *Ibid.*, Wawancara 24 Februari 2017

“kami memang mendapatkan teori ketika pelatihan namun ketika praktik kami sulit menerapkannya”¹²⁶

Tidak di pungkir lagi bahwa keberadaan pekerja sosial yang bekerja di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta adalah mereka yang benar-benar bukan berlatar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial, sehingga dalam praktiknya mereka perlu di perjelas apa dan bagaimana mengaplikasikan teori-teori yang didapat. Selain itu kematangan akan pengetahuan keilmuan pekerjaan sosial harus benar-benar di kuasai sehingga ketika melakukan praktik tidak ada kesalahan atau malpraktik dan pekerja sosial benar-benar menunjukkan perannya sebagai seorang pekerja sosial profesional.

Melihat fakta yang terjadi di lapangan bahwa pekerja sosial yang bekerja di lembaga sosial baik negeri maupun swasta, tidak terkecuali di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta adalah mereka yang benar-benar bukan dari latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Hal ini diperkuat dengan stereotip masyarakat terhadap profesi pekerja sosial bahwa profesi ini merupakan profesi amal, relawan, bantu membantu dan gotong royong. Selain itu pemerintah selaku penyelenggara negara juga tidak memberikan kesempatan kepada mereka yang menekuni dalam bidang ini untuk mengendalikan profesi ini.

¹²⁶ *Ibid.*, Wawancara 24 Februari 2017

Di Indonesia profesi pekerja sosial memang belum banyak menunjukkan perannya justru yang bukan berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial yang mengisi profesi ini. Selain belum dikenal secara luas sebagai profesi professional yang memiliki standar khusus, eksistensi pekerja sosial secara kelembagaan juga belum banyak terlihat. Selama ini banyak orang yang bekerja mengaku berprofesi Pekerja Sosial, namun ternyata tidak memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Sebab salah satu standar sebuah pekerjaan dapat disebut profesi ada pendidikan yang melatarbelakanginya. Umumnya yang tidak memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial tapi memberikan banyak kontribusi dalam pelayanan sosial akan disebut Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Kembali lagi ke Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta sebagai lembaga pelayanan sosial bahwa pekerja sosial harus mampu memposisikan dirinya sebagai *agent of change* dan bukan semata-mata karena tugas pokok sebagai pegawai negeri sipil yang menduduki kursi pekerja sosial.

Begitu banyak fenomena yang timbul karena permasalahan sosial seperti kekerasan, pembunuhan dan diskriminatif mengharuskan pekerja sosial peka terhadap apa yang terjadi. Permasalahan-permasalahan sosial yang semakin dinamis dan kompleks tersebut, menuntut tangan-tangan terampil, baik melalui pendekatan individu, kelompok, keluarga maupun komunitas. Ini harus dilakukan oleh para profesional yang memiliki basis

pendidikan dan latar belakang pengetahuan terhadap permasalahan sosial tersebut. Tujuannya untuk memudahkan semua orang dengan hak yang sama untuk mengakses pelayanan sosial dasar, terutama dalam pemerataan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup yang memadai.

Bagaimana mereka dapat mengimplementasikan pengetahuan mereka dalam praktik pekerjaan sosial sementara mereka tidak memiliki pengetahuan yang matang akan keilmuannya. Menjadi seorang pekerja sosial profesional harus memahami seluruh subsistem dalam system kesejahteraan sosial secara menyeluruh, agar dapat melaksanakan peran sesuai dengan tanggung jawabnya. Pekerja sosial profesional harus memiliki suatu kerangka kerja yang dapat diaplikasikan untuk membimbing pemahaman maupun aksi responsive terhadap keanekaragaman masalah-masalah sosial. Kemampuan untuk memiliki respons positif ini merupakan tuntutan logis yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja sosial profesional. Kemampuan untuk memiliki respons positif inilah yang disebut dengan kompetensi pokok bagi pekerja sosial profesional dalam menjalankan praktik pertolongannya.

Akibatnya, selama ini pekerja sosial profesional di Indonesia mayoritas belum mendapatkan pengakuan akan posisinya, baik di masyarakat maupun lembaga-lembaga pelayanan sosial pemerintah dan swasta. Benar apa yang dikatakan Holil Soelaiman bahwa: pekerja sosial yang bekerja di lembaga adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berperan sebagai penyuluh sosial di masyarakat atau sebagai pejabat fungsional

pekerja sosial di lembaga-lembaga pelayanan sosial, yang menjalankan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.¹²⁷

Hal senada diungkapkan oleh pak Budi selaku pekerja sosial senior professional di BRTPD ketika diwawancara

“kami yang bekerja di BRTPD sebagai pekerja sosial PNS mengemban tugas pelayanan sosial sesuai dengan apa yang difungsikan dalam administrasi pemerintahan”¹²⁸

Hal tersebut semakin memperkuat pesimitis penulis dalam melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini adalah lembaga sosial dalam menjalankan pelayanan kesejahteraan sosial. Ketidaksiapan pekerja sosial menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pekerja sosial semakin membuat pelayanan sosial tidak maksimal. Hanya saja apa yang mereka lakukan sudah terkonsepkan oleh Departemen Sosial daerah sehingga mereka tinggal menjalani saja.

Akibat hal tersebut semakin membuat masyarakat tidak mengenal sosok, peran, dan kinerja pekerja sosial profesional, sebagai suatu hal yang mudah dibedakan domain profesionalnya dari domain profesi lainnya.

Secara awam masyarakat di Indonesia memahami pekerja sosial sebagai profesi yang melakukan pekerjaan amal atau pekerjaan

¹²⁷ Soelaiman, Holil. *Praktik dan Pendidikan Pekerjaan Sosial (Sejarah dan Masa Depan)*. Bagian dari buku “Pekerjaan Sosial di Indonesia: Sejarah dan Dinamika Perkembangannya.” (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), hlm, 32.

¹²⁸ Hasil Wawancara 24 Februari 2017

kemanusiaan. Sebab selama ini, kebijakan dan orientasi pendidikan pekerja sosial di Indonesia memang tidak berupaya untuk mengenalkan eksistensi pekerja sosial kepada masyarakat. Status pekerja sosial hanya diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau tenaga kontrak yang bekerja di panti-panti sosial, yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial. Dengan demikian pola pikir masyarakat tidak berubah mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia Pekerja sosial. Hal ini juga semakin diperparah dengan kondisi dimana para pekerja sosial yang berstatus PNS justru mengerjakan pekerjaan administrasi pemerintahan saja. Seperti diungkapkan pak Budi “

“fungsi Pekerja sosial seharusnya bertugas terjun langsung dilapangan, menangani klien baik individu, kelompok dan masyarakat, namun kebanyakan yang ada adalah pekerja sosial di tugaskan menjadi administrasi di kantor pemerintahan,”¹²⁹

Dari kutipan wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa pekerja sosial yang bekerja di BRTPD adalah pekerja sosial yang terikat akan kedinasan saja. Selain itu pemerintah sebagai pengambil kebijakan terlihat asal-asalan dan salah alamat dalam mengangkat mereka menjadi PNS yang kemudian di beri tugaskan untuk pelayanan kesejahteraan sosial, sehingga mereka yang tidak paham pekerjaan sosial akan bekerja asal-asalan dalam menangani kasus, sehingga ditakutkan timbulnya malpraktek.

¹²⁹ *Ibid.*, Wawancara tanggal 20 Februari 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pola implementasi akan pengetahuan pekerjaan sosial dalam praktik pekerja sosial DI BRTPD Yogyakarta menerapkan beberapa pengetahuan pekerjaan sosial sebagai berikut :1) Pengetahuan tentang klien (individu, kelompok, masyarakat). 2) Pengetahuan tentang lingkungan sosial (pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat dan kebudayaan). 3) Pengetahuan tentang profesi pekerjaan sosial professional. Meliputi pengetahuan: Diri sebagai seorang pekerja sosial (*self*), dan profesi (*profession*). Namun secara keseluruhan konsep tersebut sepenuhnya masih terdapat beragam masalah. Tinjauan Konsep Pengetahuan akan klien di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta, pengetahuan klien menjadi syarat mutlak dalam melakukan intervensi di lapangan, jika pekerja sosial mampu memahami kliennya baik itu individu, kelompok atau masyarakat maka pencapaian yang diharapkan akan mampu menciptakan keberfungsian sosial kembali normal. Ada beberapa hal yang dipahami oleh pekerja sosial dalam memperlakukan klien mereka bahwa pekerja sosial harus memahami bahwa klien itu adalah unik yang tidak bisa disalahkan karena kondisinya. Pekerja sosial harus memperlakukan mereka secara manusiawi dan secara baik serta memberikan mereka martabat dan harga

diri karena manusia adalah makhluk yang dinamis atau berubah-ubah sesuai moodnya.

Selain itu pekerja sosial yang ada di BRTPD memahami dan mengimplementasikan bahwa prinsip yang harus dilakukan kepada klien adalah (1) Penerimaan dengan mengungkapkan kepedulian, mendengarkan dengan baik, menghormati sudut pandang mereka, dan menciptakan iklim yang saling menghormati antara klien dan pekerja sosial. (2) individualism, Ketika pekerja sosial menegaskan individualitas klien, ia mengakui dan menghargai kualitas keunikan dan perbedaan-perbedaan individual itu. Ia memperlakukan klien sebagai manusia yang memiliki hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan, bukan sebagai obyek. Pekerja sosial yang mengindividualisasikan klien membebaskan dirinya dari bias dan prasangka buruk, menghindari pemberian cap dan stereotip, dan mengakui potensi keberagaman. (3) komunikasi, pekerja sosial mampu menangkap informasi ataupun pesan yang dikemukakan oleh klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal yang diungkapkan klien ataupun sistem klien, maupun bentuk komunikasi nonverbal. (4) Partisipasi, seorang pekerja sosial di BRTPD mengajak kliennya untuk berperan aktif dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapinya, sehingga klien mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan proses pemberian bantuan tersebut. Karena tanpa ada kerja sama dan peran serta dari klien maka upaya pemberian bantuan sulit untuk mendapat hasil optimal. (5) Kerahasiaan, kerahasiaan ini akan memungkinkan klien mengungkapkan permasalahan yang

ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin bahwa apa yang ia utarakan dalam hubungan kerja sama dengan pekerja sosial akan tetap dijaga oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain.

Konsep pengetahuan akan lingkungan sosial, di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta, pengetahuan akan lingkungan saling ketergantungan antara organisme dengan lingkungan untuk membantu pekerja sosial menetapkan tujuan sosial membantu kliennya untuk mempromosikan lingkungan responsive yang mendukung pertumbuhan manusia. Pekerja sosial mengimplementasikan dirinya agar berfungsi untuk menghubungkan klien dengan lingkungan, sehingga tercapai kesesuaian antara kebutuhan klien dengan sumber daya yang tersedia di lingkungannya.

Pengetahuan tentang profesi pekerjaan sosial profesional, pekerja sosial paham betul bagaimana mengimplemetasikan perannya sebagai pekerja sosial. Ada dua hal yang menjadi nilai diri pekerja sosial. *Pertama*, Pengetahuan akan diri, Nilai tersebut dapat berasal dari budaya maupun keyakinan agama yang dianut oleh seseorang. Setiap keputusan etik oleh pekerja sosial pada dasarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai profesional tersebut. *Kedua*, Nilai profesional dalam hal ini kode etik lebih banyak berperan sebagai panduan ketika terjadi konflik nilai dan etik. Dalam praktiknya pekerja sosial tidak dapat melepaskan nilai profesional. Oleh sebab itu, nilai-nilai profesional sangat membantu pekerja sosial dalam membuat suatu keputusan-keputusan etik, terutama ketika terjadi kebingungan dalam dilema etik.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi pengetahuan pekerjaan sosial dalam praktik pekerja sosial secara garis besar adalah karena beda latar belakang pendidikan sehingga berimplikasi pada implementasinya pada praktek sehingga pekerja sosial yang bekerja di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta adalah mereka yang benar-benar bukan berlatar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial, sehingga dalam praktiknya mereka perlu di perjelas apa dan bagaimana mengaplikasikan teori-teori yang didapat. Selain itu kematangan akan pengetahuan keilmuan pekerjaan sosial harus benar-benar di kuasai sehingga ketika melakukan praktik tidak ada kesalahan atau malpraktik dan pekerja sosial benar-benar menunjukkan perannya sebagai seorang pekerja sosial profesional.

B. Rekomendasi

Dengan problematika yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi pengetahuan bagi pekerja sosial BRTPD Yogyakarta, yaitu:

1. Bagi Pekerja Sosial

Bagi pekerja sosial yang ada di BRTPD harus diketahui paling tidak ada tiga kualifikasi umum yang harus dikuasai. Pertama, sebagai pemberi pertolongan dan pemecah masalah sosial. Seorang Pekerja Sosial harus mampu memberikan layanan dan solusi dalam menghadapi masalah atau kasus yang dihadapi klien. Kedua, sebagai pemberdaya dan agen

perubahan. Pada saat melakukan praktiknya, Pekerja Sosial harus mampu memberdayakan dan melakukan perubahan dari aspek yang paling kecil hingga yang besar. Ketiga, sebagai analis kebijakan. Selain melakukan praktik lapangan, Pekerja Sosial juga harus mampu melakukan analisa yang mendalam dan memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan yang tepat serta sesuai dengan pokok permasalahan yang ada. Ketiganya wajib dimiliki oleh para Pekerja Sosial.

Tidak hanya itu, keharusan lainnya bagi Pekerja Sosial ialah memahami dan menguasai nilai, etika, pengetahuan, dan keterampilan pekerjaan sosial. Pemahaman akan nilai-nilai dasar Pekerja Sosial kerap dipahami sebagai hal paling dasar untuk diketahui. Nilai-nilai dasar tersebut mengenai hal; (a) Menentukan diri sendiri, (b) Aktualisasi diri, (c) Tanggung jawab sosial, (d) Penerimaan, (e) Individualisasi, (f) Menjaga kerahasiaan, (g) Tidak menghakimi, (h) Persamaan kesempatan, (i) Dukungan sosial, (j) Membantu orang menolong dirinya sendiri, (k) Menjunjung harkat dan martabat manusia. Pada sisi lain, pengetahuan yang bersifat khusus hingga pengetahuan umum lainnya turut mendukung bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktiknya.

2. Bagi BRTPD Yogyakarta

- a) Lembaga harus terbuka dan mengadakan evaluasi bagi setiap pekerja yang ada dilembaga serta siap menerima perubahan.
- b) Tingkatkan hubungan vertikal dan horizontal bagi semua penanggung jawab di BRTPD Yogyakarta, agar lembaga terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas pelayanan maupun kepentingan bersama.
- c) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta memberikan kesempatan kepada setiap pekerja yang ada dilembaga untuk menyuarakan permasalahan yang mereka hadapi.
- d) Merubah proses pengambilan kebijakan yang masih top down.
- e) Tingkatkan rapat internal diantara stakeholders untuk mendiskusikan kemajuan BRTPD Yogyakarta.
- f) Perlu memahami secara mendalam apa yang menjadi hak dan kewajiban pekerja sosial melalui pemahaman secara mendalam mengenai teori-teori dalam ilmu pekerjaan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012
- , *Kesejahteraan Sosial Internasional* Bandung: Alfabeta, 2012
- Abdul Najib, *Integrasi Pekerjaan Sosial, Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat: Tinjauan Aksi Sosial Menuju Pembangunan dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Semesta Ilmu, 20016
- Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene, *Buku Pintar Pekerja Sosial Jilid 2*. terj. Juda Damanik dan Cynthia Pattiasina Jakarta: Gunung Mulia, 2009
- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013
- Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Bumi Aksara, 2004
- B. Sandjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian* Jakarta:Prestasi Pustakaraya, 2011
- Brian Fay, *Contemporary Philosophy of Social Science*, terj M. Munith, Yogyakarta: Jendela, 2002
- Cepi Yusrun Alamsyah, *Praktek Pekerjaan Sosial Generalis: Suatu Pendekatan Generalis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Carles H. Zastrow, *The Practice Of Social Work*, Chicago: Dorsey Press, Illinois, 1999
- Dadang Hawari, 2001, *Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa Schizofrenia*, FKUI; Jakarta.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial* Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- , *Pekerjaan Sosial di duni Industri Mempekuat CST (Corporate Sosial Responsibility)*, (Bandung: Alfabeta 2009
- Elly M. Setiady, M.Si. dkk. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Germain gitterman, *person environment practice: the social ecology of*

interpersonal helping, Colombia university press

Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* Bandung: Rosdakarya, 2004
 UIN-Maliki Press, 2012

Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) suatu Pengantar*, Jakart, PT RajaGrafindo, 2013

-----, *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994

Juda Damanik, *Pekerjaan Sosial: Untuk SMK*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan Department Pendidikan Nasional, 2008

Karla Krogsrud Miley, Michael O'Melia dan Brenda Dubois, *Generalist Social work practice an empowering approach*, (Pearson Education, Inc. 2004

Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press, 2015 edisi revisi

Louise G. Johnson, *Praktek Pekerjaan Sosial Suatu Pendekatan Generalist*. terj. Abas Basuni, dkk, Bandung: STKS Bandung, 2001

Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010

Molly R. Hancock, *Principles of Social Work Practice: A Generic Practice Approach*, Binghamton:The Haworth Press, Inc, 1994

Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

M. Djunaidi Ghoony dan Fauzan Al-Manshur, *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*, Malang:

Molly R. Hancock, *Principles of Social Work Practice: A Generic Practice Approach*, Binghamton:The Haworth Press, Inc, 1994

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian, Sosial Pendidikan* Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009

Prayitno & Erman Amti.1994. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Depdikbud.

Prayitno. 2009. *Wawasan Profesional Konseling*. Universitas Negeri Padang.

- Pendidikan dan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia dan Malaysia, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2011
- Reza.M.Syarif. 2005. Menuju Hidup Lebih Baik; *Life Excellent*. Jakarta: Prestasi.
- Richard Nelson Jones, Teori dan Praktik Konseling dan terapi, terj. Helly P Soeptjito dan Sri Mulyanti Soeptjjinto Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Soetandya Wignojosoebroto, Fenomena *Cq Realitas Sosial Sebagai Obyek Kajian Ilmu (Sains) Sosial*, dalam Burhan Bungin (editor), *Metodologi Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001
- Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfa Beta. CV, 2009
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006
- Santoso Tri Harjo, Dasar Pengetahuan pekerjaan sosial, Bandung, Unpad Press, 2015,
- Soedjiran Resosoedarmo, dkk. *Pengantar Ekologi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993
- Sondang P Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004
- Soerjani, M, A. Yuwono dan Dedi Fardiaz. 2006. *Lingkungan Hidup, Pendidikan, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yayasan Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan (IPPL), Jakarta.
- Soelaiman, Holil. 2011. *Praktik dan Pendidikan Pekerjaan Sosial (Sejarah dan Masa Depan)*. Bagian dari buku “Pekerjaan Sosial di Indonesia: Sejarah dan Dinamika Perkembangannya.” Yogyakarta: Samudra Biru
- Thomas McChathy, *Etika Sosial Teori*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006
- Tatang Amiri, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992
- Yeo, Anthony. 1994. *Counselling; a Problem Solving Approach* (Konseling; Suatu Pendekatan Pemecahan Masalah; Terjemahan). Published; Armour Publishing Ptc.Ltd.

Zastrow, Charles. 2010. *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People*. Belmont: Brooks/Cole.

JURNAL:

Marilyn A Biggerstaff and Michael S Kolvezon, *Differential use of Social Work Knowledge, Skills, and Techniques by MSW, BSW and BA Level Practitioners*, dalam *Journal of Education for Social Work*, Volume. 16, No. 3 (1980)

Pamela Trevithick, *Revisiting the Knowledge Base of Social Work: A Framework for Practice*, dalam *The British Journal of Social Work*, Volume. 38, No. 6 September 2008

Jennifer Osmond, *Knowledge Use in Social Work Practice Examining and Functional Possibilities*, dalam *Journal Of Social Work*, Volume 6, No. 3 Tahun 2006

Malcolm Payne, *Knowledge Bases and Knowledge Biases In Social Work*, dalam *Journal of Social Work*, Volume 1, No. 2 Tahun 2001

Eileen Munro, *Improving Social Worker's Knowledge Base in Child Protection Work* dalam *British Journal of Social Work*, Volume 89-102, No. 28 Tahun 1998

Werner W Boehm, "Body Of Knowledge," *Jurnal Of Social work*, Oxford University Press, No 03, thn

Ram A. Cnaan dan Melissa E. Dichter, "thoughts on the use of knowledge in social work practice," dalam: *Jurnal Research On Social work Practice*, No. 4 Vol. 18 , July tahun 2008

Harriett M. Bartlett, "The Place And Use Of Knowledge In Social Work Practice," *DIALOG: jurnal social work*, oxford university press, No. 3, Vol, 9 July Tahun 1964

Lain-Lain

UNESCO, *Modul 3 Pekerjaan Sosial*, (Perancis: Ag2i Communication

Suharto, edi. paradigma lmu kesejahteraan Sosial, Makalah: disampaikan pada seminar paradigm kesejahteraan ssosial, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Kalijga Yogyakarta 5-6 September 2007.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

<http://mahaneni.blogspot.co.id/2015/03/human-behavior-social-environmenthbse.html>



Yogyakarta, 03 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/ 1035/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Bantul
1. Up. Kepala BAPPEDA Bantul
2. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang
Disabilitas (BRPTPD) Bantul

Di

YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : B-27/ Un.02/DPPs/PP.00.9/ 01/ 2017
Tanggal : 31 Januari 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"implementasi Pengetahuan Pekerjaan Sosial Dalam Praktek Pekerjaan Sosial Di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta"** kepada :

Nama : FURQON
NIM : 1520010073
No.HP/ Identitas : 08235922760 / 5272050510890002
Prodi/ Jurusan : IIS/ Pekerjaan Sosial
Fakultas : Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas
Bantul Yogyakarta
Waktu Penelitian : 04 Januari 2017 s/d 03 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA

BADAN KESBANGPOL DIY



AGUNG SUPRIYONO, SH

NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Direktur Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



Yogyakarta, 03 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/ 1035/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Bantul
1. Up. Kepala BAPPEDA Bantul
2. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRPTPD) Bantul

DI

YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-27/ Un.02/DPPs/PP.00.9/ 01/ 2017
Tanggal : 31 Januari 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"implementasi Pengetahuan Pekerjaan Sosial Dalam Praktek Pekerjaan Sosial Di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta"** kepada :

Nama : FURQON
NIM : 1520010073
No.HP/ Identitas : 08235922760 / 5272050510890002
Prodi/ Jurusan : IIS/ Pekerjaan Sosial
Fakultas : Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Bantul Yogyakarta
Waktu Penelitian : 04 Januari 2017 s/d 03 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA

BADAN KESBANGPOL DIY



AGUNG SUPRIYONO, SH

NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Direktur Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



Yogyakarta, 03 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/ 1035/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Bantul
1. Up. Kepala BAPPEDA Bantul
2. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang
Disabilitas (BRPTPD) Bantul

DI

YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : B-27/ Un.02/DPPs/PP.00.9/ 01/ 2017
Tanggal : 31 Januari 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"implementasi Pengetahuan Pekerjaan Sosial Dalam Praktek Pekerjaan Sosial Di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta"** kepada :

Nama : FURQON
NIM : 1520010073
No.HP/ Identitas : 08235922760 / 5272050510890002
Prodi/ Jurusan : IIS/ Pekerjaan Sosial
Fakultas : Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas
BantulYogyakarta
Waktu Penelitian : 04 Januari 2017 s/d 03 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY



AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Direktur Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL
Alamat : Jl. Janti, Banguntapan, Telp. (0274) 514932, 563510
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas
Dari : Kepala Dinas Sosial DIY.
Nomor : 070 / 00917 / I.3
Tanggal : 7 Februari 2017
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Memperhatikan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 074/1035/Kesbangpol/2017, tanggal 3 Februari 2017, Perihal Permohonan Ijin penelitian maka dengan ini diharapkan Kepala Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas untuk memberikan ijin tersebut kepada :

Nama : Furqon
No Mahasiswa : 1520010073
Instansi : Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Waktu : 4 Januari 2017 s/d 3 April 2017.
Lokasi : Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas.
Judul : Implementasi pengetahuan pekerjaan sosial dalam praktek pekerjaan sosial di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta.
Catatan : Agar yang bersangkutan dapat memberikan laporan hasil penelitian ke Dinas Sosial DIY dan memenuhi ketentuan yang ada di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

Demikian untuk dilaksanakan.

A.N Kepala
Sekretaris


Endang Patmintersih, SH, M.Si
NIP. 19660404 199303 2 007

RIWAYAT HIDUP

A. Identitasi Diri

Nama : Furqon, S. Sos.I
Tempat/ Tanggal Lahir: Sambinae, 05 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum menikah
Alamat : Jl. Lingkar Selatan Pagutan Kr. Genteng No. 10
Mataram NTB Kode Pos. 83117
Email : istmefurqon@gmail.com
Blog : tuntifurqon.wordpress.com
No.HP : 082359227960

Nama Ayah : H. Muhammad
Nama Ibu : Hj. Siti Asiah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Madrasah Ibtidaiyah Sambinae Kota Bima, Lulus Tahun 2000
 - b. SLTPN 01 Kota Bima, Lulus Tahun 2003
 - c. MAN 02 Kota Bima, lulus Tahun 2006
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Lulus Tahun 2011
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Fajar English Club Pare Kediri Jawa Timur
 - b. Krisna Pare Kediri Jawa Timur

C. Riwayat Pekerjaan

1. Yayasan Peduli Anak Lombok sebagai Koordinator Shelter dan Konselor

D. Pengalaman Organisasi

1. BEM Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram
2. HMJ Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Pramuka Khalid bin Walid IAIN Mataram

E. Karya Ilmiah

1. Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Bima Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial dalam buku Ontologi PUSMAJA untuk Kemajuan Daerah Bima dan Kota Bima tahun Tahun 2016
2. Partisipasi Mahasiswa Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Kosentrasi Pekerjaan Sosial Untuk Meningkatkan Elektabilitas Profesi Pekerja Sosial Di Masyarakat pada Graduate Forum Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016
3. Pembinaan Anak Jalanan di Yayasan Peduli Anak Lombok dalam Jurnal Komunitas Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Mataram Tahun 2016
4. Rehabilitasi Sosial Sebagai Upaya Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Daksa Melalui Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta dalam Jurnal Inklusi PLD UIN Sunan Kalijaga (dalam proses editing)

Yogyakarta, 05 Juni 2017

Furqon, M. Si